

LAPORAN

AKUNTABILITAS

KINERJA

DEPUTI BIDANG
SISTEM INFORMASI
KEPEGAWAIAN
2023





KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Deputy Bidang Sistem Informasi Kepegawaian (SINKA) merupakan perwujudan pertanggungjawaban akuntabilitas dan transparansi kinerja Deputy Bidang Sistem Informasi Kepegawaian yang di dalamnya menguraikan rencana kerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kerja tersebut dan realisasi anggaran.

Penyusunan LKj Deputy Bidang Sistem Informasi Kepegawaian mengacu pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara. Selain itu, LKj Deputy Bidang Sistem Informasi Kepegawaian tahun 2023 disusun mengacu pada Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Sistem Informasi Kepegawaian tahun 2023 yang telah disepakati.

Sepanjang tahun 2023, Deputy Bidang Sistem Informasi Kepegawaian telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Tahun 2023 yang terdiri dari delapan sasaran strategis dan lima belas Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam LKj ini akan dijabarkan perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2023 dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, serta beberapa kinerja lainnya yang telah dicapai oleh Deputy Bidang Sistem Informasi Kepegawaian. Secara umum, Deputy Bidang Sistem Informasi Kepegawaian telah memenuhi target dari IKU yang telah disepakati, meskipun terdapat beberapa Indikator Kinerja yang perlu ditingkatkan capaiannya. Setiap keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian IKU ini akan dijadikan media evaluasi dalam proses perbaikan peningkatan kinerja ke depan. Akhir kata, semoga laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan pemangku kepentingan dan menjadi pendorong peningkatan kinerja organisasi Deputy Bidang Sistem Informasi Kepegawaian.

Jakarta, 31 Januari 2024
Deputy Bidang Sistem Informasi Kepegawaian
Badan Kepegawaian Negara



RINGKASAN EKSEKUTIF

Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian (SINKA) telah Menyusun Perjanjian Kinerja pada tahun 2023 dan disepakati bersama antara Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara dalam rangka untuk mencapai target kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan. Perjanjian Kinerja tersebut menjadi dasar Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian untuk bekerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Seluruh Direktorat di bawah Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian telah berupaya dan bekerjasama semaksimal mungkin untuk memenuhi setiap target kinerja tersebut.

Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian tahun 2023 menjelaskan delapan sasaran strategis yang terbagi kedalam tiga perspektif pendekatan menggunakan *balanced scorecard*. Pada perspektif *customer* sasaran strategis yang ditargetkan adalah terwujudnya peningkatan pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima dengan dua Indikator Kinerja Utama. Pada perspektif *internal process* terdapat tiga sasaran strategis yaitu Pemenuhan Regulasi Teknis Tata Kelola TIK ASN, Peningkatan Kualitas Data dan Informasi ASN, Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan di Lingkungan Deputi Bidang SINKA. Secara keseluruhan pada perspektif ini terdapat tujuh Indikator Kinerja Utama. Pada perspektif terakhir yaitu *learning and growth* memiliki empat sasaran strategis yaitu Peningkatan Kompetensi ASN di Lingkungan Deputi bidang SINKA, Penyelenggaraan Sistem Informasi Internal di Lingkungan Deputi Bidang SINKA, Penyelenggaraan Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pelayanan prima di Lingkungan Deputi Bidang SINKA dan Pengelolaan Anggaran yang Efisien dan Akuntabel di Lingkungan Deputi Bidang SINKA dengan enam Indikator Kinerja Utama. Total terdapat lima belas Indikator Kinerja Utama beserta targetnya yang ditetapkan sebagai standar kinerja selama tahun 2023.

Dari lima belas Indikator Kinerja Utama tahun 2023 yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa terdapat tujuh IKU yang realisasinya melebihi target Perjanjian Kinerja, lima IKU yang realisasinya sesuai dengan target Perjanjian Kinerja, dan tiga IKU yang realisasinya di bawah target Perjanjian Kinerja. Detail dari masing-masing IKU tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

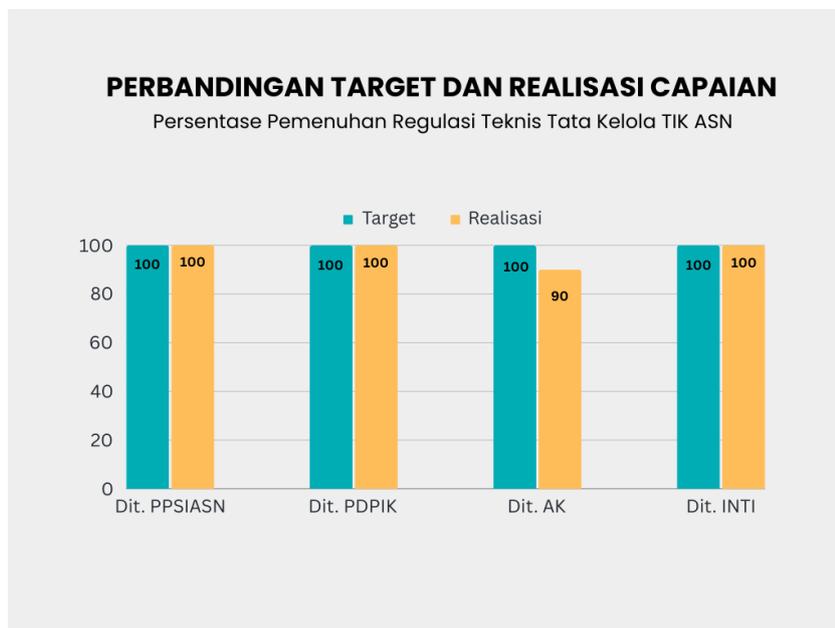
Tabel 1 Rincian Realisasi IKU terhadap Target Sesuai dengan Perjanjian Kinerja

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
Realisasi Indikator Kinerja Utama Melebihi Target Perjanjian Kinerja			
1	IKU.1 Indeks Kepuasan Instansi Terhadap Pembinaan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	88	88,94
2	IKU.2 Indeks Kepuasan Pengguna atas Layanan Data dan Informasi ASN	88	88,15
3	IKU.4 Persentase Optimalisasi Kualitas Data ASN	97	98,76
4	IKU.7 Persentase Digitalisasi Arsip Kepegawaian ASN	93	95,63
5	IKU.8 Persentase Tingkat Ketersediaan Infrastruktur TIK	99	99,99
6	IKU.10 Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang SINKA	80	82,62
7	IKU.14 Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Deputi Bidang SINKA	99	99,07
Realisasi Indikator Kinerja Utama Sesuai Target Perjanjian Kinerja			
1	IKU.6 Persentase Integrasi Sistem Informasi ASN	100	100
2	IKU.9 Jumlah Dokumen Monitor dan Evaluasi Kegiatan di Lingkungan Deputi Bidang SINKA	6	6
3	IKU.11 Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang Terstandar	100	100
4	IKU.12 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Deputi Bidang SINKA	100	100
5	IKU.15 Persentase Tindak Lanjut Hasil Audit/ Pemeriksaan BPK/ Inspektorat	100	100
Realisasi Indikator Kinerja Utama Sesuai Target Perjanjian Kinerja			
1	IKU.3 Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis Tata Kelola TIK ASN	100	98
2	IKU.5 Persentase Pembangunan dan Pengembangan SIASN	100	91,94
3	IKU.13 Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Deputi Bidang SINKA	81	67

Untuk Indikator Kinerja Utama yang tidak mencapai target sesuai dengan Perjanjian Kinerja dikarenakan oleh beberapa hal sebagai berikut:

IKU.3 Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis Tata Kelola TIK ASN

Unit penanggung jawab pelaksanaan kegiatan pemenuhan regulasi teknis tata kelola TIK ASN di lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian yaitu Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi, Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi ASN, Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian, serta Direktorat Arsip Kepegawaian. Dalam pelaksanaannya, masing-masing Direktorat memiliki target perjanjian kinerja sebesar 100%. Realisasi pemenuhan regulasi teknis tata kelola TIK ASN pada masing-masing Direktorat dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 1 Realisasi Persentase Regulasi Teknis Tata Kelola TIK ASN pada Masing-Masing Direktorat di Lingkungan Deputi Bidang SINKA

Dari grafik di atas, diketahui bahwa terdapat satu Direktorat yang realisasinya belum mencapai target, yaitu Direktorat Arsip Kepegawaian. Realisasi Direktorat Arsip Kepegawaian Tahun 2023 sebesar 90% dikarenakan belum disahkannya Surat Edaran BKN pada tahun ini sesuai dengan target yang ditetapkan. Surat Edaran BKN masih berupa rancangan dalam tahap penyempurnaan dan pembahasan internal. Kendala yang dialami sehingga regulasi masih berupa rancangan yaitu kurangnya pemahaman SDM dalam prosedur penyusunan peraturan dan substansi arsip kepegawaian secara nasional dan regulasi yang disusun saat ini akan mengatur lingkup eksternal juga sehingga penyusunannya lebih kompleks.

IKU.5 Persentase Pembangunan dan Pengembangan SIASN

Untuk IKU ini, unit penanggung jawabnya yaitu Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi ASN. Pada tahun 2023 ini, target yang ditetapkan sebesar 100%, namun realisasi yang dicapai sebanyak 86,33%. Hal tersebut disebabkan proses verifikasi info jabatan memakan waktu sehingga tidak bisa dilakukan testing Pertek Formasi. Selain itu, proses bisnis yang belum fix pada unit pengampu dilayanan Manajemen JF. Dalam pengembangan Layanan Talent Pool terjadi perubahan draft regulasi pada kebijakan TM membuat cakupan pembangunan TM menjadi terkendala. Selain itu terdapat kendala dalam ketersediaan data pendukung dalam pembangunan Talent Manajemen seperti potensi, data standar kompetensi teknis, data rumpun jabatan, dan data kompleksitas pekerjaan.

IKU.13 Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Deputy Bidang SINKA

Realisasi capaian sebesar 67 didapatkan dari Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Deputy Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Tahun 2023 yang disampaikan oleh inspektorat. Namun dari hasil tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu dikonfirmasi dengan Inspektorat terkait beberapa hal sebagai berikut:

- Pengumpulan data dan pengukuran capaian kinerja belum sepenuhnya memanfaatkan Teknologi Informasi. Dari klausul tersebut, kurang sesuai jika ditujukan pada Deputy Bidang SINKA sebab, Kedeputian maupun Direktorat di bawahnya sudah melakukan perhitungan nilai kinerja dan pengumpulan data sesuai dengan yang difasilitasi dan sesuai dengan standar dari Biro Perencanaan dan Organisasi. Untuk saran tersebut mungkin lebih tepatnya diperuntukkan untuk masukkan Biro Perencanaan dan Organisasi.
- Perbandingan data yang digunakan kurang relevan, sebab yang dibandingkan dari tahun 2022 dan 2023 di mana belum tentu sama target capaiannya pada masing-masing triwulan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
DAFTAR ISI.....	5
DAFTAR TABEL.....	6
DAFTAR GAMBAR	7
LAMPIRAN.....	9
BAB I PENDAHULUAN.....	10
1.1 Latar Belakang	10
1.2 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	10
1.3 Peran dan Isu Strategis	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
2.1 Rencana Strategis/ Rencana Kerja	13
2.2 Perjanjian Kinerja	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
3.1 Capaian Kinerja	20
BAB IV PENUTUP	96
4.1 Kesimpulan	96
4.2 Saran	97
LAMPIRAN.....	98

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rincian Realisasi IKU terhadap Target Sesuai dengan Perjanjian Kinerja.....	2
Tabel 2 Indikator Kinerja Deputi SINKA.....	12
Tabel 3 Indikator Kinerja Deputi SINKA.....	15
Tabel 4 Perjanjian Kinerja Deputi Bidang SINKA Tahun 2023	18
Tabel 5 Realisasi dan Capaian Kinerja Deputi Bidang SINKA Tahun 2023	20
Tabel 6 Tabel Penanggung Jawab IKU Deputi Bidang SINKA Tahun 2023.....	22
Tabel 7 Perbandingan Capaian dan Target IKU.1	23
Tabel 8 Perbandingan Capaian dan Target IKU.2	27
Tabel 9 Perbandingan Capaian dan Target IKU.3	34
Tabel 10 Perbandingan Capaian dan Target IKU.4	37
Tabel 11 Perbandingan Capaian dan Target IKU.5	49
Tabel 12 Perbandingan Capaian dan Target IKU.6	54
Tabel 13 Rekapitulasi Data Integrasi Instansi Tahun 2023	57
Tabel 14 Perbandingan Capaian dan Target IKU.7	60
Tabel 15 Perbandingan Capaian dan Target IKU.8	62
Tabel 16 Capaian Layanan Pusat Komputasi Tahun 2023	63
Tabel 17 Capaian Layanan Email Tahun 2023	65
Tabel 18 Capaian Layanan Kolaborasi Drive Tahun 2023.....	65
Tabel 19 Capaian Layanan Kolaborasi Drive Tahun 2023.....	66
Tabel 20 Capaian Layanan Blast Whatsapp Tahun 2023	67
Tabel 21 Capaian Layanan Blast Whatsapp Tahun 2023	68
Tabel 22 Capaian Layanan Pengujian Keamanan Tahun 2023	69
Tabel 23 Capaian Layanan Pengendalian Akses Tahun 2023	69
Tabel 24 Capaian Layanan Pengelolaan Insiden Tahun 2023	69
Tabel 25 Perbandingan Capaian dan Target IKU.9	73
Tabel 26 Perbandingan Capaian dan Target IKU. 10	75
Tabel 27 Perbandingan Capaian dan Target IKU. 11	78
Tabel 28 Perbandingan Capaian dan Target IKU. 12	81
Tabel 29 Perbandingan Capaian dan Target IKU. 13	83
Tabel 30 Perbandingan Capaian dan Target IKU. 14	89
Tabel 31 Pelaksanaan Anggaran Direktorat PDPIK Tahun 2023.....	90
Tabel 32 Perbandingan Capaian dan Target IKU. 15	92
Tabel 33 Capaian kinerja Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Tahun 2023	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Realisasi Persentase Regulasi Teknis Tata Kelola TIK ASN pada Masing-Masing Direktorat di Lingkungan Deputi Bidang SINKA	3
Gambar 2 Struktur Organisasi Kedeputian Bidang Sistem Informasi Kepegawaian	11
Gambar 3 Peta Strategi Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian.....	13
Gambar 4 Perbandingan Target dan Capaian IKU.1 Tahun 2020 - 2023.....	26
Gambar 5 Perbandingan Target dan Capaian IKU.1 Tahun 2023 dengan target renstra 2024	26
Gambar 6 Foto Pelaksanaan FGD Peningkatan Keamanan Informasi	31
Gambar 7 Kegiatan Pembinaan Layanan Dit. INTI.....	32
Gambar 8 Perbandingan Target dan Capaian IKU.2 Tahun 2020 - 2023.....	32
Gambar 9 Perbandingan Target dan Capaian IKU.2 Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2024.....	33
Gambar 10 Perbandingan Target dan Capaian IKU.3 Tahun 2020 -2024.....	36
Gambar 11 Perbandingan Target dan Capaian IKU.3 Tahun 2023 dengan Target Renstra 2024...37	
Gambar 12 Target dan capaian IKU. 4 Tahun 2020 - 2023.....	38
Gambar 13 Rapat Penetapan Kategori Disparitas Data ASN Tahun 2023	39
Gambar 14 Evaluasi Penyelesaian Disparitas Data ASN dengan Direktorat Pengadaan dan Kepegangatan serta Direktorat Status dan Kedudukan Pegawai	39
Gambar 15 Tampilan Dashboard Peremajaan Data.....	40
Gambar 16 Rapat Identifikasi Permasalahan Tabel Referensi	41
Gambar 17 Diskusi Panel Permasalahan Tabel Referensi dengan Kemenkes dan Kemendikbud ..42	
Gambar 18 Pembahasan Referensi Rumah Sakit Pendidikan dengan Kementerian Kesehatan.....42	
Gambar 19 Tampilan Dashboard Kerjasama Pemanfaatan Data.....	43
Gambar 20 Tampilan Dokumen Metadata Buku Statistik ASN, Standar Data Bidang ASN dan Katalog Data Bidang ASN.....	44
Gambar 21 Koordinasi Pemenuhan Formasi Calon PPPK untuk JF Guru pada Instansi Daerah tahun 2023 per Regional	45
Gambar 22 Rangkaian Kegiatan Diskusi Panel Penyusunan Data Analitik ASN.....	47
Gambar 23 Perbandingan Target dan Capaian IKU.4 Tahun 2023 dengan Target Renstra 2024...48	
Gambar 24 Perbandingan Target dan Capaian IKU.5 Tahun 2020 - 2023.....	52
Gambar 25 Perbandingan Target dan Capaian IKU.5 Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2024.....	53
Gambar 26 kegiatan review web service untuk instansi pusat	56
Gambar 27 Data Integrasi Wilayah Kerja Tahun 2023	58
Gambar 28 Perbandingan Target dan Capaian IKU.6 Tahun 2020 - 2023.....	58
Gambar 29 Perbandingan Target dan Capaian IKU.6 Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2024.....	59
Gambar 30 Perbandingan Target dan Capaian IKU.7 Tahun 2020 - 2023.....	61

Gambar 31 Perbandingan Target dan Capaian IKU.7 Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2024.....	62
Gambar 32 Perbandingan Target dan Capaian IKU.8 Tahun 2020 - 2023.....	70
Gambar 33 Perbandingan Target dan Capaian IKU.8 Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2024.....	72
Gambar 34 Perbandingan Target dan Capaian IKU.9 Tahun 2020 - 2024.....	74
Gambar 35 Perbandingan Target dan Capaian IKU. 10 Tahun 2020 - 2023.....	76
Gambar 36 Perbandingan Target dan Capaian IKU.10 Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2024.....	77
Gambar 37 Perbandingan Target dan Capaian IKU. 11 Tahun 2020 - 2023.....	79
Gambar 38 Perbandingan Target dan Capaian IKU.11 Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2024.....	80
Gambar 39 Perbandingan Target dan Capaian IKU. 12 Tahun 2020 - 2024.....	80
Gambar 40 Perbandingan Target dan Capaian IKU. 13 Tahun 2020 – 2023	83
Gambar 41 Perbandingan Target dan Capaian IKU.13 Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2024.....	87
Gambar 42 Perbandingan Target dan Capaian IKU. 14 Tahun 2020 – 2023	88
Gambar 43 Perbandingan Target dan Capaian IKU.14 Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2024.....	91
Gambar 44 Perbandingan Target dan Capaian IKU. 15 Tahun 2020 – 2023	92
Gambar 45 Perbandingan Target dan Capaian IKU.15 Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2024.....	95

LAMPIRAN

Lampiran 1 Capaian Kinerja Tahun 2023 Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian	98
Lampiran 2 Capaian Kinerja Tahun 2023 Direktorat INTI	100
Lampiran 3 Capaian Kinerja Tahun 2023 Direktorat PPSIASN	101
Lampiran 4 Capaian Kinerja Tahun 2023 Direktorat AK	103
Lampiran 5 Capaian Kinerja Tahun 2023 Direktorat PDPIK.....	104

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian di dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKN memiliki tugas melaksanakan penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sistem informasi manajemen kepegawaian. Dalam menjalankan tugasnya mengelola kebijakan teknis di bidang sistem informasi manajemen kepegawaian dituntut untuk transparan, akuntabel serta efektif dan efisien.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berdaya guna, dan bertanggung jawab, instansi pemerintah diwajibkan untuk menerapkan sistem akuntabilitas kinerja yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Perka BKN Nomor 3 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengatur secara khusus pelaksanaan SAKIP di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara.

Salah satu komponen penyelenggaraan SAKIP di lingkungan BKN adalah pelaporan kinerja yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada unit kerja atas penggunaan anggaran. Untuk memacu peningkatan kinerja Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian serta sebagai alat untuk menjaring masukan dari pemangku kepentingan, maka dipandang perlu untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerja sebagai pertanggung jawaban kepada setiap pemangku kepentingan.

1.2 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian bertugas untuk melakukan penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sistem informasi manajemen kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di bidang sistem informasi manajemen kepegawaian;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sistem informasi manajemen kepegawaian;
- c. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang sistem informasi manajemen kepegawaian;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidangnya;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian dibantu oleh 4 Direktorat, Ke-4 (empat) Direktorat tersebut adalah:

1. Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi (Dit. INTI) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan jaringan komunikasi data dan keamanan data, pengelolaan perangkat keras dan perangkat lunak, serta pengendalian dan pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi.
2. Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (Dit. PPSIASN) yang mempunyai tugas merencanakan, membangun, mengembangkan, melaksanakan tata kelola, dan menjamin mutu serta mengintegrasikan data dan aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara.
3. Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian (Dit. PDPIK) yang mempunyai tugas mengelola dan menyajikan informasi data kepegawaian.
4. Direktorat Arsip Kepegawaian (Dit. AK) yang mempunyai tugas mengembangkan sistem tata kelola, pengelolaan, pemeriksaan keabsahan dan kelengkapan, perekaman, penyimpanan, pemeliharaan, fasilitasi tata kelola, dan pelayanan informasi arsip kepegawaian.

Struktur Organisasi pada Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian adalah sebagai berikut:



Gambar 2 Struktur Organisasi Kedeputian Bidang Sistem Informasi Kepegawaian

Sumberdaya manusia yang ada di Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) pegawai dengan rincian per masing-masing unit Direktorat adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Indikator Kinerja Deputy SINKA

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai
1	Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian	1
2	Direktorat Arsip Kepegawaian	38
3	Direktorat Infrastruktur dan Teknologi Informasi	32
4	Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian	32
5	Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi ASN	37
Jumlah		155

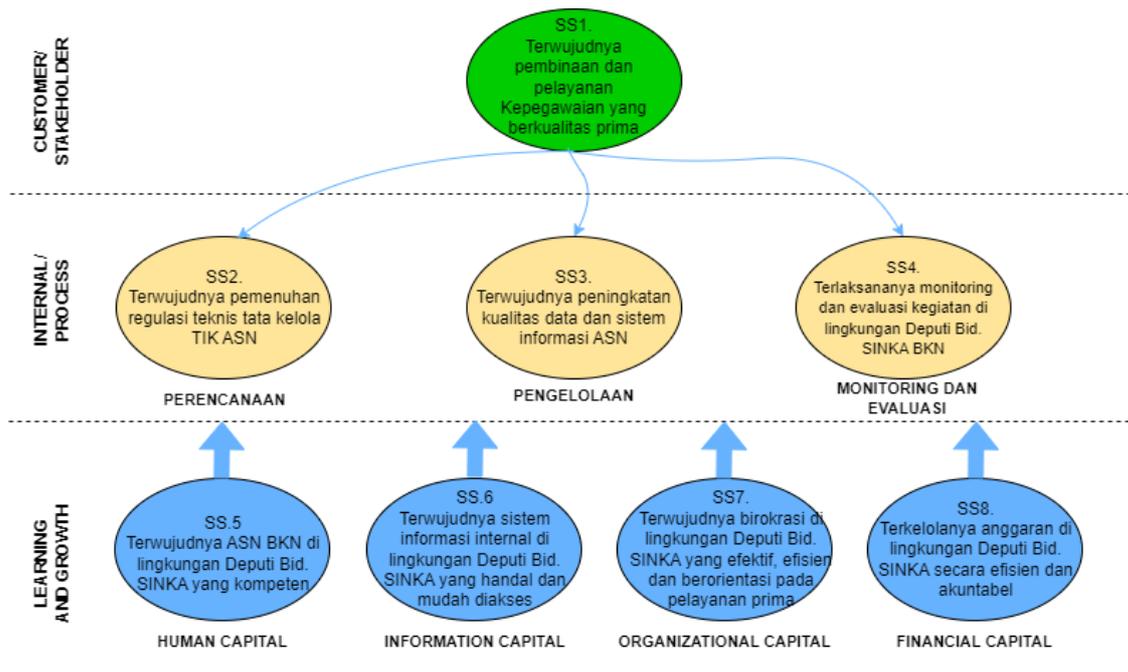
1.3 Peran dan Isu Strategis

Selaras dengan Visi Badan Kepegawaian Negara yaitu “Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”, maka dalam rangka mewujudkan visi tersebut, serta mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan Deputy Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara dalam memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan bidang Aparatur Sipil Negara melalui pengembangan sistem informasi Aparatur Sipil Negara berdasarkan sistem merit, dalam mendukung misi Badan Kepegawaian negara yakni meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara melalui : Penyimpanan informasi pegawai Aparatur Sipil Negara. Sedangkan tujuan yang akan dicapai Deputy Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara dalam mewujudkan misi tersebut adalah “Mewujudkan Peningkatan Kualitas Database dan Sistem Informasi ASN (SI-ASN)”. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh Sistem Informasi ASN yang terpadu dan terintegrasi secara nasional (meliputi pengelolaan data ASN yang handal dan terkini serta penyajian informasi kepegawaian secara akurat dan penyusunan talent pool); serta pengelolaan kepegawaian yang berbasis teknologi informasi (online).

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis/ Rencana Kerja

Sasaran Strategis yang telah ditetapkan Deputi Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/ impact*) dari satu atau beberapa program. Sasaran strategis tersebut merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Deputi Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara sebagai suatu *outcome/ impact* dari beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan. Penyusunan sasaran strategis Deputi Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam tiga perspektif, yakni *customer prespective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*.



Gambar 3 Peta Strategi Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian

CUSTOMER PRESPECTIVE

- 1) Sasaran strategis satu yang ingin dicapai adalah “Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima”, dengan indikator kinerja :
 - a. Indeks kepuasan instansi terhadap pembinaan pengelolaan data dan informasi ASN;
 - b. Indeks kepuasan pengguna atas layanan data dan informasi ASN.

INTERNAL PERSPECTIVE (BUSINESS PROCESS)

- 2) Sasaran strategis dua yang ingin dicapai adalah “Terwujudnya Pemenuhan Regulasi Teknis Tata Kelola TIK ASN”, dengan indikator kinerja berupa Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis Tata Kelola TIK ASN
- 3) Sasaran strategis tiga yang ingin dicapai adalah “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Data dan Sistem Informasi ASN”, dengan indikator kinerja:
 - a. Persentase Optimalisasi Kualitas Data ASN;
 - b. Persentase Pembangunan dan Pengembangan SIASN
 - c. Persentase Integrasi Sistem Informasi ASN;
 - d. Persentase Digitalisasi Arsip Kepegawaian ASN;
 - e. Persentase Tingkat Ketersediaan Infrastruktur TIK.
- 4) Sasaran strategis empat yang ingin dicapai adalah “Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan di Lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara”, dengan indikator kinerja:
 - a. Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kegiatan di Lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian.

LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE

- 1) Sasaran strategis lima yang ingin dicapai adalah “Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara yang kompeten di lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian”, dengan indikator kinerja: Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara.
- 2) Sasaran strategis enam yang ingin dicapai adalah “Terwujudnya Sistem Informasi Internal di Lingkungan Deputi Bidang SINKA”, dengan indikator kinerja berupa Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang Terstandar.
- 3) Sasaran strategis tujuh yang ingin dicapai adalah “Terwujudnya birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian yang efektif, efisien, dan berorientasi pelayanan prima, dengan indikator kinerja:
 - a. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Deputi Bidang SINKA;
 - b. Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas di lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara.
- 4) Sasaran strategis delapan yang ingin dicapai adalah “Terkelolanya anggaran di lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian secara efisien dan akuntabel”, dengan indikator kinerja:

- a. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
- b. Persentase Tindak Lanjut Hasil Audit/ Pemeriksaan oleh BPK/ Inspektorat.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis Deputi Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Indikator Kinerja Deputi SINKA

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
<i>CUSTOMER PERSPECTIVE</i>						
SS.1 Terwujudnya Pembinaan dan Pelayanan Kepegawaian yang Berkualitas Prima						
1. Indeks Kepuasan Instansi terhadap Pembinaan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Indeks	80	85	86	88	95
2. Indeks Kepuasan Pengguna atas Layanan Data dan Informasi ASN	Indeks	80	85	86	88	95
<i>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE (BUSINESS PROCESS)</i>						
SS.2 Terwujudnya Pemenuhan Regulasi Teknis Tata Kelola TIK ASN						
3. Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis Tata Kelola TIK ASN	%	75	100	100	100	100

SS.3 Terwujudnya Peningkatan Kualitas Data dan Sistem Informasi ASN							
4.	Persentase Optimalisasi Kualitas Data ASN	%	80	90	95	97	100
5.	Persentase Pembangunan dan Pengembangan SIASN	%	100	100	100	100	100
6.	Persentase Integrasi Sistem Informasi ASN	%	85	90	95	100	100
7.	Persentase Digitalisasi Arsip Kepegawaian ASN	%	72	80	87	93	100
8.	Persentase Tingkat Ketersediaan Infrastruktur TIK	%	99	99	99	99	99
SS.4 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan di Lingkungan Deputi Bidang Bidang SINKA							
9.	Jumlah Dokumen Monitor dan Evaluasi	%					100
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE							
SS.5 Terwujudnya ASN BKN di Lingkungan Deputi Bidang SINKA yang Kompeten							
10.	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang SINKA	Indeks	77	77	78	80	83

SS.6 Terwujudnya Sistem Informasi Internal di Lingkungan Deputi Bidang SINKA							
11.	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang Terstandar	%	100	100	100	100	100
SS.7 Terwujudnya Birokrasi di Lingkungan Deputi Bidang SINKA BKN yang Efektif, Efisien dan Berorientasi Pelayanan Prima							
12.	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Deputi Bidang SINKA	%				100	100
13.	Skor atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Deputi Bidang SINKA	Nilai	65	75	79	81	85
SS.8 Terkelolanya Anggaran di Lingkungan Deputi Bidang SINKA secara Efisien dan Akuntabel							
14.	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Deputi Bidang SINKA	%	95	97	98	99	100
15.	Persentase Tindak Lanjut Hasil Audit/ Pemeriksaan oleh BPK/ Inspektorat	%	100	100	100	100	100

2.2 Perjanjian Kinerja

Dari sasaran strategis dan Indikator Kinerja Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Tahun 2020-2024 tersebut, perjanjian kinerja Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 4 Perjanjian Kinerja Deputi Bidang SINKA Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Pembinaan dan Pelayanan Kepegawaian yang Berkualitas Prima	Indeks Kepuasan Instansi terhadap Pembinaan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	88
		Indeks Kepuasan Pengguna atas Layanan Data dan Informasi ASN	88
2.	Terwujudnya Pemenuhan Regulasi Teknis Tata Kelola TIK ASN	Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis Tata Kelola TIK ASN	100%
3.	Terwujudnya peningkatan kualitas data dan sistem Informasi ASN	Persentase Optimalisasi Kualitas Data ASN	97%
		Persentase Pembangunan dan Pengembangan SIASN	100%
		Persentase Integrasi Sistem Informasi ASN	100%
		Persentase Digitalisasi Arsip Kepegawaian ASN	93%
		Persentase Tingkat Ketersediaan Infrastruktur TIK	99%
4.	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan di Lingkungan Deputi Bidang SINKA	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kegiatan di lingkungan Deputi Bidang SINKA	6 Dok
5.	Terwujudnya ASN BKN di Lingkungan Deputi Bidang SINKA yang Kompeten	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang SINKA	80
6.	Terwujudnya Sistem Informasi Internal di Lingkungan Deputi Bidang SINKA	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang Terstandar	100%
7.	Terwujudnya Birokrasi di Lingkungan Deputi Bidang SINKA yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pelayanan Prima	Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Bidang SINKA	100
		Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Deputi Bidang SINKA	81
8.	Terkelolanya Anggaran di Lingkungan Deputi	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di	99%

	Bidang SINKA secara Efisien dan Akuntabel	lingkungan Deputi Bidang SINKA	
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat	100%

Perjanjian kinerja Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Tahun 2023 tersebut kemudian diturunkan lagi kepada 4 (empat) Direktorat di bawah Deputi Bidang SINKA secara *cascading* sesuai Manual Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang SINKA yang sudah ditetapkan.

Untuk mendukung pencapaian target kinerja yang telah diperjanjikan di Tahun 2023, anggaran awal yang dialokasikan secara keseluruhan di semua Direktorat di bawah Deputi Bidang SINKA sebesar Rp 19.225.200.000,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian (SINKA) merupakan salah satu unit kerja yang memiliki peran penting dan strategis dalam mewujudkan Sasaran Strategis Badan Kepegawaian Negara. Sasaran Strategis BKN dapat diuraikan lagi menjadi Sasaran strategis Deputi Bidang SINKA sesuai tugas dan fungsi yang diemban seperti pada tabel berikut :

Tabel 5 Realisasi dan Capaian Kinerja Deputi Bidang SINKA Tahun 2023

Kode SS	Sasaran Strategis	Kode IKU	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Customer Perspective						
SS.1	Terwujudnya Pembinaan dan Pelayanan Kepegawaian yang Berkualitas Prima	IKU.1	Indeks Kepuasan Instansi terhadap Pembinaan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	88	88,94	101,07%
		IKU.2	Indeks Kepuasan Pengguna atas Layanan Data dan Informasi ASN	88	88,15	100,17%
Internal Process Perspective						
SS.2	Terwujudnya Pemenuhan Regulasi Teknis Tata Kelola TIK ASN	IKU.3	Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis Tata Kelola TIK ASN	100%	98%	98%
SS.3	Terwujudnya peningkatan kualitas data dan sistem Informasi ASN	IKU.4	Persentase Optimalisasi Kualitas Data ASN	97%	98,76 %	101,82%
		IKU.5	Persentase Pembangunan dan Pengembangan SIASN	100%	91,94%	91,94%
		IKU.6	Persentase Integrasi Sistem Informasi ASN	100%	100%	100%
		IKU.7	Persentase Digitalisasi Arsip Kepegawaian ASN	93%	95,63%	102,83%
		IKU.8	Persentase Tingkat Ketersediaan Infrastruktur TIK	99%	99,99%	101%
SS.4	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan di Lingkungan	IKU.9	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kegiatan di lingkungan Deputi Bidang SINKA	6 dok	6 dok	100%

	Deputi Bidang SINKA					
Learning & Growth Perspective						
SS.5	Terwujudnya ASN BKN di Lingkungan Deputi Bidang SINKA yang Kompeten	IKU.10	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang SINKA	80	82,62	103,27%
SS.7	Terwujudnya Sistem Informasi Internal di Lingkungan Deputi Bidang SINKA	IKU.11	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang Terstandar	100%	100%	100%
SS.8	Terwujudnya Birokrasi di Lingkungan Deputi Bidang SINKA yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pelayanan Prima	IKU.12	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Deputi Bidang SINKA	100%	100%	100%
		IKU.13	Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Deputi Bidang SINKA	81	67	83,27%
SS.9	Terkelolanya Anggaran di Lingkungan Deputi Bidang SINKA secara Efisien dan Akuntabel	IKU.14	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di lingkungan Deputi Bidang SINKA	99%	99,07%	100,07%
		IKU.15	Persentase Tindak Lanjut Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat	100%	100%	100%

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) dari setiap Sasaran Strategis Deputi Bidang SINKA diatas untuk kemudian diuraikan lagi ke 4 (empat) Direktorat yang berada dibawah Deputi SINKA yaitu Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi (Dit. INTI), Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (Dit. PPSIASN), Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian (Dit. PDPIK) dan Direktorat Arsip Kepegawaian (Dit. AK) sesuai dengan manual IKU yang sudah ditetapkan.

Tabel 6 Tabel Penanggung Jawab IKU Deputi Bidang SINKA Tahun 2023

Kode SS	Kode IKU	Indikator Kinerja	Unit/Pihak Penanggung jawab IKU			
			Dit. INTI	Dit. PPSIASN	Dit. PDPIK	Dit. AK
SS.1	IKU.1	Indeks Kepuasan Instansi terhadap Pembinaan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	-	√	√	√
	IKU.2	Indeks Kepuasan Pengguna atas Layanan Data dan Informasi ASN	√	√	√	√
SS.2	IKU.3	Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis Tata Kelola TIK ASN	√	√	√	√
SS.3	IKU.4	Persentase Optimalisasi Kualitas Data ASN	-	-	√	-
	IKU.5	Persentase Pembangunan dan Pengembangan SIASN	-	√	-	-
	IKU.6	Persentase Integrasi Sistem Informasi ASN	-	√	-	-
	IKU.7	Persentase Digitalisasi Arsip Kepegawaian ASN	-	-	-	√
	IKU.8	Persentase Tingkat Ketersediaan Infrastruktur TIK	√	-	-	-
SS.4	IKU.9	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kegiatan di lingkungan Deputi Bidang SINKA	√	√	√	√
SS.5	IKU.10	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang SINKA	√	√	√	√
SS.6	IKU.11	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang Terstandar	√	√	√	√
SS.7	IKU.12	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Deputi Bidang SINKA	√	√	√	√
	IKU.13	Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Deputi Bidang SINKA	√	√	√	√
SS.8	IKU.14	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di lingkungan Deputi Bidang SINKA	√	√	√	√

Kode SS	Kode IKU	Indikator Kinerja	Unit/Pihak Penanggung jawab IKU			
			Dit. INTI	Dit. PPSIASN	Dit. PDPIK	Dit. AK
	IKU.15	Persentase Tindak Lanjut Hasil Audit/ Pemeriksaan oleh BPK/ Inspektorat	√	√	√	√

Capaian target kinerja diukur dengan membandingkan antara target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasi yang dicapai. Berikut uraian capaian setiap indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan pembagian penanggung jawab IKU di atas:

SS.1. Terwujudnya Pembinaan dan Pelayanan Kepegawaian yang Berkualitas Prima

IKU.1 Indeks Kepuasan Instansi terhadap Pembinaan Pengelolaan Data dan Informasi ASN

Indikator ini mengukur tingkat kepuasan instansi pusat dan daerah dalam pemberian dukungan pembinaan sistem informasi ASN yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif. Capaian indikator ini diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sesuai dengan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017.

Tabel 7 Perbandingan Capaian dan Target IKU.1

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi	Kinerja
Indeks Kepuasan Instansi terhadap Pembinaan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	88	88,94	101,07%

Sesuai dengan rencana target indikator kinerja utama pada tahun 2023 mengenai indeks kepuasan instansi terhadap pembinaan pengelolaan data dan informasi ASN sebesar 88, di mana perhitungan dilakukan tiap semester yang berarti dilakukan 2 kali dalam satu tahun. Kegiatan dapat dimulai dari Triwulan II. Dari target tersebut, Direktorat PDPIK, Direktorat AK, dan Direktorat PPSIASN berhasil mencapai target realisasi dengan rata-rata nilai 88,94 di mana capaian kinerja tahun 2023 mengenai IKU. 1 sebesar 101,07%. Dari hasil tersebut, didapatkan rincian sebagai berikut:

- a. Direktorat PDPIK : 89,20
- b. Direktorat AK : 87,05
- c. Direktorat PPSIASN : 90,51

Berdasarkan nilai tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan mutu pelayanan Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian mendapatkan kategori B, yaitu kinerja unit pelayanan Baik.

Secara rinci, kegiatan dari masing-masing Direktorat pengampu dijabarkan sebagai berikut:

1. Direktorat PDPIK

Berdasarkan hasil pengukuran selama tahun 2023, layanan penyajian informasi kepegawaian mendapat nilai BAIK sehingga dapat disimpulkan secara umum bahwa standarisasi layanan sudah terbentuk sehingga menghasilkan kualitas layanan yang baik. Seluruh variabel dan indikator layanan data bernilai baik dengan nilai tertinggi pada indikator perilaku pelaksana. Penyelenggaraan survei layanan penyajian informasi kepegawaian Direktorat PDPIK dilaksanakan per triwulan dengan indeks tercapai sebesar 88,02 pada tahun 2023.. Rincian kegiatan yang dilakukan dalam pembinaan instansi diantaranya:

- a. Penyajian Informasi dan Statistik ASN
- b. Penyajian Data terkait Kinerja Layanan Kepegawaian ASN (seleksi, pengadaan, kepangkatan, mutasi, SKP, pensiun)
- c. Penyajian Data untuk Mendukung Proses Integrasi
- d. Penyajian Data Referensi serta Struktur Data
- e. Penyajian Data terkait Proses Pemandaran, Rekonsiliasi, Validasi, Verifikasi dan Pemutakhiran Data
- f. Penyajian Data terkait Kerjasama Pemanfaatan dan Analisis Data ASN

Sedangkan responden dari survei indeks kepuasan atas pembinaan Direktorat PDPIK diantaranya:

- a. Unit Kerja Pengelola Kepegawaian Seluruh Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat
- b. Unit Kerja Pengelola Kepegawaian Seluruh BKD/BKPP/BKPSDM Provinsi/Kabupaten/Kota Pemerintah Daerah
- c. Seluruh Unit Kerja BKN maupun Kantor Regional I s.d. XIV Badan Kepegawaian Negara penerima layanan penyajian data dan/ atau informasi kepegawaian ASN
- d. Stakeholders penerima layanan penyajian data dan/ atau informasi kepegawaian ASN

Pelaksanaan survei selama tahun 2023 dilakukan sebanyak empat kali yaitu pada tanggal 10 April – 16 April 2023, 26 Juni – 30 Juni 2023, 22 September – 18 Oktober 2023, dan 1 Desember – 15 Desember 2023.

2. Sedangkan Direktorat PPSIASN capaian kinerja sebesar 102,85%. Capaian tersebut didapat dengan melakukan pengukuran survey kepuasan instansi terhadap pembinaan penerapan sistem informasi ASN secara online menggunakan fasilitas google form. Untuk dapat melihat secara detail proses pengelolaan data survey kepuasan instansi terhadap pembinaan penerapan sistem informasi ASN dapat dilihat pada link <https://bit.ly/LKJ2023PPSIASN>. Unsur yang mendapatkan nilai tertinggi adalah unsur perilaku pelaksana, hal ini menunjukkan bahwa perilaku petugas sudah bersikap sopan dan ramah didalam melakukan pembinaan. Selain itu, unsur yang mendapatkan nilai terendah adalah waktu penyelesaian, unsur ini akan menjadi perhatian untuk perbaikan ditahun berikutnya. Rendahnya unsur waktu penyelesaian, dikarenakan keterbatasan SDM pada direktorat PPSIASN, dimana SDM di PPSIASN juga masih mengerjakan tugas adhoc seperti SSCASN, PPPK, pengembangan sistem dan lainnya.
3. Direktorat AK, hasil perhitungan nilai persepsi dari 115 responden pada semester 1 dan 82 responden pada semester 2 yang terjaring dalam SKM tahun 2023 pada Direktorat Arsip Kepegawaian diperoleh nilai IKM sebesar 87,05. Berdasarkan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan mutu pelayanan Direktorat Arsip Kepegawaian mendapatkan kategori B, yakni Kinerja Unit Pelayanan Baik. Perilaku pelaksana mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,56 berada pada kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa dalam memberikan pelayanan, Direktorat Arsip Kepegawaian telah menjalin komunikasi dan kerja sama yang baik dengan kantor regional dan instansi pusat. Sedangkan unsur pelayanan yang mendapat nilai terendah adalah sarana dan prasarana sebesar 3,36 hal ini menjadikan unsur sarana dan prasarana menjadi prioritas yang perlu ditingkatkan. Pengukuran survei menggunakan metode kuantitatif skala *likert*. Skala *likert* adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala *Likert* responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Hasil indeks bersumber pada hasil kuesioner yang telah di isi melalui *google form* oleh kantor regional dan instansi pusat yang telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 14 tahun 2017 dapat dilihat hasilnya pada link berikut:

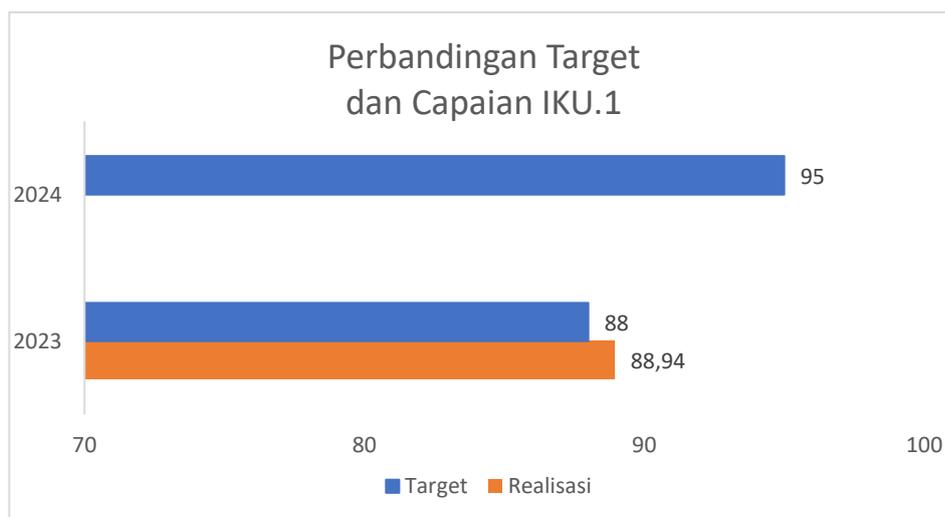
- <https://bit.ly/SurveiPembinaanAK>

- <https://bit.ly/SurveiPembinaan22023>
- <https://bit.ly/SurveiPembinaanInstansi22023>



Gambar 4 Perbandingan Target dan Capaian IKU.1 Tahun 2020 - 2023

Hasil indeks kepuasan instansi terhadap pembinaan pengelolaan data dan informasi ASN dari tahun ke tahun mengalami peningkatan hasil, kecuali pada tahun 2022 di mana target yang ditetapkan sebesar 87 tetapi realisasi yang dicapai sebesar 85,82. Namun walaupun tidak mencapai target yang ditetapkan, hasil tersebut masih dalam katehori baik. Kendala yang dihadapi pada tahun 2022 sudah ditindaklanjuti dan menghasilkan pencapaian realisasi lebih dari taget perjanjian kinerja tahun 2023 yaitu sebesar 88.



Gambar 5 Perbandingan Target dan Capaian IKU.1 Tahun 2023 dengan target renstra 2024

Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa target renstra tahun 2024 sebesar 95, di mana terdapat selisih 7 poin dari target sebelumnya. Dengan target yang semakin tinggi tersebut dan hasil evaluasi kinerja tahun 2023, maka tindak lanjut yang akan dilakukan pada tahun 2024 untuk mencapai target tersebut dengan memperluas jangkauan responden dengan tidak hanya menyebarkan surat pengisian survei, tetapi dengan memberikan survei langsung pada setiap permintaan layanan pembinaan dari instansi. Selain itu lebih tepat waktu dalam memberikan pembinaan.

IKU.2 Indeks Kepuasan Pengguna atas Layanan Data dan Informasi ASN

Indikator ini mengukur tingkat kepuasan instansi pusat dan daerah dalam pemberian layanan yang berkaitan dengan sistem informasi ASN, pengelolaan data dan penyajian informasi kepegawaian, informasi arsip kepegawaian ASN serta infrastruktur teknologi informasi yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif. Capaian indikator ini diperoleh dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sesuai dengan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 yang dilakukan oleh semua Direktorat di Deputi SINKA seperti yang ditunjukkan pada tabel 3. Indeks kepuasan pengguna atas layanan data dan informasi ASN pada tahun 2023 telah ditetapkan targetnya sebesar 88.

Tabel 8 Perbandingan Capaian dan Target IKU.2

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi	Kinerja
Indeks Kepuasan Pengguna atas Layanan Data dan Informasi ASN	88	88,15	100,17%

Berdasarkan rencana target indikator kinerja utama, IKU. 2 yaitu Indeks Kepuasan Pengguna atas Layanan Data dan Informasi ASN dilakukan perhitungan tiap semester yang berarti dilakukan 2 kali dalam satu tahun. Kegiatan dapat dimulai dari Triwulan II. Pada target tahun 2023 telah ditetapkan nilai sebesar 88 dan pada tahun 2023 ini berhasil dicapai dengan nilai rata-rata 88,15 dimana capaian kinerja yang diperoleh sebesar 100,17% yang termasuk dalam kategori baik. Rincian dari hasil tersebut sebagai berikut:

a. Direktorat PDPIK: 88,02

Rincian kegiatan yang dilakukan dalam mengukur indeks kepuasan pengguna atas layanan data dan informasi ASN sebagai berikut :

- a. Penyajian Informasi dan Statistik ASN
- b. Penyajian Data terkait Kinerja Layanan Kepegawaian ASN (seleksi, pengadaan, kepangkatan, mutasi, SKP, pensiun)
- c. Penyajian Data untuk Mendukung Proses Integrasi
- d. Penyajian Data Referensi serta Struktur Data
- e. Penyajian Data terkait Proses Pemadanan, Rekonsiliasi, Validasi, Verifikasi dan Pemutakhiran Data
- f. Penyajian Data terkait Kerjasama Pemanfaatan dan Analisis Data ASN

Responden dari survei yang dilakukan terdiri atas:

- a. Unit Kerja Pengelola Kepegawaian Seluruh Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat
- b. Unit Kerja Pengelola Kepegawaian Seluruh BKD/BKPP/BKPSDM Provinsi/Kabupaten/Kota Pemerintah Daerah
- c. Seluruh Unit Kerja BKN maupun Kantor Regional I s.d. XIV Badan Kepegawaian Negara penerima layanan penyajian data dan/atau informasi kepegawaian ASN
- d. Stakeholders penerima layanan penyajian data dan/atau informasi kepegawaian ASN

Pelaksanaan survei layanan penyajian informasi kepegawaian Direktorat PDPIK selama tahun 2023 dilakukan sebanyak empat kali yaitu pada:

- a. Tanggal 10 April - 16 April 2023
- b. Tanggal 26 Juni - 30 Juni 2023
- c. Tanggal 22 September - 18 Oktober 2023
- d. Tanggal 1 Desember - 15 Desember 2023

Terdapat beberapa program/ kegiatan penunjang selama pelaksanaan tahun 2023, yaitu:

- a. Pemantauan dan Evaluasi SOP
- b. Pembangunan dashboard penyelesaian anomali data dan pemutakhiran data mandiri
- c. Penyajian statistik ASN melalui Portal Satu Data ASN

b. Direktorat AK: 86,86

Hasil perhitungan nilai persepsi dari 90 responden pada semester 1 dan 77 responden pada semester 2 yang terjaring dalam SKM Tahun 2023 pada Direktorat Arsip Kepegawaian diperoleh nilai IKM sebesar 86,86. Berdasarkan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan mutu pelayanan Direktorat Arsip Kepegawaian mendapatkan kategori B, yakni Kinerja Unit Pelayanan Baik. Perilaku pelaksana mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,54 berada pada kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa dalam memberikan pelayanan, Direktorat Arsip Kepegawaian telah menjalin komunikasi dan kerja sama yang baik dengan kantor regional dan instansi pusat. Sedangkan unsur pelayanan yang mendapat nilai terendah adalah sarana dan prasarana sebesar 3,35 hal ini menjadikan unsur sarana dan prasarana menjadi prioritas yang perlu ditingkatkan. Pengukuran survei menggunakan metode kuantitatif skala *likert*. Skala *likert* adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala *Likert* responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Hasil indeks bersumber pada hasil kuesioner yang telah diisi melalui *google form* oleh kantor regional dan instansi pusat yang telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 14 tahun 2017 pada link berikut:

- <https://bit.ly/SurveiLayananInformasiKepegawaian>
- <https://bit.ly/SurveiLayanan22023>
- <https://bit.ly/SurveiLayananInstansi22023>.

c. Direktorat PPSIASN: 90,41

Capaian kinerja sebesar 102,74%. Capaian tersebut didapat dengan melakukan pengukuran survey kepuasan instansi terhadap pembinaan penerapan sistem informasi ASN secara online menggunakan fasilitas google form. Untuk dapat melihat secara detail proses pengelolaan data survey kepuasan instansi terhadap pembinaan penerapan sistem informasi ASN dapat dilihat pada link <https://bit.ly/LKJ2023PPSIASN>. Unsur yang mendapatkan nilai tertinggi adalah unsur persyaratan, hal ini menunjukkan bahwa adanya kemudahan persyaratan bagi penggunaan didalam melakukan permohonan atas layanan SIASN . Selain itu, unsur yang mendapatkan nilai terendah adalah waktu penyelesaian, unsur ini akan menjadi perhatian untuk perbaikan ditahun berikutnya. Rendahnya unsur waktu penyelesaian,

dikarenakan keterbatasan SDM pada direktorat PPSIASN untuk menjawab atau memberikan pelayanan kepada pengguna secara cepat waktu, dimana SDM di PPSIASN juga masih mengerjakan tugas adhoc seperti SSCASN, PPPK, pengembangan sistem dan lainnya.

d. Direktorat INTI: 87,26

Pengukuran indeks kepuasan atas layanan infrastruktur teknologi informasi dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan yang telah diberikan oleh Direktorat INTI. Sehingga indeks tersebut dapat dijadikan tolok ukur kualitas layanan yang telah diberikan maupun kualitas SDM yang ada di Direktorat INTI dalam memberikan pelayanan. Pengukuran indeks kepuasan tersebut diukur sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada semester I dan semester II serta diukur sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017. Indeks 87,26 merupakan rata-rata dari nilai pada semester I dan Semester II yaitu 85,99 dan 88,48. Nilai tersebut berdasarkan hasil survei secara daring menggunakan *google form* yang dibagikan kepada para pegawai BKN pusat, Pusbang ASN, Kantor Regional dan UPT BKN yang mendapatkan layanan Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi. Berdasarkan hasil pengolahan data survei diperoleh rata - rata nilai indeks kepuasan pada tahun 2023 sebesar 87,26. Nilai ini masih belum memenuhi target kinerja tahun 2023 maupun renstra, namun nilai indeks tahun ini mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Setelah dilakukan evaluasi, ditemui hasil bahwa pada semester I, nilai yang didapatkan masih di bawah target yaitu sebesar 85,99. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hasil semester I, beberapa layanan mendapatkan nilai rendah. Salah satu penyebabnya adalah karena kurang tepatnya responden yang mengisi survei. Terdapat beberapa responden yang belum pernah memanfaatkan beberapa layanan Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi memberikan nilai rendah pada layanan tersebut. Selain itu, beberapa responden yang memberikan nilai rendah tidak memberikan kritik atau masukannya sehingga cukup sulit untuk mengidentifikasi penyebab ketidakpuasan pengguna atas suatu layanan Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi. Pada semester II, telah dilakukan perbaikan kuesioner berdasarkan evaluasi pelaksanaan survei pada semester I dan indeks yang didapat meningkat menjadi 88,48. Namun, rata – rata nilai tahunan masih di bawah target yaitu 87,26. Berdasarkan analisis hasil survei semester II, secara keseluruhan layanan Dit INTI sudah masuk dalam kategori "baik" dan "sangat baik". Namun, ada beberapa unsur SKM yang diberikan nilai rendah oleh para responden. Pada pelaksanaan survei semester II, telah ditambahkan pilihan alasan saat responden

memberikan nilai yang "kurang baik" atau "tidak baik" untuk dapat diidentifikasi layanan mana yang dirasa responden perlu perbaikan beserta alasannya sehingga nantinya tim Dit. INTI dapat menyusun rencana perbaikan layanan tersebut. Dari hasil analisis, alasan responden memberikan nilai rendah terbanyak pada layanan pegawai adalah alasan lain-lain (alasan tidak diberikan secara rinci). Sedangkan pada layanan unit kerja, alasan terbanyak adalah pengguna belum teredukasi secara optimal mengenai kesadaran keamanan aplikasi. Sehingga dari kendala tersebut, terdapat beberapa rekomendasi atau tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 yaitu:

- a. Menyusun ulang kalimat pada formulir survei agar lebih mudah dipahami oleh responden.
- b. Penentuan responden sesuai dengan layanan yang telah diterima sehingga lebih tepat sasaran.
- c. Memberikan sosialisasi yang lebih menyeluruh terkait layanan infrastruktur teknologi informasi agar dapat dikenali dan dipahami oleh pengguna.
- d. Membuat aplikasi *service desk* agar pelayanan berjalan sesuai SLA, dapat dipantau, dan memudahkan pengguna.

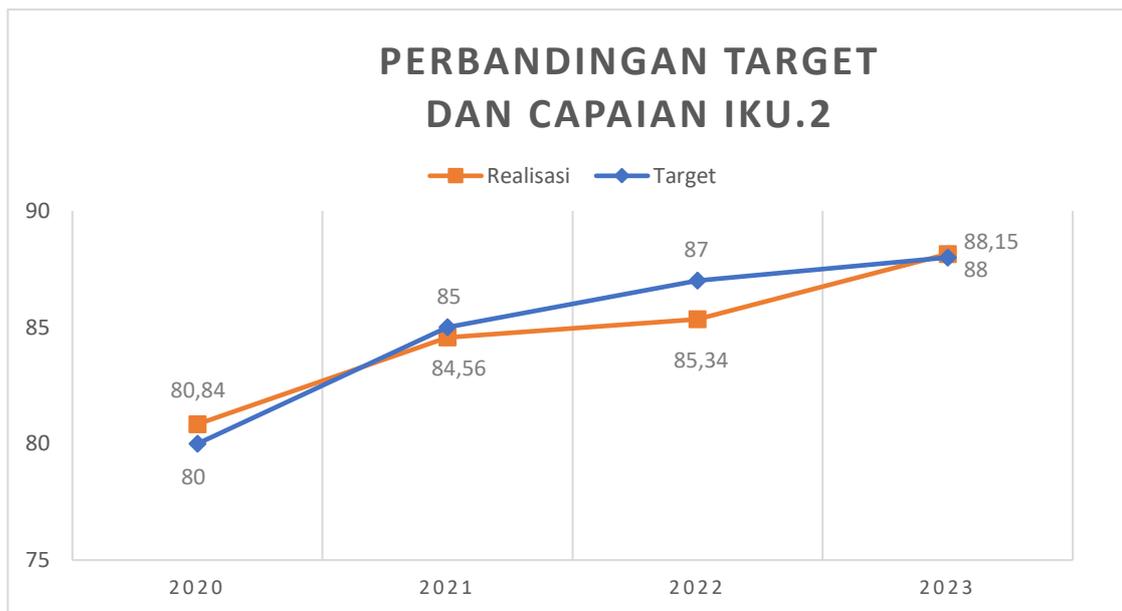
Pada tahun 2023, Direktorat INTI memiliki beberapa kegiatan pendukung, yaitu kegiatan peningkatan budaya kesadaran informasi ke seluruh pegawai (*Raising Security Awareness*) dan bimbingan layanan Dit INTI.



Gambar 6 Foto Pelaksanaan FGD Peningkatan Keamanan Informasi

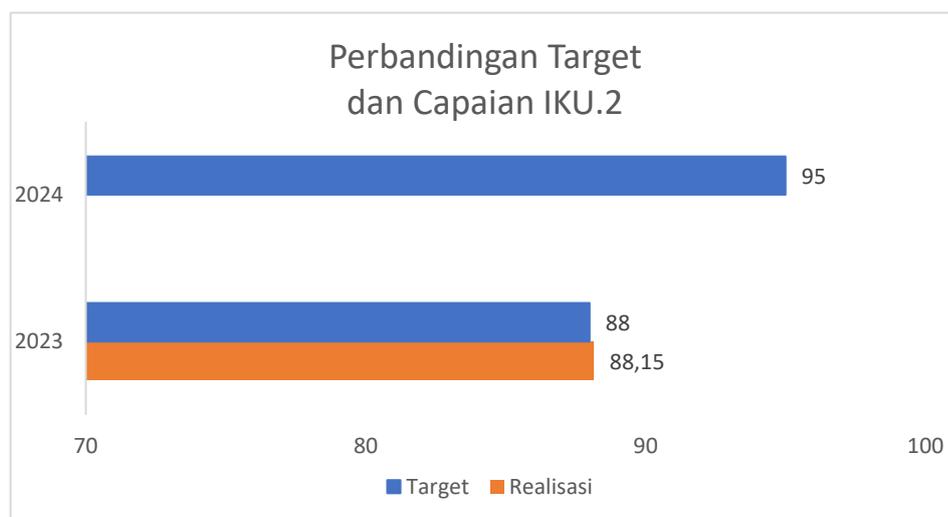


Gambar 7 Kegiatan Pembinaan Layanan Dit. INTI



Gambar 8 Perbandingan Target dan Capaian IKU.2 Tahun 2020 - 2023

Dari grafik di atas, diketahui bahwa setiap tahun, realisasi yang diperoleh Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian tidak selalu mencapai target. Namun hasil nilai dari realisasi indeks kepuasan pengguna atas layanan data dan informasi ASN termasuk dalam kategori baik sesuai dengan standar Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sesuai dengan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017. Dapat dilihat pula, realisasi dari tahun ke tahun selalu meningkat walaupun pada tahun 2021 dan 2022 belum mencapai target. Sedangkan pada tahun 2023, realisasi Deputi SINKA telah melebihi target dengan capaian 100,1%.



Gambar 9 Perbandingan Target dan Capaian IKU.2 Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2024

Sama halnya dengan IKU. 1 target renstra tahun 2024 mengenai indeks kepuasan pengguna akan layanan data dan informasi ASN memiliki selisih 7 poin dari target tahun 2023. Target tersebut bukan nilai yang mudah untuk dicapai, dari pelaksanaan tahun 2023 didapati beberapa kendala sebagai berikut:

- Instansi belum benar-benar memahami tujuan survei
 - Responden belum memahami secara optimal seluruh layanan yang diberikan
- Sehingga rencana tindak lanjut yang direkomendasikan antara lain:
- Menyusun ulang kalimat pada formulir survei agar lebih mudah dipahami oleh responden.
 - Penentuan responden sesuai dengan layanan yang telah diterima sehingga lebih tepat sasaran.

- Memberikan sosialisasi yang lebih menyeluruh terkait layanan infrastruktur teknologi informasi agar dapat dikenali dan dipahami oleh pengguna
- Peninjauan ulang SOP
- Pemantauan pengisian survei melalui PIC Data (Dit. PDPIK)
- Peningkatan pemberian layanan SIASN (Dit. PPSIASN)
- Lebih tepat waktu dalam penyelesaian pemberian layanan

SS.2. Terwujudnya Pemenuhan Regulasi Teknis Tata Kelola TIK ASN

IKU.3 Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis Tata Kelola TIK ASN

Persentase pemenuhan regulasi teknis tata kelola TIK ASN adalah tersusunnya naskah rumusan regulasi teknis tata kelola TIK ASN. Indikator ini merupakan kelanjutan pada tahun 2021, yaitu penyusunan kelanjutan draft pemenuhan regulasi teknis tata kelola TIK ASN yang sudah dilakukan *review* oleh Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama (BHHK). Pada tahun 2023 ditetapkan target nilai sebesar 100%.

Tabel 9 Perbandingan Capaian dan Target IKU.3

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi	Kinerja
Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis Tata Kelola TIK ASN	100%	98%	98%

Berdasarkan kesepakatan dengan PIC kinerja dari empat Direktorat, disepakati bahwa perhitungan kinerja IKU. 3 dilakukan setiap semester yaitu pada semester I dan semester II. Walaupun perhitungan dilakukan di tiap semester, namun progress kegiatan dilakukan dari Triwulan I atau sesuai dengan rencana aksi masing-masing Direktorat.

1. Direktorat PPSIASN telah melakukan:
 - a. Keputusan Kepala BKN Nomor 171 Tahun 2022 tentang Penerapan Tanda Tangan Elektronik di BKN telah dilakukan Internalisasi / Sosialisai pada tanggal 30 Maret 2023
 - b. Rancangan Peraturan BKN tentang Sistem Informasi ASN telah dilakukan beberapa kali Harmonisasi dengan rincian :
 - Harmonisasi ke-2 pada tanggal 04 April 2023

- Harmonisasi ke-3 pada tanggal 18 April 2023
- Finalisasi Harmonisasi Per-BKN tanggal 30 Agustus 2023
- Penyampaian Hasil Harmonisasi R-PerBKN Nomor PPE.PP.01.05-1609 tanggal 4 September
- Surat Permohonan Persetujuan Presiden atas R-PerBKN tentang SIASN Nomor 8661/B-AU.02.01/SD/K/2023 tanggal 11 September 2023 dari Plt.Kepala BKN
- Persetujuan Presiden atas R-PerBKN tentang SIASN nomor B.0469/Seskab/Polhukam/09/2023 tanggal 20 September 2023 dari Setkab
- Permohonan Pengundangan Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2023 melalui Surat Deputi PMK Nomor 8660/B-AU.02.01/SD/C/2023 tanggal 25 September 2023
- Peraturan BKN tentang SIASN telah disahkan.

2. Direktorat PDPIK melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

Kinerja untuk IKU ini telah direalisasikan sebesar 100% dari target yang ditetapkan.

- a. Kegiatan internalisasi tata kelola data series 1 pada tanggal 17 Maret 2023 dengan tema: “Implementasi Tata Kelola Data Aparatur Sipil Negara Menuju Manajemen Talenta Nasional”.
- b. Kegiatan internalisasi tata kelola data series 2 dan 3 pada tanggal 16 dan 17 Mei 2023 dengan tema: “Penyusunan Standar Data ASN, Metadata Statistik ASN dan Tabel Referensi / Data Induk ASN menuju Interoperabilitas Data ASN”.
- c. Regulasi yang telah selesai disusun dan disahkan :
 - Kepka BKN Nomor 101.4 Tahun 2023 tentang Produsen Data ASN BKN
 - Kepka BKN Nomor 101.5 Tahun 2023 tentang Walidata ASN BKN
 - Kepka BKN Nomor 6.7 Tahun 2023 tentang Arsitektur Data Bidang ASN
 - Kepka BKN Nomor 103.1 Tahun 2023 tentang Bulan Data ASN
- d. Dokumen standar data bidang ASN sebagai turunan dari regulasi yang telah disusun:
 - Metadata Buku Statistik ASN
 - Standar Data Bidang ASN
 - Katalog Data Bidang ASN
- e. Penunjukan Duta Data ASN dan produksi serta publikasi Video Satu Data ASN dan Jingle Satu Data ASN untuk mengoptimalkan proses internalisasi tata kelola data.

3. Direktorat AK yang telah dilakukan:

Capaian IKU.3 Direktorat Arsip Kepegawaian Tahun 2023 (90%) mengalami penurunan sebesar 10% dibandingkan tahun sebelumnya 2022 (100%). Hal ini dikarenakan belum disahkannya Surat Edaran BKN pada tahun ini sesuai dengan target

yang ditetapkan. Surat Edaran BKN masih berupa rancangan dalam tahap penyempurnaan dan pembahasan internal.

Kendala:

- Kurangnya pemahaman SDM dalam prosedur penyusunan peraturan dan substansi arsip kepegawaian secara nasional;
- SE mengatur ke lingkup eksternal sehingga penyusunannya lebih kompleks.

Tindak lanjut yang dilakukan:

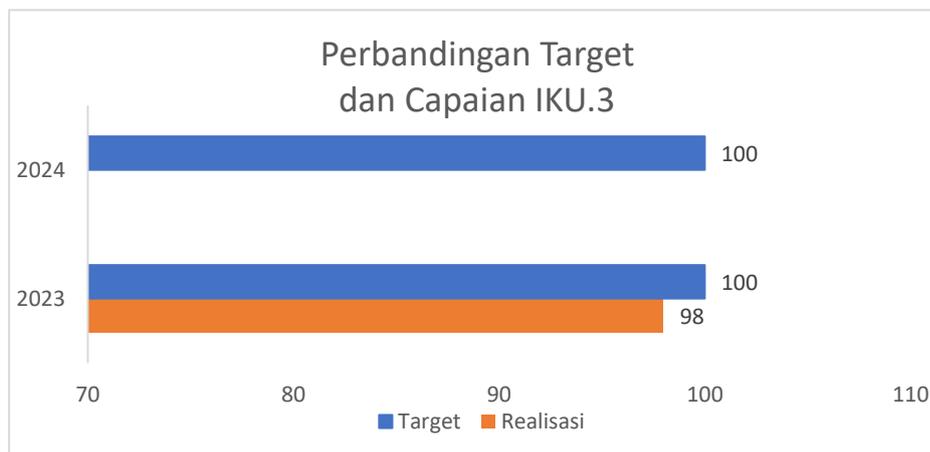
- Konsultasi dengan pakar atau akademisi yang berpengalaman dan memahami penyusunan kebijakan bidang kearsipan.
 - Konsultasi dengan instansi terkait.
4. Direktorat INTI pada triwulan IV, telah disusun draft Kepka tata kelola infrastruktur teknologi informasi dan tata kelola keamanan informasi yang baru. Untuk rencana tindak lanjut yang akan dilakukan yaitu pada tahun 2024, draft Kepka yang telah disusun akan dilakukan penyesuaian ulang dengan rekomendasi yang telah diberikan unit kerja lainnya serta peraturan nasional yang mengatur tentang infrastruktur teknologi informasi dan keamanan informasi.



Gambar 10 Perbandingan Target dan Capaian IKU.3 Tahun 2020 -2024

Persentase pemenuhan regulasi teknis tata kelola TIK ASN adalah tersusunnya naskah rumusan regulasi teknis tata kelola TIK ASN. Indikator ini merupakan kelanjutan pada tahun 2021, yaitu penyusunan kelanjutan draft pemenuhan regulasi teknis tata kelola TIK ASN yang sudah dilakukan review oleh Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama (BHHK). Pada tahun 2022 terdapat progress pada masing-masing direktorat namun masih belum mencapai target, sedangkan pada tahun 2023 seluruh direktorat di bawah Deputi

SINKA telah mencapai target kecuali Direktorat AK sehingga realisasi tahun 2023 belum mencapai target. Kendala pada yang dialami yaitu kurangnya pemahaman SDM dalam prosedur penyusunan peraturan dan substansi arsip kepegawaian secara nasional, serta SE yang dibuat mengatur ke lingkup eksternal sehingga penyusunannya lebih kompleks. Sehingga tindak lanjut yang direncanakan yaitu melakukan konsultasi dengan pakar terkait penyusunan kebijakan bidang kearsipan serta konsultasi dengan instansi terkait kearsipan.



Gambar 11 Perbandingan Target dan Capaian IKU.3 Tahun 2023 dengan Target Renstra 2024

Target pada tahun 2023 dengan tahun 2024 bernilai sama, yaitu 100%. Di mana dari target tersebut diharapkan kebijakan yang mengatur terkait sistem informasi, pengelolaan data, kearsipan, dan teknologi informasi serta keamanan informasi telah disahkan dan dapat menjadi acuan dalam operasional sehari-hari.

SS.3. Terwujudnya peningkatan kualitas data dan sistem Informasi ASN

IKU.4 Persentase Optimalisasi Kualitas Data ASN

Tabel 10 Perbandingan Capaian dan Target IKU.4

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi	Kinerja
Persentase Optimalisasi Kualitas Data ASN	97%	98,76%	101,82%



Gambar 12 Target dan capaian IKU. 4 Tahun 2020 - 2023

Dari tabel 8 diketahui bahwa realisasi telah melebihi target tahun 2023. Sedangkan dari grafik di atas, realisasi selalu melebihi target kecuali pada tahun 2021 yaitu 94,97%. Dari kendala yang dihadapi pada tahun-tahun sebelumnya sudah dilakukan tindak lanjut, sehingga pada tahun selanjutnya realisasi dapat melebihi target perjanjian kinerja tiap tahunnya.

Pada tahun 2023, optimalisasi kualitas data ASN adalah upaya pengelolaan data dalam rangka penyediaan data dan informasi kepegawaian ASN pada instansi pemerintah (K/L/D/stakeholder) yang valid dan termuktahir melalui kegiatan-kegiatan seperti:

a. Penyelesaian Disparitas Data ASN

1. Persiapan Pelaksanaan Penyelesaian dan Penarikan Data Disparitas Data ASN
 Persiapan dilakukan dengan mengidentifikasi dan menetapkan kategori penyelesaian disparitas data ASN sebagai berikut :

- PNS_TMPNS_KOSONG yaitu PNS yang sudah berstatus PNS namun TMT PNS kosong,
- TMTCPNS_LBHBESAR_TMPNS yaitu TMT CPNS lebih baru dibanding TMT PNS,
- PENDIDIKAN_KOSONG yaitu PENDIDIKAN_ID di table kosong,
- JABATAN_KOSONG yaitu jenis jabatan JFT/JFU namun jabatan JFT atau JFU yang kosong di data utama,
- CPNS_LEBIH_2TH yaitu CPNS yang belum dilantik sebagai PNS lebih dari 2 tahun,

- CLTN_SETELAH_TANGGAL_AKHIR yaitu kedudukan hukum masih CLTN setelah masa CLTN sudah berakhir belum ada pengaktifan CLTN,
- dan lain-lain.

Setelah kategori disparitas data ASN ditetapkan selanjutnya hasil analisis disparitas

data disampaikan kembali kepada instansi yang masih memiliki disparitas data sebagai bahan penyelesaian permasalahan data ASN Instansi.



Gambar 13 Rapat Penetapan Kategori Disparitas Data ASN Tahun 2023

2. Penetapan Mekanisme Penyelesaian Disparitas Data ASN

Mekanisme penyelesaian disparitas data ASN dilakukan melalui serangkaian kegiatan diantaranya penyusunan buku panduan peningkatan kualitas data yang menjelaskan tahapan dalam penyelesaian disparitas data sesuai dengan penetapan masing-masing kategori disparitas data, evaluasi kegiatan penyelesaian disparitas data ASN untuk membahas kendala yang dihadapi, penyelenggaraan coaching dengan seluruh instansi pemerintah pusat serta kunjungan ke beberapa instansi pemerintah pusat yang memiliki sisa disparitas terbanyak.



Gambar 14 Evaluasi Penyelesaian Disparitas Data ASN dengan Direktorat Pengadaan dan Kepegawaian serta Direktorat Status dan Kedudukan Pegawai

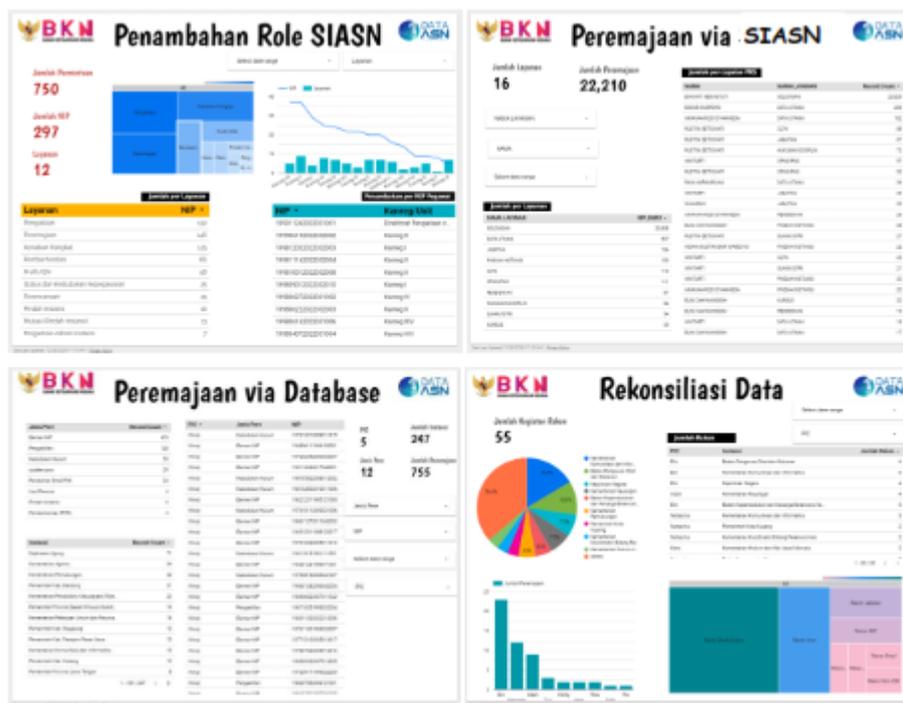
3. Persentase Capaian Penyelesaian Disparitas Data ASN

Atas upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Direktorat PDPIK, penyelesaian disparitas data tercapai sebesar 59,86% dari target tahun 2023 yang ditetapkan sebesar 50%. Atas sisa disparitas data ASN yang belum terselesaikan di tahun 2023 akan diselesaikan pada tahun anggaran 2024 dalam program Prioritas Nasional.

b. Pemutakhiran Data ASN

Sepanjang tahun 2023, Direktorat PDPIK melakukan kegiatan pemutakhiran data meliputi peremajaan data, rekonsiliasi data, pemadanan data, pengalihan data ASN serta pengelolaan helpdesk, eLapor dan PTSP. Kegiatan peremajaan dan rekonsiliasi data ASN dilakukan khusus untuk data yang menjadi kewenangan Direktorat PDPIK. Peremajaan data dilakukan melalui SIASN berdasarkan jenis peremajaan data di masing-masing riwayat dan data utama ASN serta penyelesaian permasalahan data. Hasil rekapitulasi kegiatan peremajaan dan rekonsiliasi data yang telah dilaksanakan selama tahun 2023 sebagai berikut:

- 1) Terdapat 750 permintaan penambahan role SIASN dari 12 layanan,
- 2) Terdapat 22.210 peremajaan via SIASN dari 16 layanan,
- 3) Terdapat 755 peremajaan via database dari 12 jenis peremajaan atas 247 Instansi,
- 4) Terdapat 55 kegiatan rekonsiliasi data atas 26 Instansi Pemerintah.



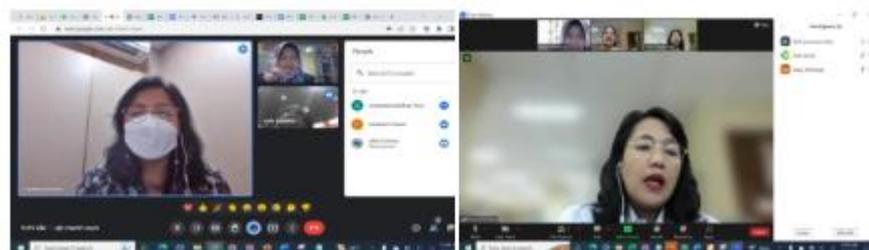
Gambar 15 Tampilan Dashboard Peremajaan Data

c. Pengelolaan Tabel Referensi

Tabel referensi memuat data yang digunakan sebagai acuan/penunjukan untuk berbagai kebutuhan perekaman maupun analisis data pada aplikasi maupun sistem informasi. Kegiatan pengelolaan data tabel referensi diukur dari jumlah wali data referensi ASN yang dianalisis dan diremajakan dengan target diambil dari jumlah instansi wali data referensi ASN. Tabel referensi dikelola sesuai dengan permintaan dari instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Dalam rangka pengelolaan tabel referensi, Direktorat PDPIK melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Diskusi pembahasan permasalahan tabel referensi

Diskusi dilaksanakan untuk mengevaluasi kekurangan pada tabel referensi saat ini. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa mayoritas permasalahan muncul saat mempersiapkan seleksi calon ASN.



Gambar 16 Rapat Identifikasi Permasalahan Tabel Referensi

2. Diskusi Panel Pembahasan Permasalahan Tabel Referensi

Diskusi panel diselenggarakan bersama dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dengan membahas

permasalahan meliputi :

- Belum tersedianya tabel referensi yang resmi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,
- Terdapat perbedaan penamaan jurusan antara yang dimiliki oleh BKN dengan yang diajukan oleh Instansi pada saat mengajukan formasi pengadaan ASN,
- Penambahan tabel referensi didasarkan pada website pddikti, sedangkan dalam proses pendaftaran PPPK menggunakan penamaan perguruan tinggi lama sehingga akan berpengaruh kepada status kelulusan pendaftar,
- Banyak aduan yang timbul pada seleksi CASN dikarenakan perbedaan nama prodi antara ijazah dan dokumen SK dikarenakan dalam seleksi CASN

nama prodi menggunakan dasar SK penetapan formasi yang dikeluarkan KemenpanRB,

- Tabel referensi terkait data fasilitas kesehatan Kementerian Kesehatan.



Gambar 17 Diskusi Panel Permasalahan Tabel Referensi dengan Kemenkes dan Kemendikbud

3. Rapat Pemetaan Unor SIASN dengan Referensi Rumah Sakit Pendidikan Direktorat PDPIK menyelenggarakan rapat dengan Kementerian Kesehatan untuk memetakan unor SIASN dengan referensi Rumah Sakit Pendidikan guna memenuhi kebutuhan Kementerian Kesehatan dalam memetakan kebutuhan dokter spesialis dan dokter pendidik klinis di level Kabupaten/Kota hingga beberapa tahun kedepan.



Gambar 18 Pembahasan Referensi Rumah Sakit Pendidikan dengan Kementerian Kesehatan

d. Sinkronisasi Database ASN

Kegiatan sinkronisasi database ASN adalah kegiatan rutin dan ad hoc dalam rangka memelihara integritas dan reliabilitas data ASN. Kegiatan diukur berdasarkan pemenuhan sinkronisasi dari analisis kebutuhan pada SIASN, kerjasama, SI instansi

yang terintegrasi sesuai kebutuhan instansi pusat dan instansi daerah. Selama tahun 2023, kegiatan sinkronisasi dilakukan secara terjadwal, meskipun saat ini layanan kepegawaian telah difasilitasi pada SIASN.

e. Kerjasama Pemanfaatan Data Kepegawaian

Kegiatan kerjasama pemanfaatan data meliputi kegiatan analisis kebutuhan integrasi data kepegawaian seperti data tabel referensi, data jabatan fungsional, data layanan pensiun, jaminan sosial dan lain sebagainya selanjutnya dilakukan Kerjasama pemanfaatan data dengan instansi/stakeholder terkait percepatan layanan kepegawaian seperti data kependudukan, data referensi pendidikan, diklat dan lain-lain. Atas kegiatan tersebut, Direktorat PDPIK melakukan pemeliharaan terhadap pengelolaan kerjasama yang masih berlaku dan permintaan terhadap perubahan/ adendum dan atau permintaan baru permohonan kerjasama pemanfaatan data. Untuk mendukung pemantauan kerjasama pemanfaatan data dengan berbagai instansi pemerintah, Direktorat PDPIK secara berkala melakukan pembaharuan data kerjasama pada dashboard kerjasama pemanfaatan data ASN sebagai berikut :

KERJASAMA PEMANFAATAN DATA 2023

Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian
Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian

Status Aktif - Yang Akan Habis Masa Berlaku

Mitra Instansi	Judul	Masa Berlaku	Tahun Proses	Tanggal Habis	Tanggal Penandatanganan	Data Feedback untuk BKN	Data Yang Diberikan ke Instansi
TASPEN DAN ASABRI	Penyediaan Data Pengalihan Kepesertaan TASPEN dengan ASABRI	5 Tahun	2018	25 Jul 2023	25 Jul 2018	-	1. PIHAK PERTAMA (TASPEN) MENEMUKAN DATA PERUBAHAN STATUS KEPEGAWAIAN MENJADI PESERTA PIHAK PERTAMA (TASPEN) DARI PIHAK KETIGA (BKN) 2. PIHAK KEDUA (ASABRI) MENEMUKAN DATA PERUBAHAN

Status Aktif - Yang Masih Berlaku

Mitra Instansi	Judul	Masa Berlaku	Tahun Proses	Tanggal Habis	Tanggal Penandatanganan	Data Feedback untuk BKN	Data Yang Diberikan ke Instansi
TASPEN	Pertukaran Pemanfaatan Data Asuransi Sipil Negara, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun	3 tahun	2022	12 Sep 2025	12 Sep 2022	1. DATA PENSUN 2. DATA PENERIMA PENSUN 3. DATA PERUBAHAN PEJABAT AKTIF 4. DATA PEJABAT NEGARA	AKSES PENCARIAN PROFIL ASN 1. DATA CPNS BERDASARKAN PARAMETER INSTANSI DAN TAHUN PENGANGKATAN CALON ASN 2. DATA PNS 3. DATA PENERIMA PENSUN PNS 4. DATA DAN/ATAU DOKUMEN PERTIMBANGAN TENSI 5. DATA DAN/ATAU DOKUMEN KEPUTUSAN PENSUN PNS 6. INFORMASI JIKA TERDAPAT PERUBAHAN DATA 7. DATA RIWAYAT KELUARGA ASN 8. DATA RIWAYAT PINDAH INSTANSI YANG PENGELOLAANNYA DIBAWAH PT. TASPEN MENJADI PT. ASABRI ATAU SEBALIKNYA
SETNEG SI GTK	Pengintegrasian Data dan/atau Informasi Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Dengan Sistem	3 Tahun	2022	7 Des 2025	7 Des 2022	1. DATA PENGHARGAAN 2. DATA TANDA JASA 3. DATA TANDA KEHORMATAN ASN	1. DATA ASN 2. DATA HUKUMAN DISIPLIN 3. DATA CLTN

Gambar 19 Tampilan Dashboard Kerjasama Pemanfaatan Data

f. Penyajian Data Statistik ASN

Kegiatan penyajian data statistik ASN merupakan kegiatan penyajian data dalam format statistik yang bersumber dari SIASN atau database lainnya yang dipublikasi secara rutin dengan periode semesteran, dalam rangka pemenuhan permintaan layanan penyajian data statistik dari instansi/stakeholder. Selama tahun 2023 telah dipublikasikan Buku Statistik periode Semester I dan Semester II 2023 dalam Portal Satu Data ASN. Selain itu, Direktorat PDPIK juga melaksanakan penyajian data statistik nasional berdasarkan permintaan baik dari unit kerja BKN maupun Instansi Pemerintah lainnya.



Gambar 20 Tampilan Dokumen Metadata Buku Statistik ASN, Standar Data Bidang ASN dan Katalog Data Bidang ASN

g. Layanan Data Seleksi

Sepanjang tahun 2023, Direktorat PDPIK melakukan kegiatan layanan data seleksi meliputi peremajaan data seleksi CASN, pemenuhan verifikasi dan validasi pengangkatan data ASN Papua, dan pemenuhan penyajian data seleksi. Proses pemenuhan peremajaan data seleksi CASN dicapai dengan tahapan persiapan pelaksanaan seleksi CASN, persiapan data dan atribut formasi dan peremajaan data dan atribut formasi. Dalam tahap persiapan data dan atribut formasi, Direktorat PDPIK melaksanakan berbagai kegiatan diantaranya :

1. Koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan terkait Penyelesaian Tenaga Non ASN
Koordinasi dilaksanakan untuk melakukan validasi atas pendataan non ASN akan dilakukan oleh BPKP dengan diperkuat oleh Kemenko Polhukam.

Penyelesaian tenaga non ASN akan mempertimbangkan aspek beban anggaran serta menghindari PHK massal.

2. Koordinasi Permasalahan Hasil Seleksi PPPK

Koordinasi lainnya adalah terkait permasalahan hasil seleksi PPPK guru Dimana banyaknya pengunduran diri dan aduan dari peserta lulus PPPK Guru dikarenakan

kurang memuaskannya lokasi penempatan yang diperoleh dari sekolah tempat bertugasnya saat ini. Atas permasalahan tersebut, akan disampaikan kebutuhan analisis terkait perencanaan perekrutan PPPK pasca selesainya non ASN kepada Direktorat Jabatan ASN dan Pusat Perencanaan Kebutuhan ASN.

3. Koordinasi Pemenuhan Formasi Calon PPPK untuk JF Guru pada Instansi Daerah tahun 2023 per Regional

Berdasarkan SE Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpanrb) nomor B/1034/SM.01.00/2023, Kemenpan RB memperpanjang pengusulan formasi PPPK 2023 disebabkan masih minimnya jumlah usulan yang masuk dibandingkan jumlah kuota PPPK 2023. Pengusulan tersebut diakomodasi melalui kegiatan Rapat Koordinasi Pemenuhan Formasi Calon PPPK untuk JF Guru pada Instansi Daerah tahun 2023 yang pelaksanaannya terbagi menjadi empat tahap sesuai dengan regional masing-masing instansi.



Gambar 21 Koordinasi Pemenuhan Formasi Calon PPPK untuk JF Guru pada Instansi Daerah tahun 2023 per Regional

4. FGD Mapping Formasi dan Inject Data Formasi Seleksi CASN TA 2023

Kegiatan FGD diselenggarakan bersama dengan KemenpanRB, Kemendikbud, Kemenkes, Direktorat PPSS dan Direktorat PPSIASN. Dalam FGD dibahas terkait pembagian rasio kuota formasi PPPK Nakes dan PPPK Teknis serta kendala-kendala dalam proses inject data formasi seleksi CASN 2023.

Sampai dengan akhir tahun 2023 seluruh proses telah dipenuhi dan selanjutnya

Direktorat PDPIK menyusun dashboard terkait verifikasi dan validasi data formasi seleksi untuk pemenuhan layanan data seleksi. Dashboard tersebut dapat digunakan oleh instansi pusat maupun daerah untuk melakukan pemantauan atas progress penyelesaian formasi baik PPPK maupun CPNS TA 2023.

h. Penyediaan *Data Analytics*

Dalam rangka penyediaan data analytics dalam portal satu data, Direktorat PDPIK melakukan kolaborasi dengan STIS (Sekolah Tinggi Ilmu Statistik) dan Universitas Bakrie untuk menetapkan tema data analytics tahun 2023. Kegiatan-kegiatan tersebut

diantaranya:

1. Rapat pembahasan kerjasama penyusunan data analytics dengan STIS

Pada Maret 2023, Direktorat PDPIK mengadakan peninjauan kerjasama dengan BPS dan STIS dengan meninjau kesepakatan pembagian topik, dimana terdapat topik yang dikerjakan langsung oleh Direktorat PDPIK dan topik yang dikerjakan bersama dengan BPS dan STIS.

2. Data Analytics Workshop: Towards One Data ASN dengan Universitas Bakrie

Pada September 2023, Direktorat PDPIK menyelenggarakan workshop data analytics dengan tema Towards One Data ASN, dalam rangka mewujudkan Satu Data ASN, serta perlu adanya tata kelola data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Peserta workshop diharapkan mampu meningkatkan

kapabilitas, skill, dan kompetensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), khususnya dalam penerapan pengelolaan data. Dalam workshop dihadirkan tim narasumber dari Universitas Bakrie, yang membahas kaidah penggunaan Business Intelligence Tools dengan menggunakan aplikasi Ms. Power BI dan dipaparkan langkah-langkah penyusunan data analytics

instrument dari mulai pemahaman konsep pivot hingga analisis dan pemecahan masalah dengan visualisasi yang tepat.

3. Diskusi panel penyusunan data analitik ASN dengan STIS

Pada November 2023, Direktorat PDPIK mengadakan diskusi panel penyusunan data analitik ASN dengan STIS yang dihadiri oleh akademisi-akademisi dari Politeknik Statistika STIS seperti Guru besar, Lektor dan Lektor Kepala. Direktorat PDPIK sebagai unit yang bertugas mengumpulkan dan memeriksa kesesuaian data serta mengelola data yang disampaikan oleh para produsen data sesuai dengan prinsip Satu Data ASN. Sehingga dari hasil diskusi panel dapat menghasilkan konsep/ produk yang secara realistis dapat dinikmati oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat di Indonesia.



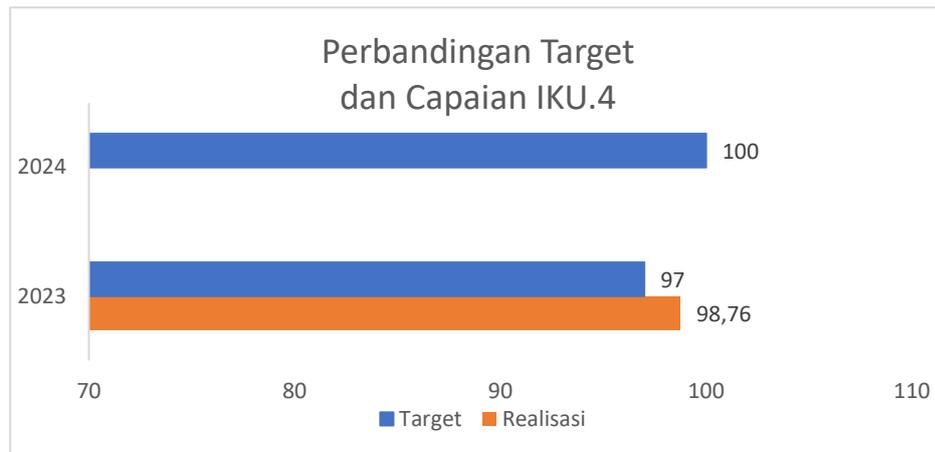
Gambar 22 Rangkaian Kegiatan Diskusi Panel Penyusunan Data Analitik ASN

4. Focus Group Discussion Penelaahan Data Analitik ASN dengan Bappenas dan Universitas Bakrie

Pada Desember 2023, Direktorat PDPIK mengadakan FGD penelaahan data analitik ASN dengan narasumber dari Bappenas dan Universitas Bakrie. Kegiatan FGD diadakan untuk menelaah, merumuskan proses dan menentukan penyusunan dashboard data analitik ASN sebagai tahapan visualisasi hasil data analitik.

i. Dukungan Pengembangan Database untuk Aplikasi

Selama tahun 2023, terdapat kebutuhan pengembangan database untuk dukungan layanan perencanaan kebutuhan ASN di SIASN.



Gambar 23 Perbandingan Target dan Capaian IKU.4 Tahun 2023 dengan Target Renstra 2024

Pada tahun 2024 target yang ditetapkan sebesar 100%. Dengan begitu terdapat selisih 1,24 poin dari realisasi tahun 2023. Untuk mencapai target tersebut, maka rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada tahun 2024 yaitu penyelesaian sisa disparitas data 2023 dan penyusunan instrumen kualitas data ASN

IKU.5 Persentase Pembangunan dan Pengembangan SIASN

Indikator ini mengukur pembangunan, pengembangan, dan atau pemeliharaan subsistem SIASN serta pembangunan, pengembangan, dan atau pemeliharaan aplikasi yang terhubung dengan SIASN sehingga mewujudkan proses Manajemen Kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, efektif, efisien dan terintegrasi. SIASN diharapkan mampu memenuhi seluruh kebutuhan proses bisnis manajemen kepegawaian serta mengintegrasikan datanya dengan sistem lain yang terkait. Hal ini sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Negara sebagai penyelenggara Manajemen ASN Nasional seperti tertuang dalam Undang-Undang ASN tentang Aparatur Sipil Negara pada bagian keempat pasal 47 yang menyatakan bahwa salah satu fungsi Badan Kepegawaian Negara adalah “pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen ASN”.

Selanjutnya, sesuai dengan pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyatakan bahwa “Badan Kepegawaian Negara diberi kewenangan untuk melakukan pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN secara nasional yang terdiri dari penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua serta perlindungan”.

Tabel 11 Perbandingan Capaian dan Target IKU.5

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi	Kinerja
Persentase Pembangunan dan Pengembangan SIASN	100%	91,94%	91,94%

Berdasarkan tabel 9 terlihat bahwa target indikator kinerja yang keempat belum dapat secara penuh direalisasikan dan memperoleh capaian kinerja sebesar 91,94%. Capaian tersebut didapat dari perhitungan jumlah realisasi pembangunan, pengembangan, dan atau pemeliharaan subsistem SIASN ditambah jumlah realisasi pembangunan, pengembangan, dan atau pemeliharaan aplikasi yang terhubung dengan SIASN dibandingkan dengan jumlah rencana pembangunan, pengembangan, dan atau pemeliharaan subsistem SIASN ditambah jumlah rencana pembangunan, pengembangan, dan atau pemeliharaan aplikasi yang terhubung dengan SIASN. Berikut adalah penjelasan detail dari realisasi yang didapatkan, yaitu:

- a. Pengembangan dan atau pemeliharaan subsistem SIASN direncanakan sebanyak 15 (lima belas) layanan modul yang terdiri dari :
 - Layanan Perencanaan Kebutuhan merupakan subsistem layanan yang terintegrasi dengan SIASN mencakup kegiatan proses perencanaan kebutuhan Pegawai ASN. adalah layanan yang mencakup kegiatan proses perencanaan kebutuhan pegawai ASN; realisasi 66.76%
 - Layanan Status dan Kedudukan Kepegawaian adalah layanan yang mencakup Layanan Penetapan Nama dan NIP, Layanan Rekomendasi Penetapan Tewas dan Cacat karena Dinas, Layanan CLTN, dan Layanan Penetapan Pertimbangan Status Kepegawaian; realisasi 100%

- Layanan Manajemen Jabatan Fungsional merupakan subsistem layanan yang terintegrasi dengan SIASN mencakup kegiatan pembinaan jabatan fungsional ASN realisasi 66.76%
- Layanan Manajemen webservice merupakan layanan pengelolaan integrasi melalui web service yang disediakan oleh Badan Kepegawaian Negara; realisasi 100%
- Layanan Admin SIASN merupakan subsistem layanan yang terintegrasi dengan SIASN mencakup kegiatan admin dan sistem pendukung layanan pada SIASN realisasi 50%
- Layanan Peremajaan Data merupakan subsistem layanan yang terintegrasi dengan SIASN mencakup kegiatan proses pemutakhiran data profil Pegawai ASN dan jabatan pimpinan tinggi yang berasal dari kalangan nonpNS. realisasi 100%
- Layanan Dashboard merupakan merupakan subsistem layanan yang terintegrasi dengan SIASN untuk menampilkan data dan statistik dari Layanan SIASN yang telah dilakukan oleh Instansi Pemerintah. realisasi 100%
- Layanan IDIS merupakan merupakan subsistem layanan yang terintegrasi dengan SIASN mencakup kegiatan monitoring penegakan disiplin ASN secara nasional yang dapat diakses melalui laman <https://idis.bkn.go.id/> bertujuan untuk memudahkan PPK pada Instansi Pemerintah dalam mendokumentasikan, menetapkan, dan menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Realisasi 100%
- Layanan BPASN merupakan subsistem layanan yang terintegrasi dengan SIASN mencakup dukungan teknis dan administratif kepada ASN; realisasi 33.33%
- Layanan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi merupakan subsistem layanan yang terintegrasi dengan SIASN mencakup kegiatan dalam memenuhi kebutuhan pengisian jabatan pimpinan tinggi. Dan Layanan Seleksi Lowongan Pindah Instansi merupakan subsistem layanan yang terintegrasi dengan SIASN mencakup kegiatan dalam memenuhi kebutuhan pengelolaan lowongan perpindahan ASN bagi yang bekerja pada Instansi Pemerintah; realisasi 50%
- Layanan Pemberhentian merupakan subsistem layanan yang terintegrasi dengan SIASN mencakup kegiatan pengelolaan proses usulan pemberhentian dengan hak pensiun untuk PNS dan Janda Duda PNS, Janda Duda Pensiunan, Pensiun Pejabat Negara Tertentu, Janda Duda Pensiun Pejabat Negara untuk mendapatkan pertimbangan teknis dan surat keputusan serta pemberhentian PPPK; realisasi 100%

- Layanan Penetapan NIP merupakan subsistem layanan yang terintegrasi dengan SIASN mencakup kegiatan proses penetapan elemen NIP calon PNS dan penetapan nomor induk PPPK untuk mendapat persetujuan teknis penetapan elemen NIP dan persetujuan teknis penetapan nomor induk PPPK sebagai dasar atau syarat pengangkatan Pegawai ASN. realisasi 100%
 - Layanan Pindah Instansi merupakan subsistem layanan yang terintegrasi dengan SIASN mencakup kegiatan proses verifikasi validasi pindah instansi, pengalihan dan penugasan PNS sampai dengan penetapan persetujuan teknis dari Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN serta penetapan surat keputusan pindah instansi PNS realisasi 100%
 - Layanan Kenaikan Pangkat merupakan merupakan subsistem layanan yang terintegrasi dengan SIASN mencakup kegiatan proses verifikasi dan validasi sampai dengan penetapan persetujuan/pertimbangan teknis dari Kepala BKN dan penetapan surat keputusan kenaikan pangkat atas penghargaan yang diberikan berdasarkan prestasi kerja dan pengabdian PNS; realisasi 100%
 - Layanan Kenaikan Jabatan merupakan layanan usulan terkait jabatan fungsional jenjang utama, dapat berupa kenaikan dalam jabatan, pemberhentian dalam jabatan, pengangkatan kembali dalam jabatan dan perpindahan dalam jabatan; realisasi 100% Realisasi keseluruhan 15 layanan ini sebesar:

$$(66.67\%+100\%+66.67\%+100\%+50\%+100\%+100\%+100\%+33.33\%+50\%+100\%+100\%+100\%+100\%+100\%)/15 = 84.44\%$$
- b. Pengembangan SIASN Layanan Talent Pool. realisasi 100% Sehingga, realisasi pengembangan dan atau pemeliharaan subsistem SIASN adalah $(84.44\%+100\%)/2 = 92.22\%$
- c. Pengembangan dan atau Pemeliharaan aplikasi yang terhubung dengan SIASN:
1. Pengembangan Aplikasi Simpegnas merupakan layanan aplikasi manajemen kepegawaian secara terstandar yang akan digunakan secara nasional
 2. Pengembangan dan atau Pemeliharaan My SAPK Android
 3. Pengembangan dan atau Pemeliharaan My SAPK Web
 4. Pengembangan dan atau Pemeliharaan My SAPK IOS

Berdasarkan capaian pada aplikasi yang terhubung dengan SIASN, Pengembangan dan atau pemeliharaan My SAPK Android, My SAPK Web, dan My SAPK IOS masing-masing mencapai 100%. Sedangkan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Nasional (SIMPEGNAS) mencapai 66.67% karena ada beberapa Layanan yang dikembangkan masih dalam progress. Sehingga capaian untuk aplikasi yang terhubung dengan SIASN menjadi $(100\%+100\%+100\%+66.67\%)/4 = 91.67\%$ Sehingga perhitungan pada poin A1 dan A2 ditambah poin B lalu dibagi 2 dapat disimpulkan bahwa Presentase Pembangunan dan Pengembangan SI ASN adalah $[(92.22\% + 91.67\%)/2] \times 100\% = 91.94\%$. Adapun dokumen pendukung perhitungan indikator kinerja utama ini dapat dilihat pada link <https://bit.ly/LKJ2023PPSIASN>.



Gambar 24 Perbandingan Target dan Capaian IKU.5 Tahun 2020 - 2023

Target dari tahun 2020 hingga 2023 sebesar 100%, namun realisasi yang didapatkan belum mencapai target yang diharapkan. Pada tahun 2023 kendala yang dihadapi dalam pemenuhan target pembangunan dan pengembangan SIASN diantaranya:

1. Keterbatasan SDM dalam mengembangkan sistem. Pranata Komputer yang tersedia juga mengerjakan tugas adhoc seperti SSCASN, Pendataan Non ASN, PPPK, dll
2. Perubahan kebijakan dan penambahan probis pengembangan sistem



Gambar 25 Perbandingan Target dan Capaian IKU.5 Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2024

Pada tahun 2024 ditetapkan target capaian sebesar 100% sehingga selisih dari realisasi tahun 2023 sebesar 8,06 poin. Untuk mencapai target tersebut, maka direncanakan tindak lanjut untuk menyelesaikan kendala dan meningkatkan kinerja sebagai berikut:

1. Melakukan sprint meeting harian dengan Tim untuk pembahasan review progres dan fungsionalitas aplikasi
2. Menghiring Tenaga Ahli untuk melakukan percepatan pengembangan sistem
3. Melakukan Peningkatan kolaborasi SDM Prakom/programmer pada BKN Pusat dan Kantor Regional BKN

IKU.6 Persentase Integrasi Sistem Informasi ASN

Indikator ini menggambarkan integrasi sistem informasi kepegawaian instansi pemerintah dengan SIASN yang dilakukan melalui tools web service ataupun melalui pemanfaatan aplikasi simpegnas (Sistem Informasi Kepegawaian Nasional) dalam rangka mewujudkan keterhubungan data ASN antara instansi pemerintah dan BKN. Pada IKU ini menghitung persentase terlaksananya integrasi sistem informasi ASN yaitu dari layanan SIASN dan SIMPEGNAS. Tahun 2023 telah ditetapkan target capaian sebesar 100%. Berikut merupakan tabel perbandingan target dan capaian yang telah dihitung sampai dengan Semester II.

Tabel 12 Perbandingan Capaian dan Target IKU.6

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi	Kinerja
Persentase Integrasi Sistem Informasi ASN	100%	100%	100%

Sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 48 huruf (d), Badan Kepegawaian Negara (BKN) bertugas untuk mengelola dan mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN berbasis kompetensi didukung oleh sistem informasi kearsipan yang komprehensif. Dalam rangka menjalankan amanat tersebut serta dengan mempertimbangkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 untuk mewujudkan satu data ASN, dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, BKN berupaya membangun Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara Terintegrasi yang disebut Sistem Informasi ASN (SIASN) yang salah satu tujuannya untuk mewujudkan integrasi antara BKN dengan instansi pemerintah melalui penataan data dan integrasi sistem informasi kepegawaian. Pembangunan dan pengembangan SIASN diikuti dengan pembangunan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Nasional (SIMPEGNAS). Sistem Informasi Kepegawaian Nasional adalah aplikasi pengelolaan data ASN berbagi pakai untuk seluruh Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah. Aplikasi ini dibangun dengan tujuan menghubungkan langsung pengelolaan data kepegawaian setiap instansi dengan database SIASN yang dikelola oleh BKN. SIMPEGNAS merupakan sebuah solusi bagi setiap instansi yang belum memiliki SIMPEG sehingga dapat terintegrasi dengan database nasional yang dikelola oleh BKN melalui SIASN. Data yang dikelola di dalam Simpegnas mencakup Data Perencanaan pegawai; Pengadaan pegawai; Pengembangan pegawai; Data Kenaikan Pangkat/Pensiun, Mutasi, Status dan Kedudukan, Pemberhentian Pegawai, sampai dengan Peremajaan Data Pegawai. Tidak hanya itu, data kepegawaian pada SIMPEGNAS yang terintegrasi dengan SIASN akan menyediakan pula modul sistem manajemen kinerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS sehingga terbentuk profil kinerja PNS secara nasional, yang memuat integrasi rencana dan penilaian kinerja, riwayat kompetensi, dan integrasi data hasil penilaian kinerja. SIMPEGNAS juga akan dilengkapi dengan sistem presensi ASN nasional berbasis lokasi dan face recognition.

1. Integrasi melalui Webservice

Integrasi merupakan proses menggabungkan dua atau lebih data dari sumber database yang berbeda ke dalam suatu penyimpanan seperti data warehouse. Mekanisme integrasi menggunakan webservice, prosesnya adalah sistem berkomunikasi langsung dengan sistem lain melalui webservice yang sudah disediakan oleh BKN. Webservice adalah sebuah aplikasi lintas platform yang dapat diakses melalui sebuah jaringan dimana dalam aplikasi tersebut terdapat fungsi-fungsi yang digunakan untuk interaksi antara aplikasi satu dengan aplikasi yang lainnya. Untuk keamanan, BKN menggunakan oauth versi 2 dan protocol authentication menggunakan basic auth. Instansi sebagai pengguna web service harus meminta token terlebih dahulu sebelum dapat mengakses datanya. Berikut adalah gambar proses integrasi dimana data SAPK BKN dapat diperbarui sesuai kewenangan yang ada di instansi. Pengintegrasian antara SIMPEG dan SIASN dilakukan dengan memanfaatkan sebuah aplikasi web service melalui Application Programming Interface (API Manager). Proses integrasi antara SIASN dan SIMPEG Instansi melalui web service dilaksanakan dengan tahapan berikut ini:

- a. Mengirimkan surat permintaan untuk integrasi kepada BKN yang memuat informasi berupa usulan pegawai untuk menjadi admin dan memberikan IP public.
- b. Pemberian IP Public MySAPK/SIASN oleh BKN kepada Instansi sebagai tahapan membuka akses admin SIASN untuk simpeg Instansi.
- c. Pengoperasian API Manager

- Akses API Manager

Pertama, Instansi dapat membuka tautan <https://apimws.bkn.go.id/devportal> untuk dapat mengakses Aplikasi API Manager, lebih tepatnya akses manajemen web service production. Ketika tautan telah terbuka, admin dapat masuk (login) menggunakan NIP dan password MySAPK ke dalam Aplikasi API Manager. Sebelumnya BKN telah membuka akses NIP admin yang dicantumkan oleh instansi di dalam surat permintaan, untuk dapat mengakses API Manager.

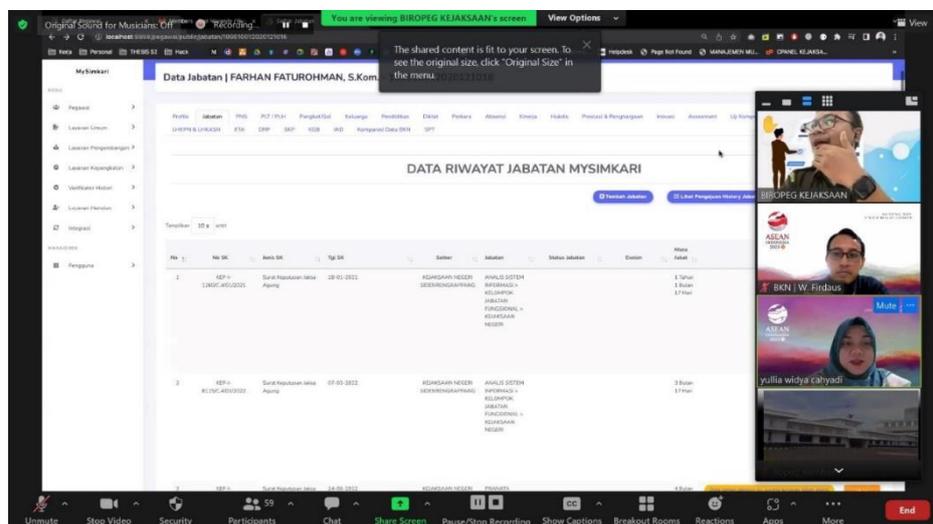
- Mendaftarkan Aplikasi

Proses selanjutnya yaitu mendaftar berbagai aplikasi yang digunakan oleh instansi ke dalam API Manager.

- Mendapatkan Production/ Sandbox key
Sebelum melakukan akses ke API BKN, admin simpeg instansi perlu memasukkan token pada bagian production key. Token telah diberikan kepada admin sebagai balasan atas surat permintaan instansi sebelumnya.
- Melakukan Subscription
Subscription merupakan proses permintaan akses web service yang diinginkan untuk terintegrasi, dalam hal ini SIASN. Permintaan subscribe akan masuk ke daftar permintaan akses yang dikelola oleh admin BKN. Apabila permintaan telah disetujui oleh admin BKN, maka status permintaan akan berubah dari ON_HOLD menjadi UNBLOCKED.
- Mencoba API
Setelah subscription disetujui, dapat dilanjutkan dengan melakukan uji coba API Manager pada menu APIs di dalam aplikasi. Tahapan ini merupakan uji coba keberhasilan proses penarikan informasi yang terdapat di dalam SIASN oleh Simpeg instansi maupun sebaliknya melalui beberapa percobaan teknis.

Berikut adalah beberapa program atau kegiatan yang telah dilakukan untuk menunjang integrasi melalui webservice, yaitu :

1. Melakukan IT Security Assesment API Webservice WSO2 ulang oleh Badan Siber dan Sandi Negara setelah dilakukan patching atau perbaikan berupa penambahan beberapa pengaturan atau konfigurasi keamanan juga perbaikan versi terbaru agar tidak terjadi kendala pada implementasinya.
2. Mengadakan Review Web Service untuk instansi pusat yang dilakukan secara daring.



Gambar 26 kegiatan review web service untuk instansi pusat

3. Mengadakan Review Web Service untuk instansi daerah yang dilakukan secara daring.

Kendala yang dihadapi selama tahun 2023 dalam implementasi aplikasi Simpegnas ialah beberapa hal teknis terkait pengembangan aplikasi dan beberapa request fitur tertentu pada aplikasi. Sehingga untuk menunjang peningkatan realisasi integrasi melalui SIMPEGNAS dilakukan beberapa kegiatan berikut:

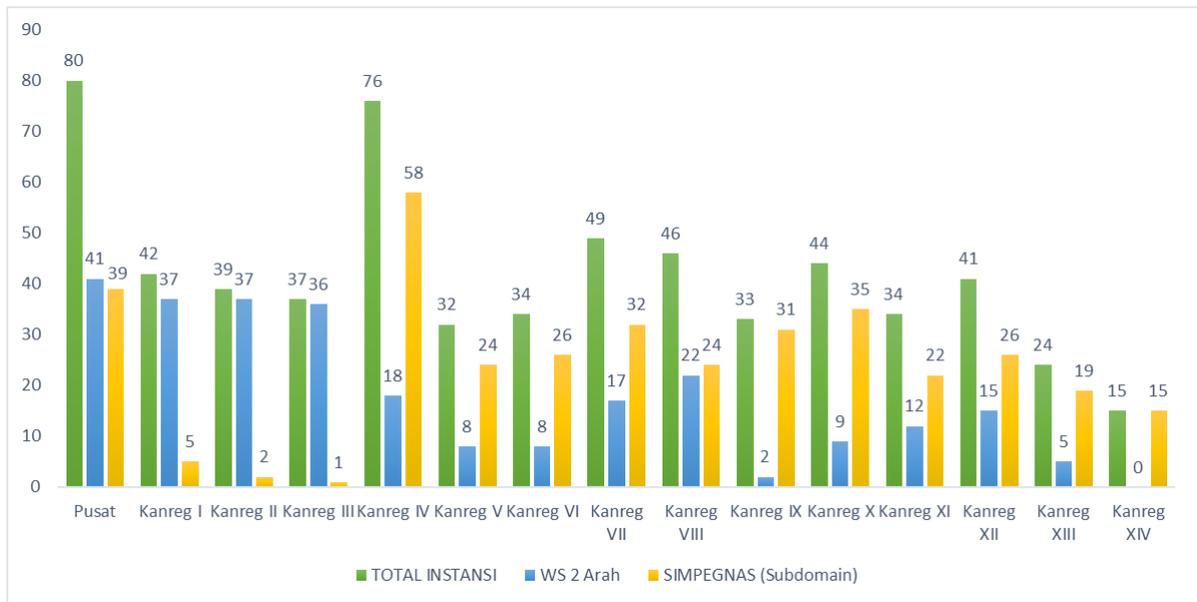
1. Melakukan Bimbingan Teknis untuk Instansi Pusat dan Instansi Daerah
2. Melakukan Evaluasi atas Implementasi SIMPEGNAS

Realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2023 sebesar 100%, dengan rincian 359 instansi telah memiliki domain SIMPEGNAS dan 267 instansi sudah melakukan integrasi SIMPEG nya dengan SIASN melalui Web Service secara 2 (dua) arah. Sehingga didapatkan peningkatan jumlah instansi yang sudah terintegrasi menjadi 626 instansi atau sama dengan 100% dengan data sebagai berikut:

Tabel 13 Rekapitulasi Data Integrasi Instansi Tahun 2023

	KANREG	SIMPEGNAS	WEB SERVICE	TOTAL INSTANSI TERINTEGRASI
1	BKN PUSAT	39	41	80
2	KANREG I	5	37	42
3	KANREG II	2	37	39
4	KANREG III	1	36	37
5	KANREG IV	58	18	76
6	KANREG V	24	8	32
7	KANREG VI	26	8	34
8	KANREG VII	32	17	49
9	KANREG VIII	24	22	46
10	KANREG IX	31	2	33
11	KANREG X	35	9	44
12	KANREG XI	22	12	34
13	KANREG XII	26	15	41
14	KANREG XIII	19	5	24
15	KANREG XIV	15	0	15
	TOTAL	267	359	626

Breakdown capaian integrasi Instansi selama tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut:

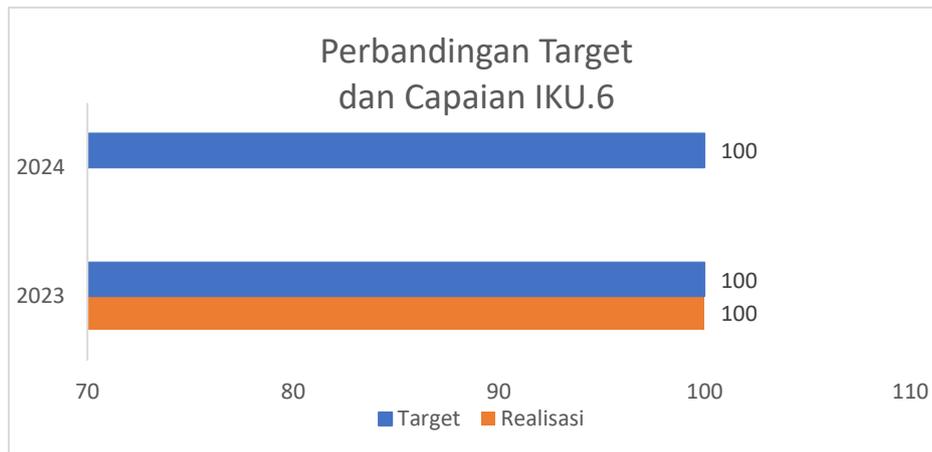


Gambar 27 Data Integrasi Wilayah Kerja Tahun 2023



Gambar 28 Perbandingan Target dan Capaian IKU.6 Tahun 2020 - 2023

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya, indikator ini mengalami peningkatan sebesar 35,78%. Pengukuran pada tahun 2020 hingga 2021 berbeda dengan tahun 2022. Pada tahun 2020 dan 2021, integrasi difokuskan pada instansi yang memiliki simpeg dengan kategori maturitas level 3 dan level 4. Sedangkan pada tahun 2022 dan 2023, BKN memperluas jangkauan target integrasi untuk seluruh instansi pemerintah, yaitu sejumlah 626 instansi.



Gambar 29 Perbandingan Target dan Capaian IKU.6 Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2024

Pada tahun 2024, Direktorat PPSIASN merencanakan peningkatan kualitas integrasi dengan meninjau integrasi SIASN melalui web service secara dua arah dan melalui simpegnas untuk riwayat jabatan.

IKU.7 Persentase Digitalisasi Arsip Kepegawaian

Digitalisasi arsip kepegawaian adalah seluruh rangkaian kegiatan mulai dari penciptaan, penggunaan, pengelolaan, penyimpanan, pemeliharaan, penyusutan dan pemanfaatan arsip kepegawaian. Tujuan Digitalisasi arsip kepegawaian adalah untuk memenuhi tuntutan peningkatan layanan BKN kepada ASN khususnya dalam memudahkan pencarian kembali dan akses terhadap dokumen arsip kepegawaian ASN berbasis teknologi sesuai dengan kewenangannya dan terjamin keabsahan, keaslian serta keamanannya.

Tabel 14 Perbandingan Capaian dan Target IKU.7

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi	Kinerja
Persentase Integrasi Sistem Informasi ASN	93%	95,63%	102,83%

Kegiatan digitalisasi arsip kepegawaian terdiri dari alih media dokumen kepegawaian (Pra Scan, scan, verifikasi dan validasi) dan pengelolaan dan pemeliharaan arsip kepegawaian fisik (reposisi tata naskah, perlabelan dan penggantian sampul rusak, retensi tata naskah dan penginputan serta penempelan RFID). Selain kegiatan tersebut, pada tahun 2023 Direktorat Arsip Kepegawaian melaksanakan kegiatan untuk mendukung percepatan digitalisasi arsip kepegawaian dengan melakukan kegiatan penyalinan dokumen kepegawaian dari DMS versi lama dan PDM baik instanai pusat maupun daerah untuk digabungkan dalam *database* pada aplikasi DMS versi 2. Kemudian Direktorat Arsip Kepegawaian juga melaksanakan *Focus Group Discussion* terkait percepatan penyalinan dokumen kepegawaian dengan mengundang perwakilan dari setiap Kantor Regional BKN. Hal tersebut dilakukan karena masih kurang dan lambatnya respons dari setiap instansi daerah yang dalam hal ini dilaporkan oleh setiap Kantor Regional kepada Direktorat Arsip Kepegawaian karena kendala yang ditemui di lapangan baik itu dari sisi aplikasi untuk mendigitalisasi arsip kepegawaian yang mereka miliki ataupun sarana pendukung yang ada. Realisasi Digitalisasi Arsip Kepegawaian tahun 2023 sebesar 95,63% (3.215.439 dokumen) hasil akumulasi realisasi dari tahun 2020 melebihi target tahun 2023 sebesar 93% dikarenakan adanya penambahan jumlah SDM melalui perbantuan siswa magang, hal ini menjadi perhatian bagi Direktorat Arsip Kepegawaian untuk mengajukan permohonan penambahan SDM ke Biro SDM dan peningkatan sarana prasarana yang tersedia seperti pengadaan *scanner* dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung kualitas kinerja. Realisasi kinerja Direktorat Arsip Kepegawaian tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 274.659 dokumen (8,17%) melampaui target yang telah ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 93% sehingga Direktorat Arsip Kepegawaian optimis terpenuhinya target yang telah ditetapkan dalam renstra 2024 sebesar 100% dengan selisih sebesar 4,37% dari realisasi

tahun ini. Peningkatan kinerja terus dilakukan disertai dengan perbaikan dan evaluasi kinerja guna mendukung tercapainya target.



Gambar 30 Perbandingan Target dan Capaian IKU.7 Tahun 2020 - 2023

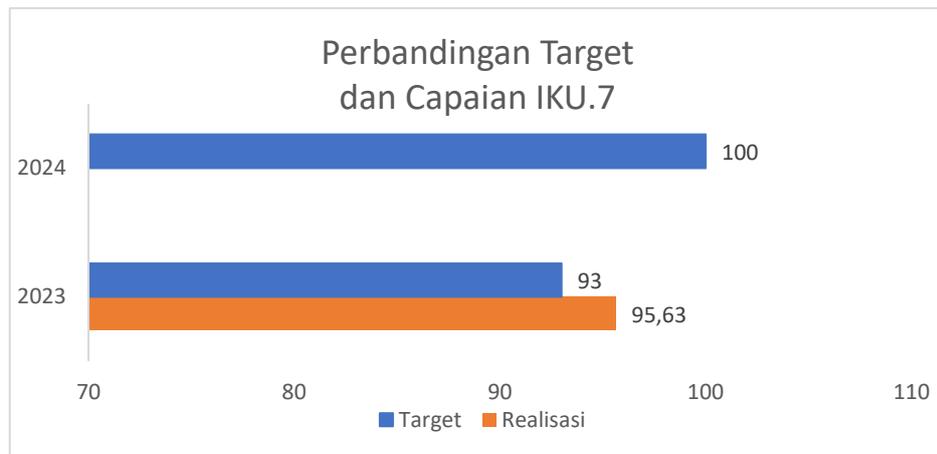
Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2022, realisasi kinerja Direktorat Arsip Kepegawaian tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 274.659 dokumen (8,17%) melampaui target yang telah ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 93% sehingga Direktorat Arsip Kepegawaian optimis terpenuhinya target yang telah ditetapkan dalam renstra 2024 sebesar 100% dengan selisih sebesar 4,37% dari realisasi tahun ini. Peningkatan kinerja terus dilakukan disertai dengan perbaikan dan evaluasi kinerja guna mendukung tercapainya target. Kendala yang ditemui selama pelaksanaan kegiatan tahun 2023:

- Keterbatasan jumlah SDM
- Kebutuhan sarana dan prasarana seperti scanner dan infrastruktur yang mendukung kegiatan alih media dan penyalinan dokumen kepegawaian

Tindak lanjut yang dilakukan diantaranya:

- Penyusunan Anjab ABK untuk menganalisis kebutuhan pegawai, penetapan kompetensi dan syarat dari suatu jabatan, serta sebagai indikator kinerja pegawai
- Koordinasi dengan unit terkait dalam rangka meningkatkan sarana dan prasarana

Dari tindak lanjut tersebut, maka diharapkan dapat mencapai target renstra tahun 2024 yang hanya selisih 4,37 poin dari realisasi tahun 2023 yang ditunjukkan pada diagram di bawah ini.



Gambar 31 Perbandingan Target dan Capaian IKU.7 Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2024

IKU.8 Persentase Ketersediaan Infrastruktur TI

Pemenuhan kebutuhan infrastruktur teknologi informasi melalui layanan Direktorat INTI yang terdiri dari layanan pusat komputasi, layanan informasi dan komunikasi (layanan email, kolaborasi drive, konferensi video), layanan keamanan TI.

Tabel 15 Perbandingan Capaian dan Target IKU.8

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi	Kinerja
Persentase Ketersediaan Infrastruktur TI	99%	99,99%	101%

Pada tahun 2023, capaian kinerja IKU 3 dihitung dari 5 layanan besar yaitu :

1. Layanan Pusat Komputasi (L1)
2. Layanan Informasi dan Komunikasi (L2)
3. Layanan Keamanan TI (L3)

• **Layanan Pusat Komputasi (L1)**

Layanan Pusat Komputasi adalah layanan yang menyediakan sumberdaya data center untuk dipergunakan oleh unit kerja agar dapat menempatkan aplikasi atau sistem informasi di internet. Formulasi untuk perhitungan layanan ini adalah sebagai berikut :

$$L1 = ((X1/Y1 \times 100\%) + Z1) / 2$$

Keterangan :

L1 = Capaian Layanan Pusat Komputasi

X1 = Jumlah Permintaan layanan pusat komputasi yang terpenuhi

Y1 = Jumlah Permintaan layanan pusat komputasi

Z1 = Persentase durasi sistem di data center BKN dapat diakses (waktu toleransi *downtime* / sistem tidak dapat diakses adalah 5% atau 18 jam selama setahun)

Berikut ringkasan capaian layanan pusat komputasi pada tahun 2023 :

Tabel 16 Capaian Layanan Pusat Komputasi Tahun 2023

Layanan	Jumlah Permintaan	Jumlah yang Diberikan	Capaian
Sumber daya server dan storage	83	83	100%
Peubahan Spesifikasi sumber daya server dan <i>storage</i>	46	46	100%
Subdomain (bkn.go.id) dan (simpegnas.go.id)	361	361	100%

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa capaian layanan pusat komputasi adalah 100%. Namun, selain 3 layanan di atas, pada tahun 2023 Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi juga memenuhi permintaan perangkat lunak pendukung pusat komputasi diantaranya untuk sistem operasi dari virtual server yang berlisensi seperti Windows Server dan perangkat lunak untuk visualisasi data seperti Tableau.

Sepanjang tahun 2023, terdapat 3 kejadian yang menyebabkan pusat data BKN tidak dapat diakses. Kejadian pertama terjadi pada tanggal 14 Januari 2023, terjadi insiden kerusakan pada sekering *Precision Air Conditioning* (PAC) Data Center BKN yang mengakibatkan PAC mati dan berdampak pada meningkatnya suhu pada Data Center BKN serta sistem Data Center mengalami kendala akses

selama kurang lebih 8 jam (14.03 WIB - 22.00 WIB). Kejadian kedua yaitu pada tanggal 5 Agustus 2023 PAC Utama (Midea) Data Center tidak berfungsi atau mati yang disebabkan oleh permasalahan pada outdoor PAC. Hal ini mengakibatkan beberapa server mengalami overheating yang berdampak pada beberapa aplikasi tidak dapat diakses (*downtime* kurang lebih 1 jam). Penanganan insiden dengan mengaktifkan PAC Backup (Climaveneta) Data Center dan memperbaiki outdoor PAC. Kejadian terakhir pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 pukul 10.05 WIB, terjadi insiden terputusnya akses koneksi internet Kantor Pusat BKN dan akses dari publik ke Data Center BKN. Hal ini disebabkan adanya kendala pada *backup domestic link* Data Center BKN yang berpengaruh pada *main domestic link* Data Center BKN. Tindakan perbaikan kendala dilakukan oleh penyedia layanan *domestic link* Data Center (PT. Telkom Indonesia). Pada pukul 10.18 WIB akses internet maupun akses dari publik ke Data Center BKN sudah kembali normal (*downtime* kurang lebih 13 menit).

Dari hasil perhitungan kejadian di atas, pada tahun 2023 durasi sistem pada pusat data BKN dapat diakses selama 525.047 menit dari yang seharusnya 525.600 menit atau sebesar 99,89%. Maka, dari kedua data yang telah dijelaskan sebelumnya, capaian layanan komputasi pada tahun 2023 sebagai berikut :

$$\begin{aligned} L1 &= ((X1/Y1 \times 100\%) + Z1) / 2 \\ &= ((490/490 \times 100\%) + 99,89\%) / 2 \\ &= (100\% + 99,89\%) / 2 \\ &= \mathbf{99,94\%} \end{aligned}$$

- **Layanan Informasi dan Komunikasi (L2)**

Layanan Informasi dan Komunikasi merupakan layanan yang menyediakan data, suara dan konektivitas video kepada pegawai maupun unit kerja BKN. Layanan ini terdiri 6 sub layanan yaitu :

1. Layanan Email (Z2)

Layanan email merupakan sarana komunikasi resmi seluruh pegawai BKN. Capaian layanan email dihitung dari permintaan pembuatan email baru serta penambahan kapasitas email. Berikut ringkasan capaian layanan email pada tahun 2023 :

Tabel 17 Capaian Layanan Email Tahun 2023

Layanan	Jumlah Permintaan	Jumlah yang Diberikan	Capaian
Pembuatan Email Baru	68	68	100%
Penambahan Kapasitas Email	4	4	100%
Permohonan Reset Password Email	94	94	100%

Berdasarkan data tabel di atas, menunjukkan bahwa capaian layanan email pada tahun 2023 adalah sebesar 100%.

2. Layanan Kolaborasi Drive (Z3)

Layanan Kolaborasi Drive adalah layanan berbagi pakai berupa tempat penyimpanan virtual untuk foto, video, dokumen dan file kedinasan lain serta terdapat fasilitas edit *office*. Setiap pegawai yang memiliki email resmi BKN mendapat fasilitas layanan kolaborasi drive sebesar 15 Gb dan dapat mengajukan penambahan kapasitas jika dianggap masih ke kurang ke Direktorat INTI. Capaian layanan kolaborasi drive dihitung dari permintaan penambahan kapasitas kolaborasi drive Berikut ringkasan capaian layanan kolaborasi drive pada tahun 2023:

Tabel 18 Capaian Layanan Kolaborasi Drive Tahun 2023

Layanan	Jumlah Permintaan	Jumlah yang Diberikan	Capaian
Penambahan Kapasitas Kolaborasi Drive	5	5	100%
Pembuatan Akun Baru	27	27	100%

Berdasarkan data tabel di atas, menunjukkan bahwa capaian layanan kolaborasi drive pada tahun 2023 adalah sebesar **100%**.

3. Layanan Konferensi Video (Z4)

Layanan konferensi video merupakan layanan telekomunikasi interaktif untuk kebutuhan komunikasi visual, audio secara real time yang dapat digunakan

oleh tiap – tiap unit kerja. Pada tahun 2023, Direktorat INTI menyediakan 3 jenis akun untuk konferensi video, yaitu akun untuk 100 peserta, akun untuk 300 peserta dan akun untuk 1000 peserta. Akun 100 peserta diberikan kepada beberapa unit kerja yang sering melaksanakan rapat daring baik rapat internal maupun eksternal untuk dikelola sendiri. Capaian layanan konferensi video dihitung dari permintaan layanan konferensi video. Berikut ringkasan capaian layanan konferensi video pada tahun 2023:

Tabel 19 Capaian Layanan Kolaborasi Drive Tahun 2023

Layanan	Jumlah Permintaan	Jumlah yang Diberikan	Capaian
Konferensi video (Akun 300)	1662	1662	100%
Konferensi video (Akun 100)	1312	1312	100%
Konferensi video (Akun 1000)	288	288	100%

Berdasarkan data tabel di atas, menunjukkan bahwa capaian layanan konferensi video pada tahun 2023 adalah sebesar 100%. Selain menyediakan layanan rutin untuk seluruh unit kerja Badan Kepegawaian Negara, Direktorat INTI juga turut andil dalam kesuksesan acara Rapat Koordinasi Nasional Badan Kepegawaian Negara tahun 2023 dengan menyediakan akun konferensi video untuk 5000 peserta dan 1000 peserta.

4. Layanan Pemeliharaan TV Media (Z6)

Layanan Pemeliharaan TV Media merupakan layanan pemeliharaan TV Media yang terpasang di lingkungan kantor BKN Pusat. TV Media sendiri berfungsi sebagai media penyampaian informasi kepegawaian maupun informasi internal kepada pegawai BKN yang berada pada lingkungan Kantor BKN Pusat. Pada tahun 2023, terdapat 26 TV Media terpasang dan telah dilakukan pemeliharaan selama tahun 2023.

Capaian layanan pemeliharaan TV Media pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

$$Z6 = X6/Y6 \times 100\%$$

$$Z6 = 26/26 \times 100\%$$

$$= \mathbf{100\%}$$

Keterangan :

Z6 = Persentase Capaian Layanan Pemeliharaan TV Media

X6 = Jumlah Pemeliharaan TV Media yang terpenuhi

Y6 = Jumlah TV Media yang ada di lingkungan BKN Pusat

5. Layanan Blast Whatsapp (Z7)

Layanan Blast Whatsapp merupakan sarana pemberitahuan terkait informasi resmi kepegawaian. Pada tahun 2023, Direktorat INTI memastikan lisensi untuk penyelenggaraan Blast WhatsApp dapat digunakan sesuai dengan permintaan. Pada tahun 2023, layanan Blast WhatsApp telah terpenuhi 100%. Berikut detail pelaksanaan operasional layanan WhatsApp pada tahun 2023:

Tabel 20 Capaian Layanan Blast Whatsapp Tahun 2023

No.	Periode	Sent
1	January	47,033
2	February	33,927
3	March	5,282
4	April	1,526
5	May	0
6	June	3,925
7	July	26,207
8	August	70,110
9	September	25,496
10	October	10,959
11	November	36,535
12	Desember	53,297
TOTAL		314,297

6. Layanan Intranet (Z5)

Layanan intranet adalah layanan jalur komunikasi/ jaringan internal BKN. Layanan intranet sendiri terdiri dari layanan VPN, layanan wifi (nirkabel) di lingkungan kantor BKN Pusat dan layanan wire di lingkungan kantor BKN Pusat. Layanan VPN sendiri merupakan jalur komunikasi yang disediakan

untuk Kantor Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN, Kantor Regional BKN dan Kantor UPT BKN. Berdasarkan data tabel di atas, menunjukkan bahwa capaian layanan Intranet pada tahun 2023 adalah sebesar 100%. Berikut ringkasan capaian layanan intranet pada tahun 2023:

Tabel 21 Capaian Layanan Blast Whatsapp Tahun 2023

Layanan	Jumlah Permintaan	Jumlah yang Diberikan	Capaian
Layanan Wireless	107	107	100%
Layanan Wire	148	148	100%
Layanan VPN	41	41	100%

Berdasarkan data – data di atas, capaian layanan komunikasi dan informasi adalah sebagai berikut

$$\text{Layanan Komunikasi dan Informasi} = (100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\%) / 6 = 100\%$$

- **Keamanan Layanan Infrastruktur Teknologi Informasi**

Keamanan Layanan Infastruktur Teknologi Informasi merupakan layanan yang diberikan Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan informasi dengan meminimalkan risiko keamanan informasi di Badan Kepegawaian Negara. Layanan ini terdiri dari :

1. Layanan Pengujian Keamanan TI

Pengujian Keamanan TI merupakan rangkaian kegiatan mengidentifikasi celah/kerentanan, mengukur tingkat risiko serta menguji keamanan aplikasi termasuk network, server, maupun database yang menyertainya. Jumlah aplikasi yang diuji dalam satu tahun dapat berubah sesuai dengan dinamika perubahan/pengembangan IT di BKN. Pengujian keamanan dilakukan dalam rangka memastikan keamanan penyelenggaraan elektronik, perlindungan data pribadi serta pencegahan kebocoran informasi di lingkungan Badan Kepegawaian Negara. Berikut ringkasan capaian layanan pengujian keamanan TI pada tahun 2023:

Tabel 22 Capaian Layanan Pengujian Keamanan Tahun 2023

Layanan	Jumlah aplikasi baru + dikembangkan	Jumlah yang dilakukan pengujian	Capaian
Pengujian Keamanan TI	156	156	100%

2. Layanan Pengendalian Akses

Pengendalian Akses adalah serangkaian kegiatan berupa mereviu, mengatur dan mengevaluasi permohonan akses dari pihak yang berkepentingan. Permohonan Akses adalah pengajuan permohonan berupa form isian/dokumen dari pemohon sebagai pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan akses sesuai kebutuhan dan kewenangan. Berikut ringkasan capaian layanan pengendalian akses pada tahun 2023 :

Tabel 23 Capaian Layanan Pengendalian Akses Tahun 2023

Layanan	Jumlah permohonan akses	Jumlah akses yang dikendalikan	Capaian
Pengendalian Akses	430	430	100%

3. Layanan Pengelolaan Insiden Keamanan

Pengelolaan Insiden Keamanan adalah mereviu, merespon dan melaporkan kejadian keamanan informasi yang tidak diduga atau tidak dikehendaki yang mempunyai kemungkinan besar mengganggu keberlangsungan bisnis dan mengancam keamanan informasi. Berikut ringkasan capaian layanan pengelolaan insiden keamanan pada tahun 2023:

Tabel 24 Capaian Layanan Pengelolaan Insiden Tahun 2023

Layanan	Jumlah insiden keamanan	Jumlah insiden yang direspon	Capaian
Pengelolaan Insiden Keamanan	15	15	100%

4. Audit dan Kepatuhan Standar Keamanan Informasi

Audit dan Kepatuhan Standar Keamanan Informasi adalah proses penilaian yang menilai *best practice* standar keamanan yang ditetapkan organisasi. Audit Keamanan Informasi adalah proses evaluasi yang menilai praktik keamanan yang ditetapkan organisasi. Kegiatan yang dilakukan meliputi proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti (evidence) untuk menentukan apakah sistem yang dikelola dapat melindungi aset informasi, serta apakah teknologi informasi yang ada telah memelihara integritas data sehingga keduanya dapat diarahkan kepada pencapaian tujuan bisnis secara efektif dengan menggunakan sumber daya secara efektif. Pada tahun 2023, terdapat 3 pelaksanaan audit keamanan yaitu:

- a. Audit CSM dan Indeks KAMI yang dilakukan oleh BSSN
- b. Pelaksanaan audit internal oleh seluruh pegawai Dit INTI
- c. Pelaksanaan audit iSO 27001 oleh BVI

Dari penjelasan di atas, maka capaian keamanan layanan infrastruktur teknologi informasi = $(100\% + 100\% + 100\% + 100\%)/4 = 100\%$

Berdasarkan capaian setiap layanan yang telah dijelaskan di atas, dapat dihitung capaian dari IKU 3. Persentase Tingkat Ketersediaan Infrastruktur TIK yaitu:

$$(99,94\% + 100\% + 100\%)/3 = 99,99\%$$



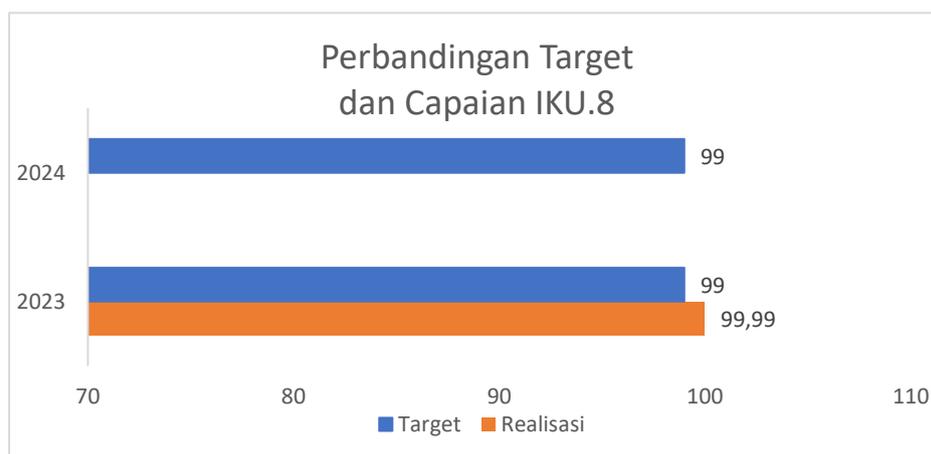
Gambar 32 Perbandingan Target dan Capaian IKU.8 Tahun 2020 - 2023

Pada tahun 2023, realisasi kinerja IKU 3 mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya namun tetap melebihi target tahunan maupun target renstra. Capaian tersebut diperoleh karena selama tahun 2023, durasi sistem pada pusat data BKN dapat diakses selama 525.047 menit dari yang seharusnya 525.600 menit atau sebesar 99,89%. Berikut analisis pendukung keberhasilan serta kegiatan – kegiatan pendukung capaian IKU 3:

1. Pemeliharaan email secara rutin setiap tahun menjadi salah satu faktor pendukung dari capaian kinerja layanan email dan layanan notifikasi/Blast email sesuai target. Kegiatan pemeliharaan email dilaksanakan guna layanan email resmi BKN dapat dimanfaatkan dengan mudah oleh para pegawai BKN.
2. Pada tahun 2023, pembelian lisensi konferensi video tahunan melalui ekatalog sehingga tidak perlu melakukan reset ulang lisensi setiap bulan. Selain penyediaan akun konferensi video, Direktorat INTI juga menyediakan perangkat berupa kamera yang dapat dipinjam oleh unit kerja yang mengadakan rapat/ FGD/ Seminar secara daring.
3. Untuk layanan *Integrated Development Environment* dan layanan visualisasi data, Direktorat INTI memfasilitasi perpanjangan lisensi yang berguna untuk pengembangan sistem, seperti lisensi Tableau, MyEclipse dan IntelliJ.
4. Pada tahun 2023, Direktorat INTI melakukan peremajaan beberapa perangkat fasilitas data center dan jaringan yang sudah usang.
5. Direktorat INTI bekerja sama dengan BSSN dalam hal pengujian keamanan sistem-sistem tertentu, seperti CAT, SIASN dan SIMPEGNAS.
6. Pemanfaatan media sosial resmi BKN maupun jaringan pribadi untuk menyebarkan *flyer* dalam rangka meningkatkan kesadaran akan keamanan informasi.
7. Pada tahun 2023, Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi Badan Kepegawaian Negara (BKN – RI) telah mendapat sertifikasi ISO 27001
8. Pelaksanaan FGD Peningkatan Keamanan Informasi di BKN pada bulan Maret 2023 di Bandung.
9. Penyusunan dokumen *Business Continuity Plan* (BCP) Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi yang merupakan suatu dokumen yang memuat panduan – panduan kerja yang siap dieksekusi pada saat sebelum, saat terjadi dan setelah suatu kondisi di luar normal terjadi dalam rangka memastikan kegiatan

Meskipun capaian IKU 3 telah melebihi target, namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala-kendala yang perlu menjadi perhatian, yaitu sebagai berikut :

1. Banyak perangkat jaringan maupun perangkat pendukung data center yang *obsolete* dan sudah habis masa garansinya dan *support* nya
2. Belum adanya sistem manajemen layanan pengujian Keamanan TI, Layanan Pengendalian Akses, Layanan Pengelolaan Insiden Keamanan. Saat ini permintaan maupun pengaduan melalui email: dit.inti@bkn.go.id Belum tersedianya *tools* pengujian yang berlisensi, dan saat ini masih menggunakan *tools* pengujian yang bersifat *open source*.



Gambar 33 Perbandingan Target dan Capaian IKU.8 Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2024

Untuk tetap mencapai target dan terus meningkatkan kinerja terutama pada IKU. 8 ini, direncanakan beberapa tindak lanjut yang akan dilakukan pada tahun 2024. Tindak lanjut terhadap analisis kendala serta rencana kegiatan/ program yang akan dilakukan pada periode-periode berikutnya:

1. Perlu dilakukan sosialisasi dan pembinaan terkait produk layanan Direktorat INTI kepada seluruh pegawai BKN khususnya untuk layanan email dan loker termasuk penambahan kapasitas email dan loker. Sosialisasi dan pembinaan dilakukan agar para pegawai dapat memanfaatkan fasilitas/ layanan yang telah disediakan oleh Direktorat INTI.
2. Peremajaan perangkat – perangkat yang sudah *obsolete* pada tahun 2024.
3. Perlunya pengadaan *tools* pengujian yang berlisensi untuk meningkatkan kualitas hasil pengujian keamanan sistem.
4. Pada tahun 2024, akan diadakan sertifikasi *Design Uptime* pada Data Center BKN. Kegiatan ini bertujuan untuk menerapkan standarisasi kualitas pada fasilitas Data Center sehingga memenuhi standar internasional. Melalui sertifikasi Uptime dan pemenuhan level Tier III pada Data Center dapat mendukung peran

BKN sebagai walidata ASN dan menjaga keberlangsungan layanan BKN dalam pengelolaan data. Tautan *evidence*: <https://bit.ly/LKJINTI2023>

SS.4. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan di Lingkungan Deputi Bidang SINKA

IKU. 9 Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kegiatan di Lingkungan Deputi Bidang SINKA

Tabel 25 Perbandingan Capaian dan Target IKU.9

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi	Kinerja
Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kegiatan di Lingkungan Deputi Bidang SINKA	6	6	100%

Indikator ini mengukur jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di masing-masing direktorat di lingkungan Deputi Bidang SINKA, yang terdiri dari kegiatan:

- a. Pemenuhan Regulasi Teknis Tata Kelola TIK ASN
- b. Optimalisasi Kualitas Data ASN
- c. Pembangunan dan Pengembangan SIASN
- d. Integrasi SIASN
- e. Digitalisasi Arsip Kepegawaian ASN
- f. Ketersediaan Infrastruktur TIK

Selama tahun 2023, dokumen monitoring dan evaluasi yang telah diserahkan oleh masing-masing direktorat yaitu satu dokumen monitoring berupa capaian kinerja berdasarkan format yang telah ditentukan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi yaitu laporan NPSS dan Laporan Kinerja Triwulan I, II, III, IV, serta semester I dan semester II yang totalnya berjumlah enam dokumen. Sehingga realisasi capaian sesuai dengan target indikator kinerja utama tahun 2023.



Gambar 34 Perbandingan Target dan Capaian IKU.9 Tahun 2020 - 2024

Dari tahun ke tahun target dan realisasi mengenai monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkungan Deputy SINKA stabil. Namun pada tahun 2024 target akan dirubah menjadi 100 dengan melakukan pengukuran terlaksananya rencana tindak lanjut yang dijalankan pada tahun 2024.

SS.5. Terwujudnya ASN BKN di lingkungan Deputy SINKA yang kompeten

IKU. 10 Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang

Perhitungan Indeks Profesionalitas (IP) ASN terdiri atas dimensi antara lain:

- Kualifikasi dengan bobot 25%, indikatornya adalah riwayat jenjang pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh PNS.
- Kompetensi dengan bobot 40%, indikatornya adalah riwayat pengembangan kompetensi seperti diklat kepemimpinan, diklat fungsional, diklat teknis, maupun seminar/ workshop/ magang/ kursus/ sejenisnya.
- Kinerja dengan bobot 30%, indikatornya adalah riwayat hasil penilaian kinerja yang mencakup Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja Pegawai (PKP).
- Disiplin dengan bobot 5%, indikatornya adalah data/ informasi mengenai hukuman disiplin yang pernah diterima.

Tabel 26 Perbandingan Capaian dan Target IKU. 10

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi	Kinerja
Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang SINKA	80	82,62	103,27%

Pada Triwulan I sampai dengan Triwulan III tidak diberikan target capaian. Target capaian indikator kinerja utama baru ditetapkan pada Triwulan IV dengan nilai 80 dan pada tahun 2023 ini, capaian yang diperoleh Deputi Bidang SINKA mendapat nilai rata-rata 82,62 yang berarti persentase kinerjanya sebesar 103,27%. Berikut adalah rincian hasil capaian dari masing-masing Direktorat yang diperoleh dari Biro SDM BKN:

1. Dit. PDPIK dengan nilai 88,61 telah mengikuti kegiatan sebagai berikut:
 - Penyelenggaraan Individual Development Plan untuk setiap pegawai di lingkungan Direktorat PDPIK
 - Pemantauan capaian pengembangan kompetensi setiap pegawai di lingkungan Direktorat PDPIK dengan mengarahkan setiap pegawai di Direktorat PDPIK untuk melakukan updating data capaian jam pelajaran setiap bulannya dalam tabel spreadsheet.
 - Perolehan nilai IP ASN Direktorat PDPIK sebesar 88,61 berdasarkan surat dari Kepala Biro SDM nomor 330/B-KP.05.02/SD/A.II/2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi Perhitungan Nilai Indeks Profesionalitas di Lingkungan BKN Tahun 2023 Atas Dasar Penilaian Tahun 2022.
2. Dit. INTI dengan nilai 77,54. Perolehan nilai tersebut berasal dari Biro SDM pada tanggal 12 Desember 2023 tentang laporan hasil evaluasi Badan Kepegawaian Negara Tahun 2023 atas dasar penilaian tahun 2022. Adapun kendala selama proses kegiatan tersebut yaitu data pelatihan teknis individu tahun 2022 banyak yang belum terupdate oleh pegawai melalui aplikasi MyASN. Rencana tindak lanjut untuk peningkatan Indeks Profesionalitas ASN Dit. INTI melakukan:
 - Sosialisasi kepada para pegawai Dit INTI untuk segera melakukan pembarharuan data pelatihan jika telah selesai melaksanakan pelatihan
 - Mendorong para pegawai untuk mengikuti kegiatan pelatihan
 - Memanfaatkan aplikasi CMB

3. Dit. AK

Berdasarkan Surat Biro SDM nomor 30/B-KP.05.02/SD/A.II/2023 tentang laporan hasil evaluasi perhitungan nilai indeks profesionalitas di lingkungan Badan Kepegawaian Negara tahun 2023 atas dasar penilaian tahun 2022, Direktorat Arsip Kepegawaian berhasil mencapai realisasi sebesar 83,90 termasuk dalam kategori “tinggi” dengan rincian nilai meliputi 4 (empat) dimensi Kualifikasi 20,59, Kompetensi 33,28, Kinerja 25,17, dan Disiplin 4,86. Masing-masing dimensi memiliki bobot penilaian dan kategori. Pada bobot penilaian, terdapat komponen yang dinilai yakni Kualifikasi dengan porsi sebesar 25%, Kompetensi sebesar 40%, Kinerja sebesar 30%, dan Disiplin yang memiliki bobot 5%. Dimensi Kompetensi mengalami peningkatan nilai dari tahun sebelumnya karena banyaknya partisipasi pegawai dalam mengikuti berbagai pelatihan dan seminar.

4. Dit. PPSIASN dengan nilai 80,41 telah melakukan beberapa kegiatan berikut:

1. Pelatihan Certified Information System Security Professional tgl 20-24 Februari 2023
2. Pelatihan Enterprise Architecture Fundamental tgl 13-16 Maret 2023
3. Pelatihan Devsecops tgl 05-08 Juni 2023
4. Pelatihan Python Fundamental tgl 21 - 24 Agustus 2023

Pelatihan ini dilakukan untuk menunjang Pencapaian Nilai IP ASN Direktorat PPSIASN pada dimensi Kompetensi. Untuk Nilai IP ASN Direktorat PPSIASN didapat dari Biro SDM BKN.



Gambar 35 Perbandingan Target dan Capaian IKU. 10 Tahun 2020 - 2023

Pada tahun 2023 realisasi mengalami peningkatan, namun terdapat satu Direktorat yang tidak mencapai target, yaitu Direktorat INTI. Kendala yang dihadapi dalam mencapai realisasi yaitu banyak data pelatihan teknis individu tahun 2022 yang belum di update oleh pegawai melalui myASN. Selain itu, kurangnya pelatihan bagi pegawai di bawah sub bagian Tata Usaha juga menjadi salah satu penyebab rendahnya nilai IP ASN.



Gambar 36 Perbandingan Target dan Capaian IKU.10 Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2024

Untuk mencapai target renstra tahun 2024, maka akan dilakukan tindak lanjut dari kendala yang dialami dengan beberapa kegiatan berikut:

1. Sosialisasi kepada para pegawai Dit INTI untuk segera melakukan pembaharuan data pelatihan jika telah selesai melaksanakan pelatihan
2. Mendorong seluruh pegawai untuk aktif mengikuti kegiatan pelatihan atau pengembangan diri serta memanfaatkan aplikasi CMB yang telah disediakan oleh Biro SDM

SS.6. Terwujudnya sistem informasi internal di lingkungan Deputi Bidang SINKA yang handal dan mudah diakses

IKU. 11 Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang Terstandar

Sistem informasi sebagai sarana penunjang pelayanan kepegawaian harus andal, dan mudah diakses untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Indikator kinerja ini dihitung dari perbandingan antara jumlah sistem informasi

yang digunakan dengan total sistem informasi yang disediakan dikali 100 (seratus). Secara keseluruhan sistem informasi internal yang ada telah digunakan atau dimanfaatkan oleh Seluruh Direktorat di bawah Deputi SINKA dengan tingkat rutinitas yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan fungsi dari sistem.

Tabel 27 Perbandingan Capaian dan Target IKU. 11

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi	Kinerja
Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang Terstandar	100%	100%	100%

Sesuai dengan target capaian indikator kinerja utama tahun 2023, telah didefinisikan target pada Triwulan I, Semester I, dan Semester II. Di mana target pemanfaatan sistem informasi internal BKN yang digunakan mencapai 100%. Berikut merupakan beberapa sistem informasi yang digunakan dalam menunjang pekerjaan sehari-hari di lingkup Deputi Bidang SINKA:

1. LBP

Sistem informasi presensi untuk pegawai Badan Kepegawaian Negara, berbasis lokasi dan *face recognition*.

User: setiap pegawai di BKN dan admin Biro SDM

2. Presensi

Aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan pegawai seperti izin, cuti, laporan kehadiran, perjalanan dinas, diklat, dsb.

Link: <https://presensi.bkn.go.id>

3. Kinerja

Aplikasi yang digunakan dalam perencanaan dan pelaporan kinerja pegawai.

Link: <https://kinerja.bkn.go.id/>

User: setiap pegawai di BKN dan admin Biro SDM

4. Simpeg

Aplikasi kepegawaian yang digunakan sebagai sarana untuk mengelola perubahan data pegawai terintegrasi dengan SAPK secara dua arah, melihat statistik, mengelola disiplin dan tata naskah (digunakan untuk pengunggahan sertifikat pelatihan)

Link: <http://simpeg.bkn.go.id/>

User: setiap pegawai di BKN dan admin Biro SDM

5. DS
Aplikasi tanda tangan elektronik
Link: <https://ds.bkn.go.id/login>
User: setiap TU unit eselon II
6. Loker BKN
Aplikasi yang digunakan sebagai media penyimpanan digital
Link: <https://loker.bkn.go.id/>
User: setiap unit eselon II di BKN
7. Srikandi
Aplikasi umum bidang kearsipan dinamis yang digunakan dalam pengelolaan kearsipan dinamis di instansi pemerintah
Link: <https://srikandi.arsip.go.id/>
User: setiap pegawai di BKN
8. Sioni (Sistem Informasi Online Inventory)
Aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan barang persediaan
Link: <http://sioni.bkn.go.id/>
User: setiap pengelola barang persediaan (TU) di unit eselon II di BKN Pusat



Gambar 37 Perbandingan Target dan Capaian IKU. 11 Tahun 2020 - 2023

Dari tahun ke tahun capaian akan IKU ini meningkat dan stabil. Sampai dengan tahun 2023 sudah dapat mencapai target yang ditentukan. Sehingga pada tahun 2024 pengguna sistem informasi akan dioptimalkan terutama oleh pegawai bagian tata usaha sehingga mempermudah pelayanan administrasi di

lingkungan Deputy SINKA dan mencapai target seperti yang tergambar pada diagram di bawah ini.



Gambar 38 Perbandingan Target dan Capaian IKU.11 Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2024

SS.7. Terwujudnya Birokrasi di Lingkungan Deputy Bidang SINKA yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pelayanan Prima

IKU. 12 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Deputy Bidang SINKA



Gambar 39 Perbandingan Target dan Capaian IKU. 12 Tahun 2020 - 2024

Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan angka yang menunjukkan tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputy Bidang SINKA

yang dilakukan secara mandiri. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Namun di tengah periode terdapat perubahan narasi IKU yang sebelumnya berupa nilai RB menjadi pelaksanaan rencana aksi RB.

Tabel 28 Perbandingan Capaian dan Target IKU. 12

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi	Kinerja
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Deputi Bidang SINKA	100%	100%	100%

Setelah dilakukan perubahan narasi IKU yang sebelumnya berupa nilai RB menjadi pelaksanaan rencana aksi RB, target indikator kinerja utama dihitung dari Triwulan IV dengan target sebesar 100%. Capaian kinerja Deputi SINKA mencapai 100 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Dit. INTI

Pada tahun 2023, Direktorat INTI merencanakan rencana aksi sesuai dengan indikator yang dipegang oleh Direktorat INTI, baik itu RB General maupun RB Tematik. Pada RB General, Direktorat INTI memegang Indikator Kegiatan Utama Indeks Keamanan Informasi dengan rencana aksi sebagai berikut :

- Internalisasi tata kelola keamanan informasi
- Reviu tata kelola keamanan informasi

Dari kedua rencana aksi tersebut, telah dilaksanakan seluruhnya. Selain itu untuk RB Tematik, Direktorat INTI mengusulkan 3 kegiatan yaitu:

- Peningkatan budaya kesadaran keamanan informasi ke seluruh pegawai (*Raising Security Awareness*)
- Pembangunan *dashboard* monitoring infrastruktur SIASN
- Peningkatan *performance* infrastruktur *database* dengan menggunakan metode pembagian beban dan sistem antrian *database*, 4. Optimalisasi pengelolaan insiden keamanan TI.

2. Dit. PDPIK

Untuk mendukung pelaksanaan RB, Direktorat PDPIK selama tahun 2023 telah menyusun rencana aksi serta monitoring dan evaluasi untuk RB General dan RB Tematik. Adapun komponen untuk RB General meliputi :

- Indeks SPBE
- Akuntabilitas Kinerja
- Akuntabilitas Keuangan
- Survei Penilaian Integritas
- Nilai Employer Branding
- Indeks BerAKHLAK
- Survei Kepuasan Masyarakat

Sedangkan komponen untuk RB Tematik meliputi:

- Implementasi Manajemen Data ASN berupa Lokakarya Kolaborasi Data, Video Satu Data ASN dan Jingle Satu Data ASN.
- Penyajian Data Analytics Berbasis Portal Satu Data ASN berupa penyajian data analytics dalam Portal Satu Data ASN.

3. Dit. AK

Sesuai dengan manual IKU, perhitungan capaian untuk tahun 2023 dengan menyusun tim reformasi birokrasi Direktorat Arsip kepegawaian, menyusun rencana aksi dan melaksanakan kegiatan *reform* yang telah ditetapkan diawal tahun kemudian melakukan evaluasi secara berkala dari kegiatan *reform* tersebut. Tujuan evaluasi adalah untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan dan pencapaian reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Arsip Kepegawaian, dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik. Selain itu juga digunakan sebagai masukan perbaikan untuk meningkatkan pencapaian reformasi birokrasi. Pada tahun 2023 kegiatan yang dilakukan Dit. AK yaitu:

- Percepatan digitalisasi arsip kepegawaian
- Peningkatan IP ASN

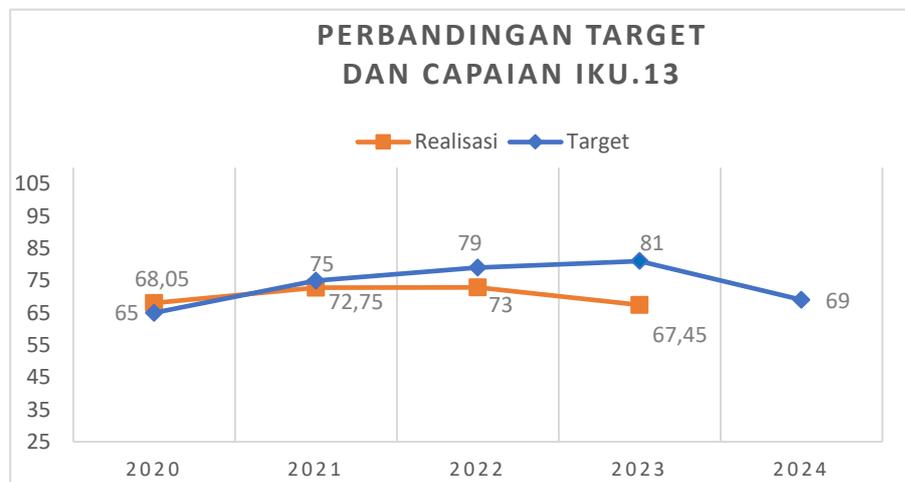
4. Dit. PPSIASN

Telah dilakukan pemenuhan Dokumen Reformasi Birokrasi, berupa:

- SK TIM RB Unit dan Rencana Aksi RB Tematik
- Laporan Monev RB Tematik.

IKU. 13 Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Deputi Bidang SINKA

Indikator ini merupakan nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh inspektorat terhadap lima komponen manajemen kinerja di lingkungan Deputi Bidang SINKA. Lima komponen besar manajemen kinerja tersebut meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang SINKA telah dievaluasi oleh Inspektorat dengan dikeluarkannya Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



Gambar 40 Perbandingan Target dan Capaian IKU. 13 Tahun 2020 – 2023

Tabel 29 Perbandingan Capaian dan Target IKU. 13

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi	Kinerja
Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Deputi Bidang SINKA	81	67	83,27%

Untuk masing-masing Direktorat telah melakukan pemenuhan dokumen SAKIP dengan rincian sebagai berikut:

- Direktorat INTI
 - Dokumen SAKIP yang telah direalisasikan:
 1. LKj tahun 2022

2. Perjanjian Kinerja tahun 2023
 3. Rencana Aksi 2023
 4. Revisi Manual IKU tahun 2023
- Direktorat PDPIK:
Bahan dokumen SAKIP 2023 yang telah tersedia diantaranya:
 1. Perjanjian Kinerja Reform Direktur 2023 revisi Mei 2023
 2. Manual IKU revisi Mei 2023
 3. Rencana Aksi 2023 revisi Mei 2023
 4. Rincian Target Kinerja Unit 2023 revisi Mei 2023
 5. Buku Laporan Capaian Kinerja TW I 2023

 - Direktorat AK:
Adanya perubahan dokumen SAKIP pada bulan April 2023 dikarenakan pergantian Pimpinan yaitu:
 1. Revisi Perjanjian Kinerja 2023
 2. Revisi Target IKU 2023
 3. Revisi Manual IKU 2023
 4. Revisi Rencana Aksi 2023(<https://drive.google.com/drive/folders/1NmgvwYU1kjoKBYspyTGC4KjaW3hhYKjg>)

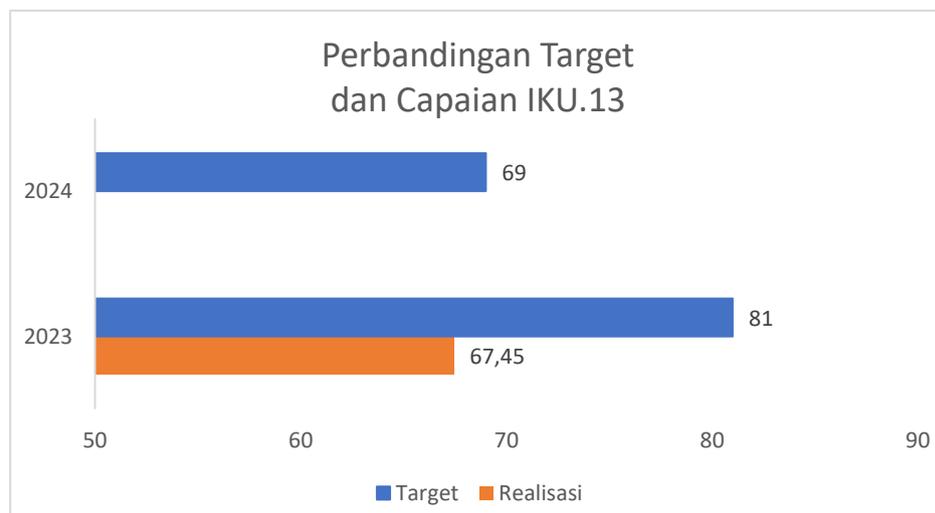
 - Direktorat PPSI:
Dokumen AKIP yang telah dipenuhi :
 1. LKJ Tahun 2022
 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
 3. Rencana Aksi Tahun 2023
 4. Rincian Target IKU Tahun 2023
 5. Manual IKU Revisi tidak ada target realisasi pada TW 2

Dari setiap dokumen yang dikumpulkan setiap triwulan dan semester, setelah dilakukan penilaian oleh inspektorat, tahun 2023 LHE Deputi SINKA mendapatkan nilai 67,45. Dengan nilai tersebut kinerja Deputi SINKA

termasuk dalam predikat BAIK. Dari evaluasi tersebut, didapatkan beberapa rekomendasi dari Inspektorat sebagai berikut:

1. Agar dilakukan revisi/reviu Renstra terkait pengukuran IKU untuk indeks Maturitas SPBE yang telah tidak ditetapkan dari IKU di Rencana Kinerja, Rencana Aksi maupun Perjanjian Kinerja di tahun 2023 ini;
2. Agar dalam penetapan target kinerja tahunan yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja mempertimbangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya, menggunakan sumber data yang memadai, dan memenuhi target minimal yang ditetapkan pada Perjanjian Kerja Kepala BKN (inline) sehingga dapat dicapai dan realistis, namun jika target kinerja di tahun 2023 ini ditetapkan lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun di tahun 2022 untuk diberikan penjelasan maupun alasan logis pada dokumen Perencanaan Kinerja (Renja) 2023;
3. Agar kegiatan pendukung pada dokumen rencana aksi yang ditetapkan untuk dilengkapi dengan target dari output yang akan dicapai atas kegiatan pendukung tersebut;
4. Agar memperbaiki Manual IKU 2023 terkait definisi operasional pada indeks persentase optimalisasi kualitas data ASN (IKU 4) dan persentase digitalisasi arsip kepegawaian ASN (IKU 7);
5. Agar menyiapkan eviden/ dokumen yang terkait pada setiap IKU sebagai sumber data dalam penyusunan laporan kinerja untuk menjamin akuntabilitas kinerja diantaranya data pada IKU 9 Jumlah dokumen monitor dan evaluasi kegiatan di lingkungan deputy bidang SINKA;
6. Agar membuat SOP/ Flowchart terkait pengumpulan data kinerja per IKU;
7. Agar memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) dalam hal pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja, diantaranya untuk IKU 15 (Persentase tindak lanjut hasil audit/pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat);
8. Agar hasil pengukuran kinerja per triwulan Deputy SINKA didokumentasikan dengan memadai sehingga dapat mudah diakses dan akuntabilitasnya terjamin;
9. Agar disusun laporan kinerja per triwulan (interim) Deputy SINKA tahun 2023;
10. Agar mempublikasikan tepat waktu atas laporan kinerja Deputy SINKA di website BKN sesuai dengan nota dinas dari Biro Perencanaan dan Organisasi;

11. Agar pada dokumen laporan kinerja menjelaskan faktor keberhasilan maupun faktor hambatan/ kendala serta upaya perbaikannya;
12. Agar dokumen laporan kinerja Deputi SINKA diketahui dan direviu oleh pimpinan;
13. Agar rekomendasi yang disusun dalam rangka kegiatan evaluasi internal yang dilakukan oleh unit kerja masing-masing dapat dilengkapi dengan rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan serta melampirkan dokumentasi pelaksanaan tindak lanjut tersebut;
14. Agar mengintensifkan dialog kinerja yang melibatkan seluruh pegawai dan melaksanakan pengukuran serta evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan melibatkan seluruh komponen organisasi.
15. Agar pada laporan evaluasi rencana aksi per triwulan menyajikan target dan realisasi kinerja, tidak hanya nilai realisasi anggaran;
16. Agar penetapan target pada rencana aksi disesuaikan periodenya dengan periode laporan (per triwulan/ semesteran/ tahunan) yang telah ditetapkan pada Manual IKU;
17. Agar rencana aksi berkorelasi dengan rekomendasi yang diberikan pada evaluasi internal tahun sebelumnya;
18. Agar pada dokumen evaluasi rencana aksi per triwulan atas setiap IKU dapat menyajikan analisis keberhasilan/kegagalan dan upaya perbaikan maupun tindak lanjutnya;
19. Agar dalam melaksanakan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi) yang bertujuan data formulasi pada manual IKU, hasil pengukuran kinerja, analisis capaian kinerja, rekomendasi dan upaya yang akan dilakukan menjadi seluruhnya terintegrasi dalam penyusunan laporan kinerja;
20. Agar melaksanakan seluruh tindak lanjut dari rekomendasi yang disampaikan pada dokumen evaluasi internal atas rencana aksi per triwulan;
21. Agar memonitoring realisasi kinerja dengan membandingkan data per triwulan pada tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dengan tujuan melihat peningkatan kinerja dari hasil pemanfaatan kegiatan evaluasi akuntabilitas internal.



Gambar 41 Perbandingan Target dan Capaian IKU.13 Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2024

Pada grafik di atas diketahui bahwa realisasi tahun 2023 dan target renstra tahun 2024 memiliki selisih 1,55 poin. Sehingga dari rekomendasi yang diberikan oleh inspektorat akan ditindaklanjuti dengan memperbaiki mulai dari penulisan dan formulasi dari masing-masing IKU sehingga mudah dipahami oleh pihak non teknis dengan cara penggunaan nomenklatur umum dan memberikan definisi pada istilah-istilah teknis. Selain itu dilakukan evaluasi internal dengan semua pihak yang terlibat dengan perencanaan dan pengukuran kinerja di lingkungan Deputy Bidang Sistem Informasi Kepegawaian. Tak hanya itu, pelaporan per triwulan/ semester akan dilakukan secara periodik seperti biasanya sesuai dengan jadwal dari Biro Perencanaan dan Organisasi. Kemudian akan didokumentasikan setiap laporan dan kegiatan yang berhubungan dengan pengukuran kinerja, sehingga ketika dilakukan pemeriksaan oleh inspektorat atau pihak berkepentingan lainnya, data sudah tersedia.

Namun dari hasil dan rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat, terdapat beberapa hal yang perlu dikonfirmasi dengan Inspektorat sebagai berikut:

- Pengumpulan data dan pengukuran capaian kinerja belum sepenuhnya memanfaatkan Teknologi Informasi. Dari klausul tersebut, kurang sesuai jika ditujukan pada Deputy Bidang SINKA sebab, Kedeputian maupun Direktorat di bawahnya sudah melakukan perhitungan nilai kinerja dan

pengumpulan data sesuai dengan yang difasilitasi dan sesuai dengan standar dari Biro Perencanaan dan Organisasi. Untuk saran tersebut mungkin lebih tepatnya diperuntukkan untuk masukkan Biro Perencanaan dan Organisasi.

- Perbandingan data yang digunakan kurang relevan, sebab yang dibandingkan dari tahun 2022 dan 2023 di mana belum tentu sama target capaiannya pada masing-masing Triwulan
- Sebagai masukan, mungkin dapat diberikan kesempatan untuk melakukan *close meeting* sebelum memberikan laporan evaluasi. Sehingga jika ada hal yang perlu dikonfirmasi oleh *auditee* dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu sebelum pemberian penilaian.

SS.8. Terkelolanya Anggaran di Lingkungan Deputi Bidang SINKA secara Efesien dan Akuntabel

IKU.14 Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Deputi Bidang SINKA



Gambar 42 Perbandingan Target dan Capaian IKU. 14 Tahun 2020 – 2023

Tabel 30 Perbandingan Capaian dan Target IKU. 14

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi	Kinerja
Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Deputi Bidang SINKA	99%	99,07%	100,07%

Berdasarkan grafik dan tabel realisasi di atas, diketahui bahwa sejak tahun 2021 realisasi pelaksanaan anggaran di lingkungan Deputi SINKA sudah melebihi target tahunannya. Pada tahun 2023, realisasi yang dicapai sebesar 99,07% yang didapatkan dari nilai rata-rata realisasi anggaran setiap Direktorat di lingkungan Deputi SINKA. Dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut:

1. Pada Direktorat PPSIASN Realisasi Anggaran 98,74% dengan rincian sebagai berikut:

Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara memperlihatkan seberapa besar serapan anggaran yang ada. Semakin besar serapan tersebut maka akan semakin efektif perencanaan yang sudah disusun dengan implementasi penggunaan anggaran. Pada tahun 2023 ini, anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp 4.000.000.000 yang kemudian mengalami *Automatical Adjustment* sebesar Rp 120.000.000 sehingga menjadi Rp 3.880.000.000. Namun pada tahun 2023, Direktorat PPSIASN belum dapat mencapai target realisasi dikarenakan beberapa faktor yang terjadi diluar perkiraan dan kendali Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara, dengan rincian sebagai berikut:

1. Sebesar Rp 34.000.000,- dari kegiatan Sertifikasi Certified Information System Security Professional (CISSP) , dimana terdapat 2 (dua) peserta tidak bisa mengikut Sertifikasi CISSP yang telah disepekat di awal dikarenakan sakit. Telah dilakukan permohonan reschedule namun dari pihak penyedia baru bisa dilaksanakan pada tahun 2024.
2. Sebesar Rp 12.170.318,- dari kegiatan Evaluasi Progres Manajemen Talenta Nasional, dimana terdapat sisa uang saku dan uang transport yang tidak dapat terserap dan sudah tidak dapat dilakukan revisi untuk dialihkan ke kegiatan lainnya. Perhitungan realisasi anggaran dapat diakses melalui link <https://bit.ly/LKJ2023PPSIASN>.

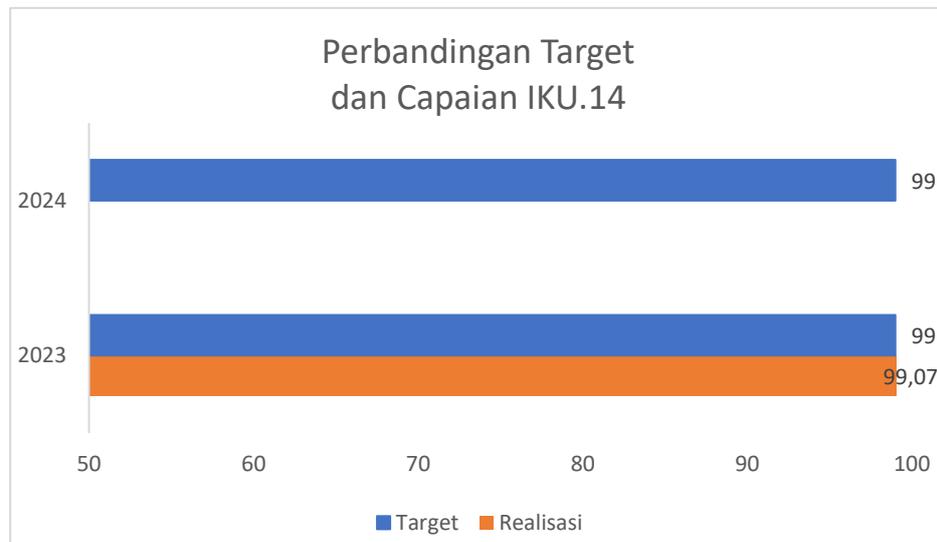
2. Direktorat PDPIK melakukan perhitungan persentase dari pagu anggaran pasca buka blokir dan tambahan anggaran menjadi sebesar Rp.929.500.000,00 yaitu sebesar 99,09%. Dalam pelaksanaan pekerjaan pada Direktorat PDPIK, diperlukan perencanaan yang diselaraskan dengan kebutuhan anggarannya. Pada tahun 2023 ini, anggaran yang dialokasikan pada Direktorat PDPIK adalah sebesar Rp. 625.000.000,-. Pada September 2023 dilakukan penambahan anggaran sebesar Rp. 304.500.000,- sehingga total alokasi anggaran Direktorat PDPIK TA 2023 menjadi sebesar Rp. 929.500.000,- yang dialokasikan untuk capaian data analitik yang disajikan dalam dashboard Portal Satu Data ASN dan Sosialisasi Peraturan Satu Data Bidang ASN. Sehingga didapatkan rincian alokasinya sebagai berikut:

Tabel 31 Pelaksanaan Anggaran Direktorat PDPIK Tahun 2023

No.	Pagu Anggaran		Realisasi	%
1	Tahap I : Rp.546.315.000,-	Operasional Direktorat PDPIK : Rp.421.315.000,-	Rp.419.804.429,-	99,64%
		Perjalanan Dinas Kedeputian : Rp.125.000.000,-	Rp.124.755.890,-	99,80%
2	Tahap II : Rp.383.185.000,- - Penyelesaian Disparitas Data - Penyajian Data Analytics		Rp.376.436.640,-	98,24%
Total : Rp.929.500.000,-			Rp.920.996.959,-	99,09%

3. Direktorat INTI melakukan realisasi anggaran sebesar Rp 13.705.600.117,- sehingga jika dipersentasekan sebesar 99,52%. PAGU terakhir Direktorat Infrastruktur Teknologi pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 13.771.200.000,- dengan penyerapan sebesar Rp 13.705.600.117,- atau 99,52% dari total PAGU. Data capaian dapat diakses melalui link berikut : <https://bit.ly/LKJINTI2023>. Walau pada tahun 2023 realisasi mengalami sedikit penurunan dikarenakan terdapat sisa anggaran sebesar Rp 65.599.883,- yang merupakan sisa-sisa kontrak pengadaan dan sudah tidak bisa direvisi, namun masih dapat melebihi target realisasi yang telah ditentukan.

4. Pada tahun anggaran 2023 terdapat revisi anggaran yang mengakibatkan pagu total yang dikelola Direktorat Arsip Kepegawaian mengalami perubahan, semula sebesar Rp 825.000.000 menjadi sebesar Rp 664.500.000 yang disebabkan oleh kebijakan *refocusing* anggaran sebesar Rp 160.500.000. Realisasi anggaran Direktorat Arsip Kepegawaian pada tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp 637.535.251 atau 98,92% dari alokasi anggaran sebesar Rp 664.500.000. Realisasi ini menurun 0,09% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 99,01%. Capaian tersebut dapat terlaksana dengan baik karena pencairan anggaran dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan *timeline* yang telah ditentukan. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 adalah perjalanan dinas dalam dan luar kota dalam rangka pembinaan, monev, jamuan rapat internal dan pengadaan persediaan barang. Kendala dalam pelaksanaan anggaran yaitu kurang maksimalnya penyerapan anggaran karena sisa anggaran dari pengadaan barang dan perjalanan dinas. Sehingga untuk menanggulangi kejadian serupa di periode selanjutnya maka direncanakan tindak lanjut berupa penyusunan rencana penarikan dana di awal tahun.



Gambar 43 Perbandingan Target dan Capaian IKU.14 Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2024

Untuk mencapai target realisasi pada tahun 2024, direncanakan beberapa kegiatan tindak lanjut atas kegiatan tahun 2023 yaitu:

- Penyusunan rencana penarikan dana di awal tahun oleh Direktorat AK
- Melakukan penyusunan program kerja dan anggaran setiap indikator kinerja

IKU. 15 Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/ Pemeriksaan oleh BPK/ Inspektorat

Persentase Tindak Lanjut Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/ Inspektorat merupakan upaya tindak lanjut/ penyelesaian yang dilakukan oleh Direktorat Arsip Kepegawaian terhadap temuan hasil audit yang dilakukan oleh BPK/ Inspektorat. Tujuannya adalah untuk memperlihatkan kewajaran Tindak Lanjut Hasil Audit/ Pemeriksaan oleh BPK/ Inspektorat informasi keuangan yang dilaporkan.



Gambar 44 Perbandingan Target dan Capaian IKU. 15 Tahun 2020 – 2023

Tabel 32 Perbandingan Capaian dan Target IKU. 15

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi	Kinerja
Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/ Pemeriksaan oleh BPK/ Inspektorat	100%	100%	100%

Berdasarkan grafik di atas, setiap tahunnya realisasi dapat mencapai target yang ditentukan. Pada target pada tahun 2023 mengenai persentase tindak lanjut temuan hasil audit/ pemeriksaan oleh BPK/ Inspektorat sebesar 100% di mana dapat dipenuhi oleh masing-masing Direktorat dengan rincian sebagai berikut:

1. Direktorat INTI

Dokumen-dokumen keuangan untuk audit telah diberikan sesuai dengan permintaan. Tidak ada temuan dari audit BPK atas pemeriksaan anggaran tahun 2022. Tautan *evidence* : <https://bit.ly/LKJINTI2023>. Sedangkan untuk realisasi anggaran pada tahun 2023 mengalami sedikit penurunan dikarenakan terdapat sisa anggaran sebesar Rp 65.599.883,- yang merupakan sisa-sisa kontrak pengadaan akhir tahun dan sudah tidak dapat direvisi. Namun tetap mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 99,52%. Pada tahun 2023, Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi juga mengajukan 4 inovasi yang tertuang dalam perjanjian kinerja *reform*/inovasi, yaitu sebagai berikut:

1. Optimalisasi Pengelolaan Insiden Keamanan TI

Badan Kepegawaian Negara memiliki CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*) yang tugas dan fungsinya melekat pada Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi. BKN – CSIRT memiliki peran penting dalam mencegah, mengelola, dan menanggapi insiden keamanan informasi. Untuk dapat menjalankan peran tersebut dengan baik, CSIRT membutuhkan sumber daya yang memadai, termasuk sumber daya manusia yang kompeten. Maka dari itu, sebagai bentuk optimalisasi pengelolaan insiden keamanan TI, Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi menunjuk agen pendukung pengelolaan insiden keamanan informasi seluruh unit kerja BKN serta menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis pengelolaan insiden keamanan untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan anggota CSIRT dan agen pengelolaan insiden keamanan TI yang telah ditunjuk.

2. Peningkatan Budaya Kesadaran Keamanan Informasi ke Seluruh Pegawai (*Raising Security Awareness*). Untuk mewujudkan peningkatan budaya kesadaran keamanan informasi ke seluruh pegawai BKN adalah dengan membentuk duta budaya kesadaran informasi di setiap unit kerja BKN yang bertugas sebagai perpanjangan tangan Dit INTI untuk memberikan kesadaran keamanan informasi pada pegawai di unit kerjanya.

3. Dashboard Monitoring Infrastruktur SIASN

4. Peningkatan *Performance* Infrastruktur *Database* dengan Menggunakan Metode Pembagian Bedan dan Sistem Antrian *Database*. Pelaksanaan

rencana aksi kegiatan *reform*/ inovasi Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi tahun 2023 dapat diakses melalui link : <https://bit.ly/3Ui05C9>

2. Direktorat PDPIK

Selama tahun 2023 telah dilakukan audit kinerja dari BPK terkait dengan pelaksanaan SSCASN Tahun Anggaran 2021. Secara garis besar temuan atas audit tersebut adalah belum tersedianya POS AP teknis yang mendukung pelaksanaan kegiatan seleksi dari penyusunan kebutuhan formasi hingga penyajian data pelamar dan lulusan SSCASN. Untuk realisasi anggaran tercapai sebesar 99,09% dengan rincian persentase dihitung dari pagu anggaran pasca buka blokir dan tambahan anggaran menjadi sebesar di Rp.929.500.000,00. Kegiatan lain yang dipantau antara lain:

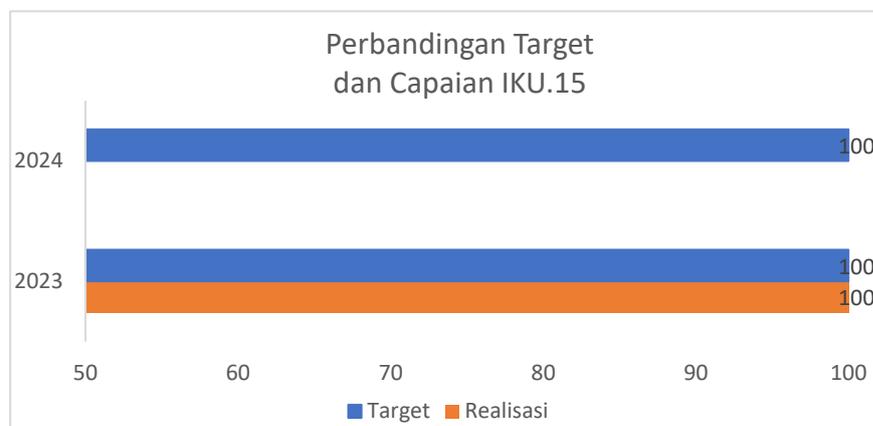
1. Penyusunan dan Pemenuhan Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Direktorat PDPIK
2. Pengelolaan Manajemen Risiko dan SOP di Lingkungan Direktorat PDPIK
3. Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar di Lingkungan Direktorat PDPIK

3. Direktorat AK

Pada tahun 2023 dilakukan pemeriksaan pada dokumen pengadaan persediaan barang dan kegiatan perjalanan dinas, sampai dengan selesainya periode pemeriksaan tidak ditemukan catatan atau temuan baik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Inspektorat sehingga realisasi tercapai sesuai target sebesar 100%. Pada tahun 2023 dilakukan pemeriksaan pada dokumen pengadaan persediaan barang dan kegiatan perjalanan dinas, sampai dengan selesainya periode pemeriksaan tidak ditemukan catatan atau temuan baik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Inspektorat sehingga realisasi tercapai sesuai target sebesar 100%. Realisasi anggaran sebesar 98,92%. Kendala dalam pelaksanaan anggaran yaitu kurang maksimalnya penyerapan anggaran karena sisa anggaran dari pengadaan barang dan perjalanan dinas. Sehingga untuk menanggulangi kejadian serupa di periode selanjutnya maka direncanakan tindak lanjut berupa penyusunan rencana penarikan dana di awal tahun.

4. Direktorat PPSIASN

Persentase Tindak Lanjut Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat merupakan upaya tindak lanjut/penyelesaian yang dilakukan oleh Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi ASN terhadap temuan hasil audit yang dilakukan oleh BPK/ Inspektorat. Pada tahun 2023 telah dilakukan Audit/Pemeriksaan oleh Inspektorat atas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 bulan Januari s/d Oktober yang telah ditindaklanjuti seluruhnya oleh Direktorat Pembangunan dan Pengembangan SIASN. Bukti dukung berupa Nota Dinas Tindak Lanjut atas Hasil Audit dapat dilihat pada link <https://bit.ly/LKJ2023PPSIASN>. Terkait realisasi anggaran Pagu Anggaran yang diterima Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara sebesar Rp 4.000.000.000,- Kemudian mengalami Automatic Adjustment anggaran menjadi Rp 3.880.000.000,- Sehingga realisasi anggaran sebesar 98,74%. Tidak tercapainya target disebabkan adanya sisa anggaran seperti dari pelatihan sebesar Rp 34.000.000,- dan kegiatan evaluasi progres manajemen talenta nasional sebesar Rp 12.170.318,-



Gambar 45 Perbandingan Target dan Capaian IKU.15 Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2024

Target renstra tahun 2024 sama dengan tahun sebelumnya, sehingga diharapkan rencana tindak lanjut dapat direalisasikan sehingga realisasi di tahun 2024 sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Deputy Bidang Sistem Informasi Kepegawaian ini mengacu pada Renstra BKN tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Kepala BKN tahun 2021 sebagai sumber data *cascading* yang dilaporkan. Laporan Kinerja ini juga merupakan penjabaran dari sasaran, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kinerja dan manual IKU Deputy Bidang Sistem Informasi Kepegawaian. Penyusunan laporan capaian kinerja tahun 2023 dilakukan seiring dengan agenda penyusunan laporan kinerja dan anggaran, mengacu pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan BKN (Perban) Nomor 2 Tahun 2020 tanggal 26 Februari 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara, dan juga mengacu pada Peta Strategi Badan Kepegawaian Negara dan Deputy Bidang Sistem Informasi Kepegawaian, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Untuk itu, laporan tersebut merupakan pertanggungjawaban dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai target kinerja tahun 2023. Capaian kinerja atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dijelaskan pada tabel berikut:

- 1) Berdasarkan analisis, secara umum capaian kinerja Deputy Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Tahun 2023 mencapai rata-rata sebesar **99,62%** dengan rincian capaian per indikator kinerja sebagai berikut dalam tabel:

Tabel 33 Capaian kinerja Deputy Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Tahun 2023

No.	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA
1.	Indeks Kepuasan Instansi terhadap Pembinaan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	101,07%
2.	Indeks Kepuasan Pengguna atas Layanan Data dan Informasi ASN	100,17%
3.	Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis Tata Kelola TIK ASN	98%
4.	Persentase Optimalisasi Kualitas Data ASN	101,82%

5.	Persentase Pembangunan dan Pengembangan SIASN	91,94%
6.	Persentase Integrasi Sistem Informasi ASN	100%
7.	Persentase Digitalisasi Arsip Kepegawaian ASN	102,83%
8.	Persentase Tingkat Ketersediaan Infrastruktur TIK	101%
9.	Persentase Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan Deputi Bidang SINKA	100%
10.	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang SINKA	103,27%
11.	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang Terstandar	100%
12.	Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Bidang SINKA	100%
13.	Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Deputi Bidang SINKA	83,27%
14.	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di lingkungan Deputi Bidang SINKA	100,07%
15.	Persentase Tindak Lanjut Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat	100%
Nilai capaian keseluruhan (Rata-rata)		61,54%

4.2 Saran

Di dalam proses pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan deputi bidang sistem informasi kepegawaian masih terdapat beberapa kendala yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan dan pelaksanaan target kinerja tahun selanjutnya. Maka diperlukan komitmen seluruh SDM pada Deputi Bidang SINKA untuk mencapai target sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah disepakati.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Capaian Kinerja Tahun 2023 Deputy Bidang Sistem Informasi Kepegawaian

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DEPUTI BIDANG SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN TAHUN 2023									
NPS: 96,82									
Strategi / Indikator Kinerja Utama	Tingkat Tindakan	Tahun	Realisasi	%	Status	SS	Status 2023	Skor SS	Status 2023
Customer Perspective								100,00	100,00
Internal Process Perspective								96,82	93,88
Learning and Growth Perspective								100,00	96,73
90.1. Indeks kepuasan internal terhadap pembinaan/pengembangan data dan informasi ASN	SS	SS	10,04	10,07%	■				
90.2. Indeks kepuasan pengguna atas layanan data dan informasi ASN	SS	SS	10,13	10,17%	■				
90.3. Pemenuhan permintaan request terkait data keajaiban TA ASN	100%	100%	96%	96%	■				
90.4. Pemenuhan optimalisasi layanan data ASN	97%	97%	98,76%	101,82%	■				
90.5. Pemenuhan pembangunan dan pengembangan SASAN	100%	100%	86,33%	86,33%	■				
90.6. Pemenuhan integrasi sistem informasi ASN	100%	100%	100%	100%	■				
90.7. Pemenuhan digitalisasi arsip kepegawaian ASN	93%	93%	95,63%	102,83%	■				
90.8. Pemenuhan tingkat kelengkapan infrastruktur TI	90%	90%	98,90%	110,00%	■				
90.9. Terlengkapinya monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkungan Deputy Bidang SINIA					■			100,00	
90.10. Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkungan Deputy Bidang SINIA	0	0	0	100,00%	■				
91.1. Terlengkapinya ASN ASN di lingkungan Deputy Bidang SINIA yang kompeten					■			100,00	
91.2. Indeks profesionalitas ASN Deputy Bidang SINIA	80	80	82,62	103,27%	■				

Lampiran 2 Capaian Kinerja Tahun 2023 Direktorat INTI

CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV DIREKTORAT INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI TAHUN 2023

Sesuai Strategi / Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Target Tr 4	Realisasi	%	Status	NDS	Status NDS	NPSS- 100,11		Penjelasan	Permasalahan	Rekomendasi	
								Skor SS	NKP				
Customer Perspective													
55.1 Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepada pelanggan yang berkualitas prima													
55.1.1	Indeks kepuasan pengguna atas layanan infrastruktur teknologi informasi	88	88	87,26	99,16%	●	99,16	●	29,75	●	<p>- Berdasarkan analisis hasil survei semester II, secara keseluruhan layanan Dit. INTI sudah masuk dalam kategori "baik" dan "target baik". Namun, ada beberapa unsur SKM yang diberikan nilai rendah oleh para responden. Pada pelaksanaan survei semester II, telah ditambahkan pilihan alasan saat responden memberikan nilai yang "urang baik" atau "tidak baik" untuk dapat diidentifikasi layanan mana yang direvisi responden perlu perbaikan beserta alasannya sehingga nantinya tim Dit. INTI dapat menyusun rencana perbaikan layanan tersebut.</p> <p>Dari hasil analisis, alasan responden memberikan nilai rendah terbanyak pada layanan pegawai adalah alasan lain - lain (alasan tidak diberikan secara rinci). Sedangkan pada layanan unit kerja, alasan terbanyak adalah pengguna belum teredukasi secara optimal mengenai kesadaran keamanan aplikasi.</p>	<p>- Menyusun ulang kalimat pada formulir survei agar lebih mudah dipahami oleh responden</p> <p>- Memberikan sosialisasi seluruh layanan infrastruktur teknologi informasi agar dapat dimanfaatkan dan dipahami oleh pengguna</p> <p>- Membuat aplikasi service desk agar pelayanan berjalan sesuai SLA, dapat dipantau, dan memudahkan pengguna</p>	
Internal Process Perspective													
Terwujudnya Pemenuhan Regulasi Tata Kelola TI & ASN													
55.2	Persentase monitor dan evaluasi regulasi tata kelola infrastruktur teknologi informasi dan tata kelola keamanan informasi	100%	100%	100%	100%	●	100,00	○	40,20	●	<p>Pada triwulan IV, telah disusun draft Regula tata kelola infrastruktur teknologi informasi dan tata kelola keamanan informasi yang baru</p>	<p>- Pada tahun 2024, draft Regula yang telah disusun akan dilakukan pemenuhan ulang dengan rekomendasi yang telah diberikan unit kerja lainnya serta peraturan nasional yang mengatur tentang infrastruktur teknologi informasi dan keamanan informasi</p>	
55.3 Terwujudnya peningkatan kualitas data dan sistem informasi ASN													
55.3.1	Persentase tingkat keterpaduan infrastruktur TI	90%	90%	99,99%	100%	●	101,00	○	30,16	●	<p>Berikut kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan IV :</p> <ol style="list-style-type: none"> Layanan operasional rutin Dit. INTI Sertifikasi ISO 27001:2022 Progres capaian KU 5 sebesar 98,99% 	<p>Pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 pukul 10.05 WIB, terjadi insiden tergelimpanya akses koneksi internet Kantor Pusat BKN dan akses dari publik ke Data Center BKN. Hal ini disebabkan adanya kendala pada backup domestic link Data Center BKN yang berpengaruh pada main domestic link Data Center BKN</p>	<p>Tindakan perbaikan kendala dilakukan oleh penyedia layanan domestic link Data Center</p>
55.4 Terlaksananya Monitor dan Evaluasi Kegiatan di Lingkungan Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi													
55.4.1	Jumlah Dokumen Monitor dan Evaluasi Kegiatan di Lingkungan Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi	6	6	6	100%	●					<p>Dokumen yang telah tersedia :</p> <ol style="list-style-type: none"> NPSS dan evaluasi rencana aksi Triwulan I NPSS dan evaluasi rencana aksi Triwulan II NPSS dan evaluasi rencana aksi Semester I NPSS dan evaluasi rencana aksi Triwulan III NPSS dan evaluasi rencana aksi Triwulan IV NPSS dan evaluasi rencana aksi Semester II 		
Learn and Growth Perspective													
55.5 Terwujudnya ASN baik di lingkungan infrastruktur Teknologi Informasi yang kompeten													
55.5.1	Indeks Profesionalitas ASN di Direktorat Infrastruktur teknologi informasi	86	86	77,34	98,16%	●	90,16	●	30,16	●	<p>Nilai berasal dari Biro Sumber Daya Manusia sesuai Nota Dinas Biro Sumber Daya Manusia tanggal 12 Desember 2023 tentang Laporan Hasil Evaluasi Badan Kepegawaian Negara Tahun 2023 atas Dasar Penilaian Tahun 2022</p>	<p>- Melakukan sosialisasi kepada para pegawai Dit. INTI untuk segera melakukan pembaruan data pelatihan jika telah selesai melaksanakan pelatihan</p> <p>- Mendukung para pegawai untuk mengikuti kegiatan pelatihan</p> <p>- Memanfaatkan aplikasi CVB</p>	
55.6 Terwujudnya sistem informasi internal di lingkungan Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi yang handal dan mudah diakses													
55.6.1	Persentase pemanfaatan sistem informasi yang terstandar	100%	0%	0%	N/A	N/A					<p>Seluruh aplikasi yang terbebas dalam manual KU telah digunakan dan dimanfaatkan sampai saat ini</p>		
55.7 Terwujudnya birokrasi di lingkungan Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan prima													
55.7.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi	100%	100%	100%	100%	●					<p>Rencana Aksi RB General dan Tematik telah selesai dilaksanakan</p> <p>vidien : https://bit.ly/3U6Z5C9</p>		
55.7.2	Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP di Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi	100%	0%	0%	N/A	N/A					<p>Dokumen SAKIP yang telah direvisikan :</p> <ol style="list-style-type: none"> UKJ tahun 2022 Perjanjian Kinerja tahun 2023 Rencana Aksi 2023 Revisi Manual KU tahun 2023 		
55.8 Terlaksananya anggaran di lingkungan Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi secara efisien dan akuntabel													
55.8.1	Persentase Realisasi Anggaran di Lingkungan Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi	98%	98%	99,52%	101,53	●	100,54	●	30,16	●	<p>Realisasi Anggaran per Triwulan IV sebesar Rp. 13.705.600.117,-</p>		
55.8.2	Persentase Tindak Lanjut Hasil Audit Pemeriksaan BPK/Inspektorat	100%	100%	99,52%	98,52	●					<p>Dokumen - dokumen keuangan untuk audit telah diberikan sesuai dengan permintaan</p> <p>Tidak ada temuan dari audit BPK atas pemeriksaan anggaran tahun 2022</p>		

Lampiran 3 Capaian Kinerja Tahun 2023 Direktorat PPSIASN

CAPAIAN KINERJA SEMESTER II DIREKTORAT PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SI ASN TAHUN 2023

NPSS: 99,89											Evidence: https://tbl.jay.lsi2023PPSIASN		
Strategi / Indikator Kinerja Utama	Tahun	Tercapai m 2	Realisasi	%	Status	NSS	Status NSS	Skor SS	NKP	Status NKP	Penjelasan	Permasalahan	Rekomendasi
Customer Perspective													
SL 1 Terwujudnya Pembinaan dan Pelayanan Kepuasan yang Berkualitas Prima													
IKU 1	Indeks Kepuasan Instansi terhadap Pembinaan dan Pelayanan Sistem Informasi ASN	88	88	90,51	102,85			102,80	30,84		Nilai Indeks merupakan rata-rata dari Nilai SMT I dan SMT II. - Pada SMT I Nilai Indeks Kepuasan adalah 91,15 - Pada SMT II Nilai Indeks Kepuasan adalah 89,70 sehingga untuk Nilai Indeks Tahunan adalah 90,51, dengan Aspek yang mendapatkan Nilai Tertinggi adalah Perilaku Pelaksanaan dan Aspek yang perlu menjadi perhatian saat Evaluasi adalah Waktu Penyelesaian		
IKU 2	Indeks Kepuasan Pengguna atas Layanan Sistem Informasi ASN	88	88	90,41	102,74						Nilai Indeks merupakan rata-rata dari Nilai SMT I dan SMT II. - Pada SMT I Nilai Indeks Kepuasan adalah 91,15 - Pada SMT II Nilai Indeks Kepuasan adalah 89,70 sehingga untuk Nilai Indeks Tahunan adalah 90,41, dengan Aspek yang mendapatkan Nilai Tertinggi adalah Persyaratan dan Aspek yang perlu menjadi perhatian saat Evaluasi adalah Waktu Penyelesaian		
Internal Process Perspective													
SL 2 Terwujudnya Pemenuhan Regulasi Teknis Tata Kelola TI/ SI ASN													
IKU 3	Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis Tata Kelola SI/ASN	100%	100%	100%	100,00			88,60	20,40		Progres untuk Regulasi Teknis Tata Kelola Sistem Informasi ASN: 1. Keputusan Kepala BKN Nomor 1713 Tahun 2022 tentang Penerapan Tanda Tangan Elektronik di BKN telah dilakukan internalisasi / sosialisasi pada tanggal 30 Maret 2023 2. Rancangan Peraturan BKN tentang Sistem Informasi ASN telah dilakukan beberapa kali harmonisasi dengan rincian : a. Harmonisasi ke-2 pada tanggal 04 April 2023 b. Harmonisasi ke-3 pada tanggal 18 April 2023 c. Finalisasi Harmonisasi Per-BKN tanggal 30 Agustus 2023 d. Penyempurnaan Hasil Harmonisasi R-PerBKN Nomor PPE.PP.01.05-1009 tanggal 4 September e. Surat Permohonan Peretujuan Presiden atas R-PerBKN tentang SIAASN Nomor 8061/B-AU.02.01/SD/2023 tanggal 11 September 2023 dari RI kepada BKN f. Penetapan Peraturan etas R-PerBKN tentang SIAASN nomor 8.0495/Sekub/Polhukam/06/2023 tanggal 20 September 2023 dari Sekretaris g. Permohonan Pengundangan Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2023 melalui Surat Deputi PWM Nomor 8060/B-AU.02.01/SD/C/2023 tanggal 25 September 2023 h. Peraturan BKN tentang SIAASN telah diundahkan tanggal 26 September 2023 i. Sosialisasi Peraturan BKN tentang SIAASN tanggal 26-28 Oktober 2023		
SL 3 Terwujudnya Peningkatan Kualitas Data dan Sistem Informasi ASN													
IKU 4	Persentase Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi ASN	100%	100%	91,94%	91,94						IKU ini dihitung dari 2 Kegiatan, yaitu: A. Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Sub Sistem SIAASN: #Pemeliharaan Sub Sistem SIAASN pada layanan: a. Layanan Perencanaan Kebutuhan (85,67%) b. Layanan Status & Keaktifan Kepegawaian (100%) c. Layanan Manajemen IP (86,67%) d. Layanan Manajemen Webservice (100%) e. Layanan Admin SIAASN (50%) f. Layanan Perumahan Dalam (100%) g. Layanan Dashboard (100%) h. Layanan GIS (100%) i. Layanan Bapek (33,33%) j. Layanan SSPT dan SSP (50%) k. Layanan Pemberitahuan (100%) l. Layanan Pengadaan (100%) m. Layanan Pindah Instansi (100%) n. Layanan Kamalkan Pangkat (100%) o. Layanan Kamalkan Jabatan (100%) Realisasi Pemeliharaan: (85,67%+100%+66,67%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%)/15= 84,44% #Pengembangan Sub Sistem SIAASN pada Layanan : a. Pengembangan SIAASN Layanan Talent Pool (100%) => Sehingga Realisasi Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Sub Sistem SIAASN : (100%+84,44%)/2 = 92,22% B. Kegiatan Pemeliharaan Aplikasi yang terhubung dengan SIAASN: a. Pemeliharaan MySAP Web (100%) b. Pemeliharaan MySAPK Android (100%) c. Pemeliharaan MySAPK IOS (100%) d. Pemeliharaan SIMPEODAS (86,67%) => Sehingga Realisasi Kegiatan Pemeliharaan Aplikasi yang terhubung dengan SIAASN : (100%+100%+100%+66,67%)/4= 91,67% Jadi Perhitungan IKU ini adalah => IKU : [(A+B)/2]x100% = [(92,22%+91,67%)/2]x100% = 91,94%	- Layanan Perencanaan Kebutuhan : - Perubahan regulasi penetapan rincian format 2024, data feeding untuk informasi jabatan yang dipgulkan oleh instansi belum selesai dilakukan - Layanan Manajemen IP : - Pemantauan environment IIS yang akan dioperasikan - Layanan Manajemen IP : - Layanan BAPEK : - Terjadi perubahan proses bisnis menjadi BPASN	- Layanan Perencanaan Kebutuhan : - Persiapan integrasi dengan standar kualifikasi jabatan di Manajemen Talenta dan Uhor pada SSPT dan SSP - Layanan SSPT dan SSP : - Periapan integrasi untuk format jabatan yang kosong pada layanan perencanan kebutuhan - Layanan Manajemen IP : - Persiapan integrasi dengan standar diklat pada SIAASN
IKU 5	Persentase Integrasi Sistem Informasi ASN	100%	100%	100%	100,00						Persentase Integrasi Sistem Informasi ASN dicapai dengan 2 (dua) Kegiatan, yaitu : 1. Integrasi SIAASN dengan Pemanfaatan / Penggunaan Aplikasi Simpingras 2. Integrasi SIAASN dengan SIMPEOD Instansi melalui Web Service Kampal dengan Terwujud II ini Progres Integrasi yaitu : 1. 350 Instansi sudah memiliki domain SIMPEODNAS 2. 367 Instansi sudah melakukan integrasi SIMPEOD nya dengan SIAASN melalui Web Service secara 2 Arah		
SL 4 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan di Lingkungan Direktorat Pembangunan dan Pengembangan SIAASN													
IKU 6	Jumlah Dokumen Monitor dan Evaluasi Kegiatan di Lingkungan Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi ASN	0	0	0	100,00						Dokumen yang telah tersedia : 1. Laporan Capaian Kinerja TW I 2. Laporan Capaian Kinerja TW II 3. Laporan Capaian Kinerja SMT I 4. Laporan Capaian Kinerja TW III 5. Laporan Capaian Kinerja TW IV 6. Laporan Capaian Kinerja SMT II		
Learn and Growth Perspective													
SL 5 Terwujudnya ASN BKN di Lingkungan Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi ASN yang Kompeten													
IKU 7	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi ASN	85	85	80,41	94,60			94,60	20,50		Direktorat PPSIASN telah melaksanakan Pelatihan sebagai berikut : 1. Pelatihan Certified Information System Security Professional tgl 20-24 Februari 2023 2. Pelatihan Enterprise Architecture Fundamental tgl 13-16 Maret 2023 3. Pelatihan Devsecops tgl 05-08 Juni 2023 4. Pelatihan Python Fundamental tgl 21 - 24 Agustus 2023 Pelatihan ini dilakukan untuk menunjang Pencapaian Nilai IP ASN Direktorat PPSIASN pada dimensi Kompetensi. Untuk Nilai IP ASN Direktorat PPSIASN berdasarkan Nota Dimes dari Biro SDM BKN Nomor 330/B-KP.05.02/SD/A.I/2023 tanggal 12 Desember 2023	- Pegawai PPSIASN belum semuanya melakukan upload bukti pelatihan pada link yang disediakan oleh SDM, sehingga mempengaruhi hasil IP ASN PPSIASN	Melakukan monitoring Nilai IP ASN PPSIASN setiap bulan
SL 6 Terwujudnya Sistem Informasi Internal di Lingkungan Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi ASN yang Handal dan Mudah di Akses													
IKU 8	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang Terbantu	100%	100%	100%	100,00						Seluruh aplikasi yang tersebut dalam manual IKU telah digunakan dan dimanfaatkan		
SL 7 Terwujudnya Birokrasi di Lingkungan Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi ASN yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pelayanan Prima													
IKU 9	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi ASN	100%	100%	100%	100,00						Pemenuhan Dokumen Reformasi Birokrasi, berupa : 1. SK TM RB Unit 2. Laporan RB Tematis		
IKU 10	Persentase Pemenuhan Dokumen ADP di Lingkungan Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi ASN	100%	100%	100%	100,00						Dokumen ADP yang telah dipenuhi : 1. LU Tahun 2022 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 3. Rencana Aksi Tahun 2023 / Rincian Target IKU Tahun 2023 4. Manual IKU Revisi		
SL 8 Terlaksananya Anggaran di Lingkungan Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi ASN secara Efisien dan Akuntabel													
					99,87								

RIU.11	<p>Perentase Realisasi Anggaran di Lingkungan Direktorat Pengembangan dan Penguatan Sistem Informasi ASN</p>	99%	99%	98,74%	99,74							Realisasi Anggaran s/d Triwulan IV sebesar Rp 3.830.956.836,- dan Total Anggaran sebesar Rp 3.880.000.000,-		
RIU.12	<p>Perentase Tindak Lanjut Hasil Audit/Permeriksaan BPK/Inspektorat</p>	100%	100%	100%	100,00							<p>Hasil Pre-Audit oleh Inspektorat telah ditindaklanjuti dengan Nota Dinas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 463/AI.01/ND/E.II/2023 2. 464/AI.01/ND/E.II/2023 3. 05/ND/14/02.013/14/E.II/2024 4. 09/B-51.02.01/12/E.II/2024 		

Lampiran 5 Capaian Kinerja Tahun 2023 Direktorat PDPIK

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DIREKTORAT PENGELOLAAN DATA DAN PENYAJIAN INFORMASI KEPEGAWAIAN KEPEGAWAIAN TAHUN 2023

NPSS: 100,10													
Besaran Kinerja / Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Target Tahun 2023	Raih	%	Status	SSG	Status RSK	Skor SSG	KIP	Status RKP	Penjelasan	Permasalahan	Rekomendasi
Customer Perspective													
35.1. Tersedianya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima													
								100,00					
KU 1	Indeks kepuasan instansi terhadap pembinaan pengabdian data dan penyajian informasi kepegawaian	88,5	88,5	88,2	80,0%						Pengumpulan data oleh DA, PDPIK melakukan survei tersendiri tingkat Direktorat. Telah dilaksanakan survei kepuasan terhadap pembinaan pengelolaan data dan penyajian informasi kepegawaian pada bulan September dan Desember 2023 untuk penilaian semester I 2023. Total responden sampai dengan TW IV 2023 sebanyak 489 yang terdiri dari 62 Instansi Pusat dan 211 Instansi Daerah Wilayah Kerja Karang BBN1 - IV.		
KU 2	Indeks kepuasan instansi atas layanan penyajian informasi kepegawaian	88	88	88	100,00%						Pengumpulan data oleh DA, PDPIK melakukan survei tersendiri tingkat Direktorat. Telah dilaksanakan survei kepuasan atas layanan penyajian informasi kepegawaian pada bulan September dan Desember 2023 untuk penilaian semester I 2023. Total responden sampai dengan TW IV 2023 sebanyak 459 yang berasal dari 252 Instansi Pemerintah dan 6 Instansi Swasta.		
Internal Process Perspective													
35.2. Tersedianya pemenuhan regulasi teknis tata kelola TI ASN													
								100,01					
KU 3	Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis Tata Kelola Pengelolaan Data	100%	100%	100%	100,00%						Kinerja untuk KU ini telah diselesaikan sebesar 100% dari target yang ditetapkan. 1. Kegiatan internalisasi tata kelola data serike 1 pada tanggal 17 Maret 2023 dengan tema: "Implementasi Tata Kelola Data Aparatur Sipil Negara Menuju Manajemen Talenta Nasional". 2. Kegiatan internalisasi tata kelola data serike 2 dan 3 pada tanggal 08 dan 17 Mei 2023 dengan tema: "Penyusunan Standar Data ASN, Metadata Statistik ASN dan Tabel Referensi / Data Induk ASN Menuju Interoperabilitas Data ASN". 3. Regulasi yang telah selesai disusun dan diadopsi: a. Kepala BKN Nomor 321.4 Tahun 2023 tentang Prosedur Data ASN BKN b. Kepala BKN Nomor 101.5 Tahun 2023 tentang Metadata ASN BKN c. Kepala BKN Nomor 6.7 Tahun 2023 tentang Arsitektur Data Bidang ASN d. Kepala BKN Nomor 103.3 Tahun 2023 tentang Badan Data ASN 4. Dokumen standar data bidang ASN sebagai turunan dari regulasi yang telah disusun: a. Metadata Buku Statistik ASN b. Standar Data Bidang ASN c. Katalog Data Bidang ASN 5. Penyempurnaan Data Data ASN dan produksi serta publikasi Volume Satu Data ASN dan Single Satu Data ASN untuk mengoptimalkan proses internalisasi tata kelola data.		
35.3. Tersedianya peningkatan kualitas data dan sistem informasi ASN													
								100,01					
KU 4	Persentase optimalisasi kualitas data ASN	97%	97%	98,70%	101,87%						Rincian pencapaian terkait KU 4 dapat dilihat dalam lampiran.		
KU 5	Sebuah dokumen monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkungan Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian	6	6	6	100,00%						- Satu laporan capaian kinerja awal dan evaluasi rencana aksi periode TW I 2023 - Satu laporan capaian kinerja NPSS dan evaluasi rencana aksi periode TW II 2023 - Satu laporan capaian kinerja NPSS dan evaluasi rencana aksi periode Semester I 2023 - Satu laporan capaian kinerja NPSS dan evaluasi rencana aksi periode TW III 2023 - Satu laporan capaian kinerja NPSS dan evaluasi rencana aksi periode TW IV 2023 - Satu laporan capaian kinerja NPSS dan evaluasi rencana aksi periode Semester II 2023		
Learn and Growth Perspective													
35.5. Tersedianya ASN BKN di lingkungan Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian yang kompeten													
								102,71					
KU 6	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian	80	80	88,61	110,76%						- Penyusunan Individual Development Plan untuk setiap pegawai di lingkungan Direktorat PDPIK - Pemenuhan capaian pengembangan kompetensi setiap pegawai di lingkungan Direktorat PDPIK dengan mengarahkan setiap pegawai di Direktorat PDPIK untuk melakukan update data capaian jam pelajaran setiap bulannya dalam tabel spreadsheet. - Perubahan nilai IP ASN Direktorat PDPIK sebesar 88,61 berdasarkan surat dari Kepala Biro SDM nomor 383/8-4P/05.02/DA.1/2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi Perhitungan Nilai Indeks Profesionalitas di Lingkungan BKN Tahun 2023 Atas Dasar Penilaian Tahun 2022.		
35.6. Tersedianya sistem informasi internal di lingkungan Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian													
								100,00					
KU 7	Pemenuhan pemeliharaan sistem informasi yang terintegrasi di lingkungan Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian	100%	100%	100%	100,00%						Pelaksanaan aktivitas harian di lingkungan unit kerja telah menggunakan SI terintegrasi, diantaranya LSP, Presensi, Smpng, Kinerja, DOK, eTravel, Teken DPKM, Loker dan Sirkasid.		
35.7. Tersedianya literasi di lingkungan Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima													
								100,00					
KU 8	Pemenuhan pelaksanaan rencana aksi informasi literasi di lingkungan Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian	100%	100%	100%	100,00%						Telah disusun Dokumen RB General dan Tematik Direktorat PDPIK. Adapun pengumpulan eviden telah dilaksanakan pada akhir Semester I 2023 dan disampaikan kepada Biro Perencanaan dan Organisasi melalui nota dinas nomor 297/OT.06/IND/06/2023.		
KU 9	Pemenuhan pemenuhan dokumen SOP di Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian	100%	100%	100%	100,00%						Bahan dokumen SARF 2023 yang telah tersedia diantaranya: 1. Perjanjian Kinerja Reform Direktorat 2023 revisi November 2023 2. Manual KU revisi November 2023 3. Rencana Aksi 2023 revisi November 2023 4. Rincian Target Kinerja UMR 2023 revisi November 2023 5. Buku Laporan Capaian Kinerja TW II 2023		
35.8. Terkolaborasi anggaran di lingkungan Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian secara efisien dan akuntabel													
								100,00					
KU 10	Pemenuhan kualitas pelaksanaan anggaran di lingkungan Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian	98%	98%	99,00%	101,00%						Pemenuhan efisiensi dari pagu anggaran pasca buku buku dan tambahan anggaran menjadi sebesar Rp.525.500.000,00 Realisasi SPKD sd. TW IV 2023 sebesar Rp820.986.889,00 dengan rincian: pada TW I Rp. 82.713.436,00 pada TW II Rp. 149.802.375,00 pada TW III Rp. 118.479.424,00 pada TW IV Rp. 558.143.334,00		
KU 11	Pemenuhan tindak lanjut temuan hasil audit/jurnal/hasil pemeriksaan	100%	100%	100%	100,00%						Disuai dengan rekomendasi BPK, telah disusun draft SOP kegiatan penyediaan data pemetaan kebutuhan ASN dan selanjutnya disampaikan kepada inspektorat melalui nota dinas nomor		